LAPORAN KINERJA 2020



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Jl. Dr. Soedarso, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

2020

1500533 HALOBPOM

pontianak.pom.go.id @BPOMPontianak Bbpom Pontianak @bbpom.ponti 082255470600

BALAI BESAR POM
DI PONTIANAK

CHANGE TO ELEVATE

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2020 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2020 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja memuat isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2020 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dalam kondisi pandemi Covid-19 berbagai tantangan pengawasan antara lain pengawasan sarana yang tidak dapat dilakukan secara *on-site,* KIE yang tidak dapat menjangkau masyarakat secara tatap muka langsung, pembatasan perjalanan ke kabupaten/kota, Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator output sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori baik.

Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab pengawasan. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pontianak, 19 Februari 2021
Kepala BBPOM di Pontianak

Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,56% (Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja sebesar 115,06% (Sangat Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah masyarakat Kalimantan Barat menjadi lebih paham dan sadar terhadap keamanan dan resiko Obat dan Makanan aman yang dikonsumsi untuk diri dan keluarga serta lingkungannya.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja sebesar 100,77% (Baik). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya peran aktif pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga kualitas Obat dan Makanan yang diproduksi maupun diedarkan di Kalimantan Barat.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja 133,62% (Tidak dapat disimpulkan). *Outcome* yang diharapkan dari

indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang sesuai standar di Kalimantan Barat.

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar 100,63% (Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah teredukasinya masyarakat mengenai Obat dan Makanan aman di Kalimantan Barat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,94% (Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar 102,84% (Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah menjamin keamanan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal dengan capaian sebesar 91,11% (Baik). *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah tercapainya indeks RB dengan nilai 95 pada akhir Tahun 2024.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal dengan capaian sebesar 110,61% (Sangat Baik). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 107,90% (Baik). *Outcome* yang berhasil dicapai adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan optimalnya pengelolaan data di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar 119,4% (Sangat Baik). *Outcome* yang berhasil

dicapai adalah anggaran yang tersedia di Balai Besar POM Pontianak dikelola secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan kriteria **Baik** dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 104,01%. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kriteria **Cukup**, yaitu indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

Terdapat juga capaian indikator kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,13 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,13. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE > 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu

upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Outcome yang ingin dicapai dalam pengukuran efisiensi ini adalah komitmen akuntabilitas anggaran Balai Besar POM di Pontianak agar membawa manfaat yang ideal kepada masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan perencanaan. Anggaran Balai Besar POM di Pontianak merupakan Uang Negara yang diamanahkan dan harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun penyerapan anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp23.911.496.952,- (95,52%) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp25.032.475.000,-. Realisasi anggaran di tahun 2020 ini termasuk kategori **Baik** dan hal ini sangat menunjang capaian sasaran semua kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari tercapainya Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 104,01%.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Penguatan pemberantasan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, Tanpa Izin Edar, dan palsu, melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan, serta kerjasama dengan lintas sektor lewat operasi gabungan.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Organisasi Profesi (IAI dan PAFI), Asosiasi Pelaku Usaha (ASPADIN, GP Farmasi, dan Perkrindo), serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017.
5. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.

"HIGHLIGHT

Beberapa capaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sepanjang tahun 2020



(1) Februari - Pameran dan KIE pada perayaan Imlek dan Cap Go Meh

(2) Februari - Training peningkatan Reformasi Birokrasi SDM

(3) Mei - Kontribusi sebagai relawan penguji COVID-19 di PPPOMN

(4) Mei - Kontribusi peminjaman alat PCR dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

(5) Juni - Virtual workshop Implementasi Inovasi Pelayanan Publik pada Era New Normal

(6) Juni - Pengungkapan perkara tindak pidana peredaran psikotropika melalui marketplace

(7) Agustus - Launching aplikasi pengawasan "TRACKING" (Telusur dan Cari Hasil Uji Sampel Pihak Ketiga)

(8) September - Launching aplikasi pengawasan "SIPERKASA" (Sistem Informasi Pengawasan dan Rekomendasi Sarana)

(9) September - Audit surveilan ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu

NEXT!





10



11



12

(10) September - KIE pemberdayaan masyarakat bersama anggota Komisi IX DPR RI

(11) Oktober - Kordinasi lintas sektor

(12) Oktober - Launching aplikasi "SI NYAI LAGAK" (Sistem Penyebaran Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen) Loka POM Sanggau

(13) & (14) Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian dan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura



13



14



15



16



17



18



19

(15) Desember - Pendampingan UMKM bidang pangan

(16) Desember - Desk CAPA bersama

(17) Prestasi individu pegawai dalam rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan PIM

(18) Prestasi individu pegawai dalam rangka memperingati HUT BPOM ke-19

(19) Desember - Pencanangan **"BBPOM di Pontianak Goes to WBBM 2021"**

BBPOM di Pontianak
Goes to WBBM 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY iii
HIGHLIGHT viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR GRAFIK xiii
DAFTAR TABEL xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 9
1.4 Isu Strategis 12

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 17
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan 18
2.3 Budaya Organisasi 28
2.4 Sasaran Strategis 30
2.5 Perjanjian Kinerja 40
2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 42
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 48
2.8 Kriteria Pencapaian Indikator 51

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 53
a. Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai Besar POM di Pontianak 58
b. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak 86

c. Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di balai Besar POM di Pontianak 93
d. Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak 108
e. Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di balai Besar POM di Pontianak.....137
f. Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak 155
g. Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Efektifitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak.....167
h. Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal 172
i. Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Pontianak yang Berkinerja Optimal.....182
j. Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan 186
k. Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak Secara Akuntabel 197

3.2 Realisasi Anggaran 205
3.3 Efisiensi dan Efektifitas 209

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 217
4.2 Saran 220

LAMPIRAN-LAMPIRAN 221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak 6
Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak..... 11
Gambar 1.3.2. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau 12
Gambar 2.2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan 19
Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan 23
Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan 23
Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2.1. Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan Pos POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 9
Grafik 3.1.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 63
Grafik 3.1.2. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian 64
Grafik 3.1.3. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 69
Grafik 3.1.4. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian 71
Grafik 3.1.5. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 76
Grafik 3.1.6. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian 78
Grafik 3.1.7. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 83
Grafik 3.1.8. SDM pada Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Infokom dan Kelompok Substansi Pengujian 84
Grafik 3.1.9. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 91
Grafik 3.1.10. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 96
Grafik 3.1.11. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 102
Grafik 3.1.12. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 106

Grafik 3.1.13. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....111
Grafik 3.1.14. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding.....117
Grafik 3.1.15. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 122
Grafik 3.1.16. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 127
Grafik 3.1.17. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 131
Grafik 3.1.18. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 135
Grafik 3.1.19. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding.....140
Grafik 3.1.20. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 146
Grafik 3.1.21. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 149
Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....153
Grafik 3.1.23. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....158
Grafik 3.1.24. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian 160
Grafik 3.1.25. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding.....164

Grafik 3.1.26. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian 166
Grafik 3.1.27. Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding....170
Grafik 3.1.28. Perbandingan Indeks RB BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 175
Grafik 3.1.29. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 180
Grafik 3.1.30. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding....184
Grafik 3.1.31. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis....190
Grafik 3.1.32. SDM Kelompok Substansi Pengujian....192
Grafik 3.1.33. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 196
Grafik 3.1.34. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 200
Grafik 3.1.35. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding....204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya 7
Tabel 1.2.2. Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan Pos POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8
Tabel 2.5.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak 40
Tabel 2.6.1. Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Tahun 2020..... 45
Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Pontianak..... 48
Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator 52
Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pontianak..... 54
Tabel 3.1.2. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 55
Tabel 3.1.3. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020..... 60
Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2019..... 61
Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024..... 62
Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 62
Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020..... 67
Tabel 3.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2019..... 68
Tabel 3.1.9. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024..... 68
Tabel 3.1.10. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 69
Tabel 3.1.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020..... 73

Tabel 3.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 74
Tabel 3.1.13. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 75
Tabel 3.1.14. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 75
Tabel 3.1.15. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 80
Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 81
Tabel 3.1.17. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 82
Tabel 3.1.18. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 82
Tabel 3.1.19. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 87
Tabel 3.1.20. Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 dengan Tahun 2019 88
Tabel 3.1.21. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 89
Tabel 3.1.22. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awarness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 90
Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 94

Tabel 3.1.24. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 95
Tabel 3.1.25. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 96
Tabel 3.1.26. Skala Indeks Kepuasan Masyarakat 99
Tabel 3.1.27. Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 100
Tabel 3.1.28. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 101
Tabel 3.1.29. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....101
Tabel 3.1.30. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 105
Tabel 3.1.31. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 105
Tabel 3.1.32. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pembanding 106
Tabel 3.1.33. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 109
Tabel 3.1.34. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 dengan Target 2024 110
Tabel 3.1.35. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 110
Tabel 3.1.36. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak.....114

Tabel 3.1.37. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2020 dengan Tahun 2019.....115
Tabel 3.1.38. Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024.....116
Tabel 3.1.39. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 116
Tabel 3.1.40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 120
Tabel 3.1.41. Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2019 121
Tabel 3.1.42. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dengan Tahun 2024 121
Tabel 3.1.43. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 122
Tabel 3.1.44. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 125
Tabel 3.1.45. Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 125
Tabel 3.1.46. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2024.....126
Tabel 3.1.47. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 126
Tabel 3.1.48. Perbandingan dan Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Pontianak. 129
Tabel 3.1.49. Perbandingan Pencapaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 130

Tabel 3.1.50. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2024 130
Tabel 3.1.51. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 131
Tabel 3.1.52. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 134
Tabel 3.1.53. Perbandingan Persentase Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan Tahun 2024....134
Tabel 3.1.54. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 135
Tabel 3.1.55. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan....138
Tabel 3.1.56. Profil pencapaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019....139
Tabel 3.1.57. Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Tahun 2024 139
Tabel 3.1.58. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 140
Tabel 3.1.59. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman....143
Tabel 3.1.60. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 dengan Tahun 2024....144
Tabel 3.1.61. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding 145
Tabel 3.1.62. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 148
Tabel 3.1.63. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 dengan Tahun 2024....148
Tabel 3.1.64. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding....149
Tabel 3.1.65. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 151

Tabel 3.1.66. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 dengan Tahun 2024 152
Tabel 3.1.67. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 152
Tabel 3.1.68. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar 156
Tabel 3.1.69. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019 156
Tabel 3.1.70. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2024 157
Tabel 3.1.71. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 158
Tabel 3.1.72. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 162
Tabel 3.1.73. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019 162
Tabel 3.1.74. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2024 163
Tabel 3.1.75. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding 164
Tabel 3.1.76. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 167
Tabel 3.1.77. Pencapaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2019 168
Tabel 3.1.78. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 169
Tabel 3.1.79. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain Sebagai Pembanding 170
Tabel 3.1.80. Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 174

Tabel 3.1.81. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 174
Tabel 3.1.82. Perbandingan capaian Indeks RB BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....175
Tabel 3.1.83. Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020.....178
Tabel 3.1.84. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Tahun 2019 178
Tabel 3.1.85. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 179
Tabel 3.1.86. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 179
Tabel 3.1.87. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 182
Tabel 3.1.88. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024.....183
Tabel 3.1.89. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 183
Tabel 3.1.90. Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium.....187
Tabel 3.1.91. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium 188
Tabel 3.1.92. Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 189
Tabel 3.1.93. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding 190
Tabel 3.1.94. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020.....194
Tabel 3.1.95. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024.....195

Tabel 3.1.96. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....195
Tabel 3.1.97. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 198
Tabel 3.1.98. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024 199
Tabel 3.1.99. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding 199
Tabel 3.1.100. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 202
Tabel 3.1.101. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024.....203
Tabel 3.1.102. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding.....203
Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 206
Tabel 3.2.2. Indeks dan Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020.....211

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain:

1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.

Agar program Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, diperlukan Lembaga yang memiliki fungsi utama

dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan menjalankan fungsi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan POM RI membentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan

waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten/kota) di tiap-tiap kabupaten/kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut:

a. Kota Pontianak : -
b. Kota Singkawang : 4 jam (sekitar 150 km)
c. Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
d. Kabupaten Mempawah : 2 jam (sekitar 75 km)
e. Kabupaten Bengkayang : 5 jam (sekitar 160 km)
f. Kabupaten Sambas : 7 jam (sekitar 230 km)
g. Kabupaten Landak : 4 jam (sekitar 135 km)
h. Kabupaten Sanggau : 6 jam (sekitar 185 km)
i. Kabupaten Sekadau : 7 jam (sekitar 260 km)
j. Kabupaten Sintang : 9 jam jalur darat (sekitar 320 km), atau 40 menit jalur udara
k. Kabupaten Melawi : 10 jam (sekitar 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (sekitar 90 km)
l. Kabupaten Kapuas Hulu : 15 jam jalur darat (sekitar 580 km), atau 70 menit jalur udara
m. Kabupaten Ketapang : 12 jam jalur darat (sekitar 335 km), atau 40 menit jalur
n. Kabupaten Kayong Utara : jalur udara melalui Ketapang sekitar 45 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (sekitar 90 km)

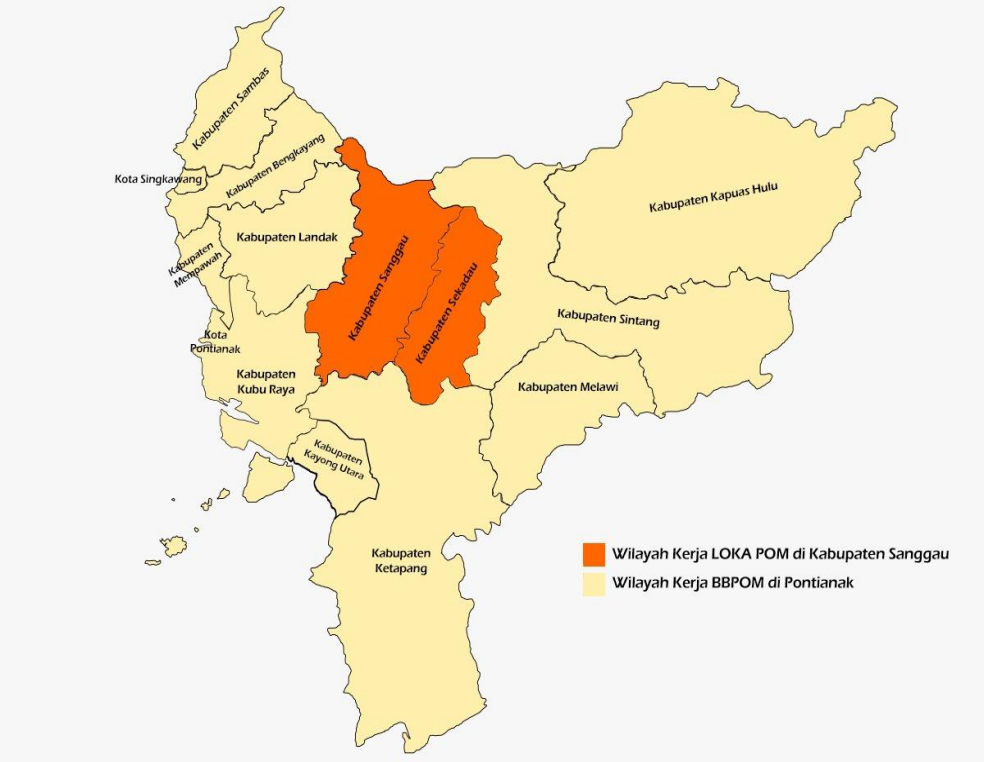
Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan

tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal/TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkotika, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1.678 sarana distribusi dengan total 2.032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu Pos POM Entikong dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Entikong dan Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh *(sampling)* Obat

dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM Sanggau, dan Pos POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 125 orang dengan rincian 100 orang pegawai BBPOM di Pontianak, 23 orang pegawai di Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan 2 orang di Pos POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari berbagai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional guna melaksanakan tugas dan fungsi BBPOM di Pontianak.

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

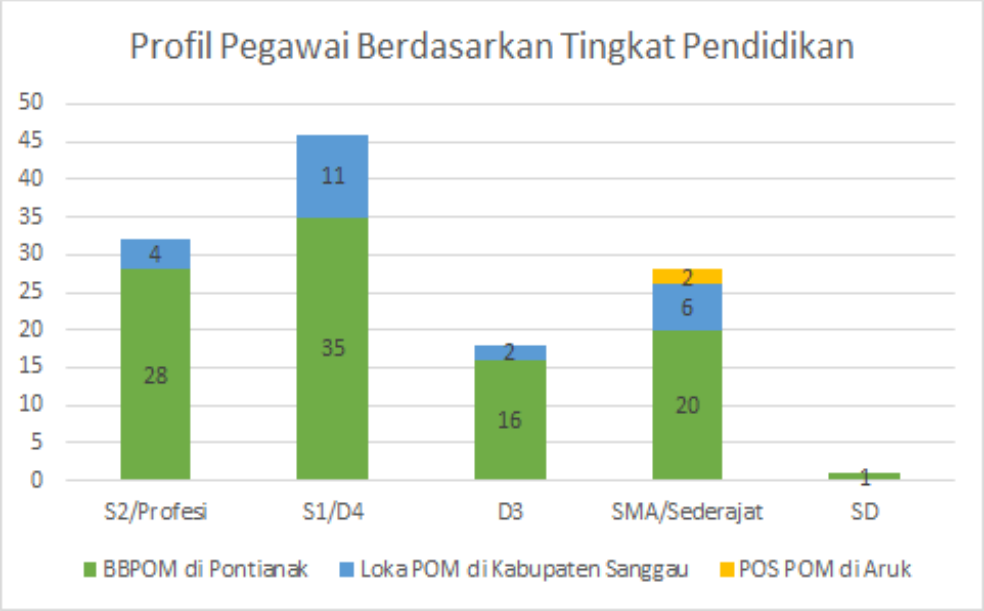
Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Sanggau	Pos POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1		
Kepala Bidang Tata Usaha	1		
Kepala Loka POM di Sanggau		1	
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	18		
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	10	11	
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Penyelia	3		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana Lanjutan	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil Pelaksana	2		
Analis Anggaran	1		
Analis Kepegawaian Mahir	1		
Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1		
Fungsional Umum	2	1	
Pengadministrasi Keuangan	1		
Pengadministrasi Umum	3		
Bendahara	1		
Analis Perencana Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	1		
Analis SDM Aparatur	1		
Analis Pengelola Barang Milik Negara	1		
Pengelola Database	1		
Caraka	1		
Analis Layanan Umum	1		
Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan	1		

Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	4		
Analis Laboratorium	3		
Analis Laporan Keuangan	1		
Pranata Komputer Terampil		1	
Verifikator Keuangan		1	
Arsiparis Terampil	1		
PPNPN	24	8	2
Jumlah Total	**100**	**23**	**2**

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat Pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 32 orang, Strata 1/sederajat 46 orang, Diploma 3 sebanyak 18 orang dan SMA/sederajat sebanyak 28 orang dan SD/sederajat sebanyak 1 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar. Pada tahun 2020, terdapat sembilan orang yang mengikuti program tugas belajar dan dua orang yang mengikuti program izin belajar.

Tabel 1.2.2. Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan Pos POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Sanggau	POS POM di Aruk
S2/Profesi	28	4	
S1/D4	35	11	
D3	16	2	
SMA/Sederajat	20	6	2
SD	1		
Total	**100**	**23**	**2**



Grafik 1.2.1. Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan Pos POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

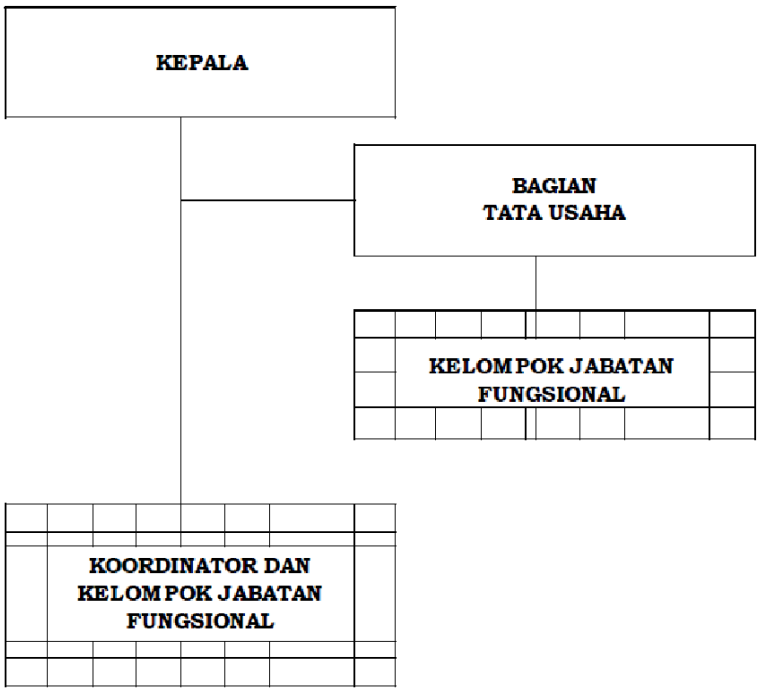
2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

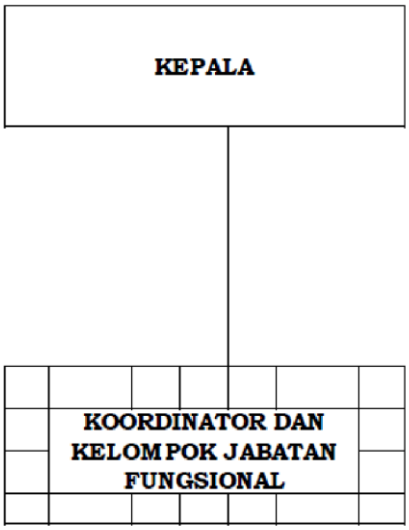
Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Loka POM di Sanggau terdiri atas:

a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.3.2. Struktur Organisasi Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Sanggau

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faKtor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Pontianak dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Pada tahun 2020, dampak nyata arus perjalanan manusia menyebabkan merebaknya wabah Covid-19 yang sebelumnya endemic di Provinsi Wuhan, RRT, menjadi pandemic yang berdampak ke seluruh dunia termasuk ke Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini

menuntut Balai Besar POM di Pontianak untuk merespon dengan melakukan langkah-langkah preventif maupun kuratif, sekaligus menjaga produktivitas untuk mencapai target indicator kinerja yang telah ditetapkan.

2) Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Di lain pihak, adanya perjanjian perdagangan internasional ini dapat memacu pelaku usaha di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. BBPOM di Pontianak dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi dan distribusi produknya.
3) Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana Badan POM dan khususnya Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri.
5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing

Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

6) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Dalam hal ini BBPOM di Pontianak dituntut untuk selalu berupaya untuk menyesuaikan proses reformasi birokrasi baik dengan Grand Design RB tersebut maupun *roadmap* Reformasi Birokrasi Badan POM RI.
7) Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan Badan POM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan Badan POM sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
8) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one-line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat

segera ditindaklanjuti. BBPOM di Pontianak harus dapat menyelaraskan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat terutama yang terkait pemangku kepentingan di pemerintah daerah dengan program kerja Badan POM RI.

9) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi BPOM untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans. Dalam program farmakovigilans, BBPOM di Pontianak berpartisipasi dalam monitoring efek samping obat. Di Kalimantan Barat, konsumsi obat modern juga dipengaruhi oleh tren berobat ke Sarawak, Malaysia. Banyaknya warga Kalimantan Barat berobat ke rumah sakit di Kuching dan Serawak (Malaysia) menjadi trend tersendiri di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini menjadi tantangan terhadap pengawasan masuknya produk obat-obatan dari Malaysia masuk melalui wilayah perbatasan, baik melalui barang bawaan pelintas melalui jalur PLBN, ataupun melalui jalur tidak resmi. Modus yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab adalah jasa titip pembelian obat.
10) Tingginya pertumbuhan industri Obat dan Makanan, khususnya industri UMKM pangan. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, serta rendahnya inisiatif untuk mendaftarkan produknya menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Telah dilakukan pendampingan pelaku usaha dengan pemeriksaan jemput bola, sampling dan pengujian dalam rangka pendaftaran produk UMKM, sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran pangan olahan, namun belum semua produk dapat memperoleh izin edar. Selain industri pangan, terdapat juga potensi industri obat tradisional. Sebagai contoh, terdapat produk obat tradisional yang berasal dari tanaman endemik di Pulau Kalimantan yaitu bajakah, pasak bumi dan bawang dayak, namun hingga saat ini belum terdapat industri obat tradisional yang memproduksi produk tersebut dengan izin edar TR. Belum adanya kajian ilmiah keamanan, manfaat dan mutu bahan alam

tersebut menjadi salah satu kendala pengembangan industri obat tradisional di Kalimantan Barat.

11) Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk. Provinsi Kalimantan Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,45% dengan 69,8% atau 3.811.134 jiwa masuk ke dalam kategori kelompok usia produktif.
12) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan *trend* transaksi Obat dan Makanan secara daring meningkat signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan secara daring (patroli siber), produk ilegal yang paling banyak ditemukan adalah kosmetik dan obat tradisional. Tantangan pengawasan secara daring meliputi identitas penjual yang tidak jelas, alamat penjual yang tidak pasti, modus penjualan *dropshipping* yang menyulitkan pengungkapan kasus, sehingga diperlukan metoda baru, peralatan khusus yang memadai, dan petugas yang kompeten.
13) Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional mengakibatkan perubahan pengawasan yang fundamental, antara lain pengalihan pemeriksaan, *sampling,* dan KIE secara *offline* menjadi *online*. Kegiatan secara online tersebut tidak selalu dapat dilakukan di Kalimantan Barat dikarenakan keterbatasan jangkauan internet.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

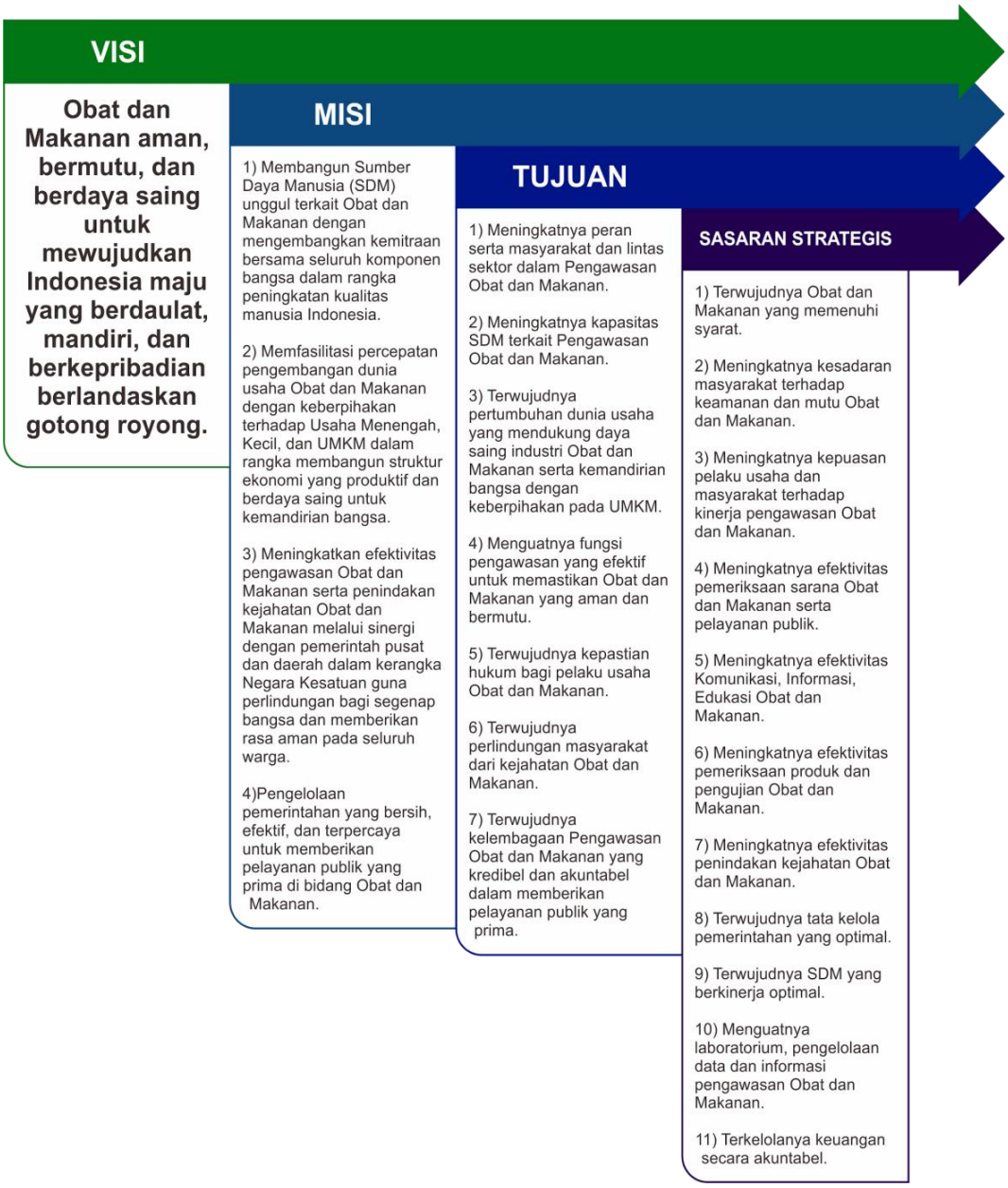
Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human*

capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BBPOM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Badan POM

2.2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup: 1) Penyediaan Pelayanan Dasar, dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu:

"Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut:

1) **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia.* Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak

sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

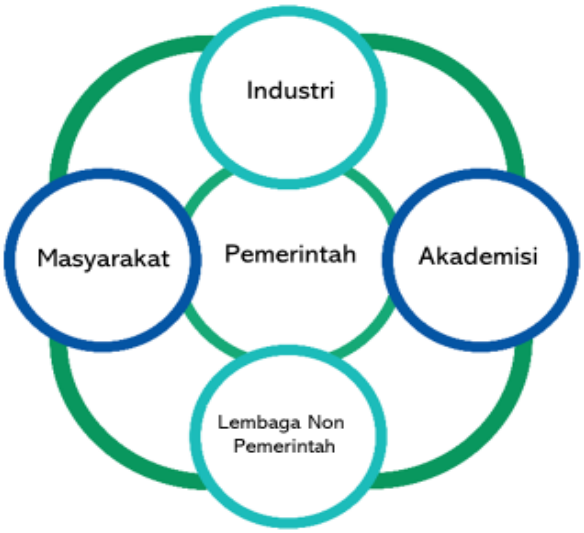
Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2.3. *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

2) **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.* Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era

perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.*

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan *sampling* produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah

sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.* Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024.

2.2.3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Balai Besar POM di Pontianak menjadi semangat bagi seluruh anggota Balai Besar POM di Pontianak dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1) Profesional

   Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2) Integritas

   Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3) Kredibilitas

   Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4) Kerjasama Tim

   Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5) Inovatif

   Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6) Responsif/Cepat Tanggap

   Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Balai Besar POM di Pontianak juga memiliki moto sebagai penyemangat dan motivasi yaitu “TANJAK”. TANJAK merupakan akronim dari Tangguh, Amanah, Nasionalis, Jujur, Adaptif, dan Kreatif, dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

1) T (Tangguh)

   Kuat karakter dan pendirian, tidak mudah menyerah, tabah dan tahan menghadapi segala tantangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

2) A (Amanah)

   Bertanggung jawab serta mempu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

3) N (Nasionalis)

   Cinta tanah air, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

4) J (Jujur)

   Tulus, sesuai antara ucapan, perkataan dan perbuatan.

5) A (Adaptif)

   Cepat belajar, lincah bergerak dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang semakin cepat.

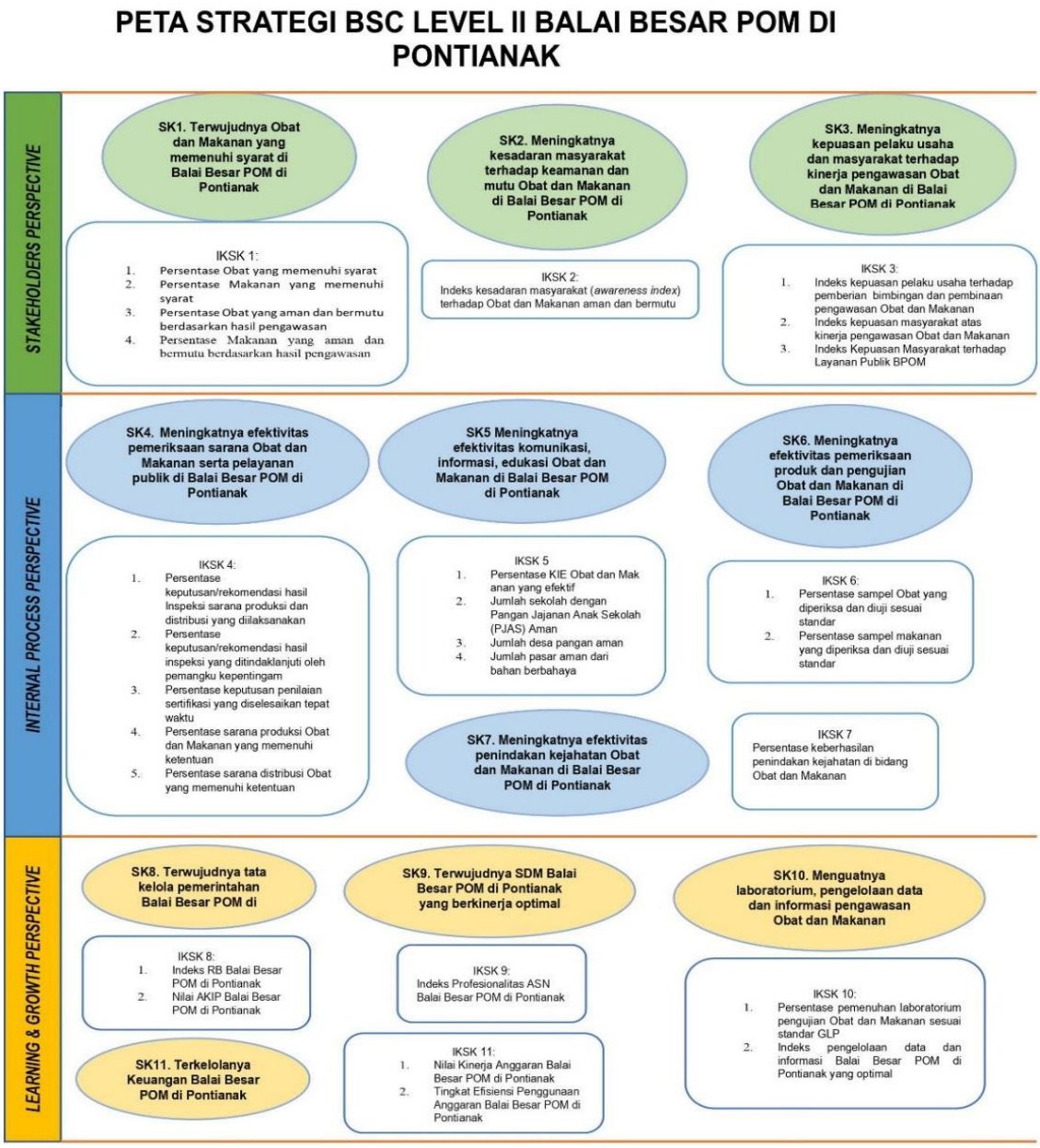
6) K (Kreatif)

   Mampu berfikir, menciptakan suatu ide serta bertindak dengan cerdas dan berbeda dalam menyelesaikan masalah untuk membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

Kata TANJAK diambil dari nama penutup kepala kaum laki-laki Suku Melayu yang memiliki makna filosofi sebagai sebuah lambang kehormatan yang harus dijaga karena bertaut maruah atau harga diri. Simbol Tanjak adalah sebuah amanah sekaligus kekuatan untuk melaksanakannya, didalamnya terdapat nasihat dan anjuran agar kita dapat memanfaatkan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan diri dan masyarakat serta bangsa dan negara. Tanjak juga sebagai simbol sebuah peradaban, arah Tanjak yang selalu mengarah ke atas melambangkan prinsip hidup yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Ketuhanan. Nilai-nilai filosofi TANJAK menjadi motto, sebagai penyemangat dan motivasi seluruh insan Balai Besar POM di Pontianak dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 2.4.1. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai Besar POM di Pontianak**

   Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif

seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 92,3% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 96% pada akhir tahun 2024.
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari

pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 82 pada akhir tahun 2024.

3. **Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

   Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.
2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 81 pada akhir tahun 2024.
3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi, Sampling dan Pengujian Produk, serta Penegakan Hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 47% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 65% pada akhir tahun 2024.
3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 90% pada akhir tahun 2024.

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 24% pada akhir tahun 2024.
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 65% pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 85 pada akhir tahun 2024.
2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 104 sekolah pada akhir tahun 2024.
3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.
4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.
2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi

maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95 pada akhir tahun 2024.

2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 85 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu

poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 88% pada akhir tahun 2024.
2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja:

1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 97 pada akhir tahun 2024.
2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 90 pada akhir tahun 2024.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.5.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.00%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71.00%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	70
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46.00%

makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28.70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20.00%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00%
	Indeks Pelayanan Publik	3.51
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.66
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
	Jumlah desa pangan aman	4
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00%
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88.00%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	90
	Nilai AKIP UPT	80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%

informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	80.00%

Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan: Rp 25.032.475.000,-

2.6. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR PR.04.04.01.107.1071.05.20.1102a TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HK.02.02.107.1071.11.19.3410 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.107.1071.11.19.3410 tahun 2019 tentang RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas

Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02. 02. 107. 1071. 05. 20. 1076 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK. 02. 02. 107. 1071. 11. 19. 3410 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK NOMOR HK. 02. 02. 107. 1071. 11. 19. 3410 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tabel 2.6.1. Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	89,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,66
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	90
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80

9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (80%)

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Pontianak

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	80,80%	80,80%	80,80%	Rp 122.366.250
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	Rp 191.706.250
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	Rp 130.386.250
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	Rp 183.138.750
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	70	Rp 173.692.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	-	-	-	86	Rp 156.138.000

	Balai Besar POM di Pontianak	Makanan					
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	69	Rp 82.400.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	89,5	Rp 52.540.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	Rp 375.306.000
		Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,70%	28,70%	28,70%	26,70%	Rp 220.352.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Rp 222.912.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Rp 175.306.000
		Persentase sarana distribusi Obat	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Rp 125.584.000

		dan Makanan yang memenuhi ketentuan					
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	3,51	Rp 524.120.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	86,6	86,6	86,6	Rp 1.453.084.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	12	16	Rp 421.953.000
		Jumlah desa pangan aman	1	2	3	4	Rp 700.370.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,5	1	1,5	2	Rp 150.000.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,50%	45,00%	67,50%	90,00%	Rp 550.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,50%	45,00%	67,50%	90,00%	Rp 550.000.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,00%	44,00%	66,00%	88,00%	Rp 819.108.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	90	Rp 296.189.000

	POM di Pontianak yang optimal	Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	80	Rp 138.584.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	75	Rp 8.850.610.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	84,00%	Rp 3.297.738.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	-	1,51	1,51	1,51	Rp 4.624.620.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	23,25	46,50	69,75	93	Rp 90.331.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Rp 353.940.000

2.8. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timeable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1) Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8.1. Kriteria Pencapaian Indikator

Sangat Kurang	Capaian Target Indikator <50%
Kurang	Capaian Target Indikator 50% – <70%
Cukup	Capaian Target Indikator 70% – <90%
Baik	Capaian Target Indikator 90% – <110%
Sangat Baik	Capaian Target Indikator 110% – <120%
Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian Target Indikator >120%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 terhadap target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (4) membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan balai lain yang setara; (5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (6) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan (8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan pada tahun 2020 BBPOM di Pontianak telah berhasil mencapai 8 (delapan) kriteria Baik, 2 (dua) kriteria Sangat Baik, dan 1 (satu) kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.1. Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pontianak

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	96,56%	Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	115,06%	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,77%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	133,62%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,63%	Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,05%	Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	102,84%	Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	91,11%	Baik
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	110,61%	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	107,90%	Baik
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	109,49%	Baik

Bila dibandingkan dengan pencapaian Sasaran Kegiatan 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Jakarta, maka diperoleh hasil seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pontianak Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Perspective	No.	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Samarinda	Capaian BBPOM di Pekanbaru	Capaian BBPOM di Jakarta
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	96,56%	96,05%	99,65%	99,40%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	115,06%	111,04%	103,81%	110,04%
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,77%	98,56%	97,72%	101,92%

Internal Process	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	133,62%	116,35%	124,37%	115,73%
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,63%	105,33%	101,80%	101,07%
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,05%	111,11%	115,60%	96,73%
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	102,84%	153,29%	176,27%	169,91%
Learning & Growth	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	91,11%	92,58%	94,57%	93,75%

	9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	110,61%	113,56%	103,71%	111,92%
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	107,90%	106,28%	103,02%	114,43%
	11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	109,49%	102,29%	106,92%	100,41%

Keterangan: Capaian Tertinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada *stakeholder perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan 3 Balai lain yang setara telah berhasil mencapai target Sasaran Kegiatan pertama dan ketiga dengan kriteria **Baik**. Capaian dengan kriteria **Sangat Baik** diraih oleh BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Jakarta pada sasaran kegiatan kedua dan kriteria **Baik** oleh BBPOM di Pekanbaru. BBPOM di Pontianak telah mencapai target pada *stakeholder perspective* dengan NPS sebesar 104,13% (Lampiran 3).

Pada *internal process perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan tiga Balai lain yang setara telah berhasil mencapai target Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **Baik** dan Sasaran Kegiatan kelima dengan kriteria **Sangat Baik**. Sasaran kegiatan keenam dicapai oleh BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pekanbaru dengan kriteria **Sangat Baik**. Pada Sasaran Kegiatan ketujuh kriteria **Sangat Baik** dicapai oleh BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Jakarta. BBPOM di Pontianak mendapat kriteria **Baik** pada Sasaran Kegiatan ketujuh. Secara

umum, BBPOM di Pontianak telah berhasil mencapai target pada perspektif *internal process* dengan NPS 104,90% (Lampiran 3).

Pada *learning and growth perspective* Balai Besar POM di Pontianak dan tiga Balai lain yang setara telah berhasil mencapai target Sasaran Kegiatan kedelapan dengan kriteria **Baik** dan Sasaran Kegiatan kesembilan dan kesepuluh dengan kriteria **Sangat Baik.** Pada Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria **Sangat Baik** hanya dicapai oleh BBPOM di Pontianak dan kriteria **Baik** dicapai oleh BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Jakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan sasaran *learning and growth perspective* telah tercapai dengan NPS BBPOM di Pontianak sebesar 103,01% (Lampiran 3).

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian BBPOM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sanggau. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. BBPOM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, BBPOM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam rangka registrasi produk ke Badan POM.

Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap Indikator Kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.3. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,8	88,17	109,12	Baik

Pada tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 88,17% berada di atas target (80,80%) dengan capaian sebesar 109,12%, termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	94	95,64	101,75	Baik
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	2020	80,8	88,17	109,12	Baik

Terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2019 dengan tahun 2020 yaitu:

a. Capaian tahun 2019 menggunakan Renstra BBPOM di Pontianak 2015-2019 dimana Persentase Obat Memenuhi Syarat dihitung sebagai capaian komoditi obat saja, sedangkan capaian tahun 2020 memperhitungkan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
b. Capaian tahun 2019 dihitung sebagai gabungan sampel yang disampling secara acak dan *targeted*, sedangkan capaian tahun 2020 merupakan data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel yang disampling secara acak.

Berdasarkan perbedaan tersebut maka realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.5. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

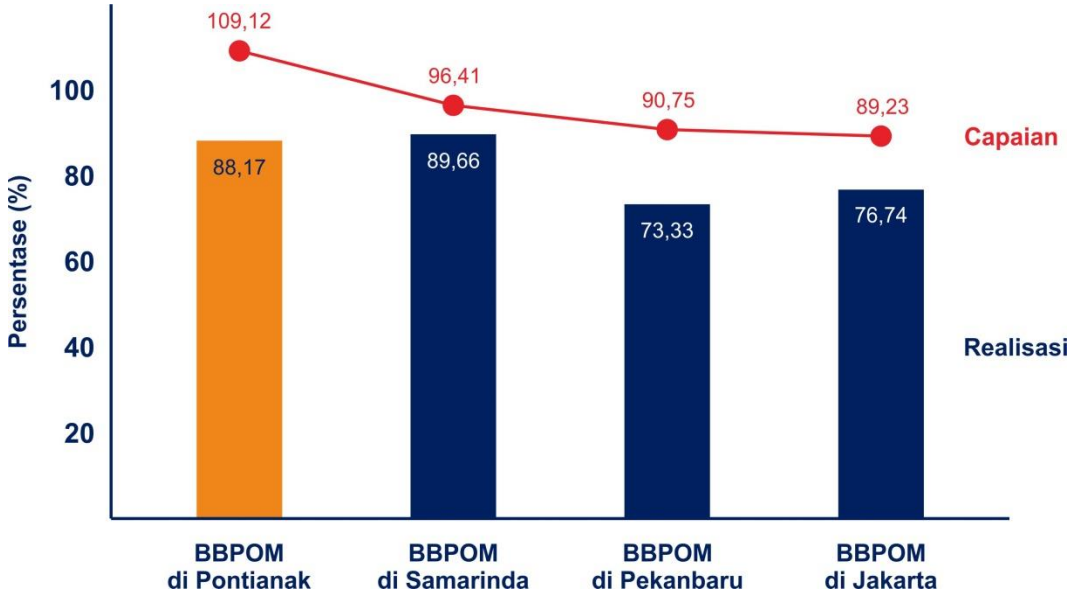
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,8	88,17	92,3

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2020 mencapai 88,17% melampaui target 80,80%. Capaian Tahun 2020 sebesar 95,52% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. BBPOM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Realisasi	88,17	89,66	73,33	76,74
	Capaian	109,12	96,41	90,75	89,23



Grafik 3.1.1. Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak beserta 2 (dua) Balai pembanding lainnya (BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pekanbaru) berada dalam kategori baik sedangkan BBPOM di Jakarta masuk ke dalam kategori Cukup. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Capaian BBPOM di Pontianak paling tinggi dibanding Balai lain pada kelompok *cluster* diikuti BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Jakarta.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium.

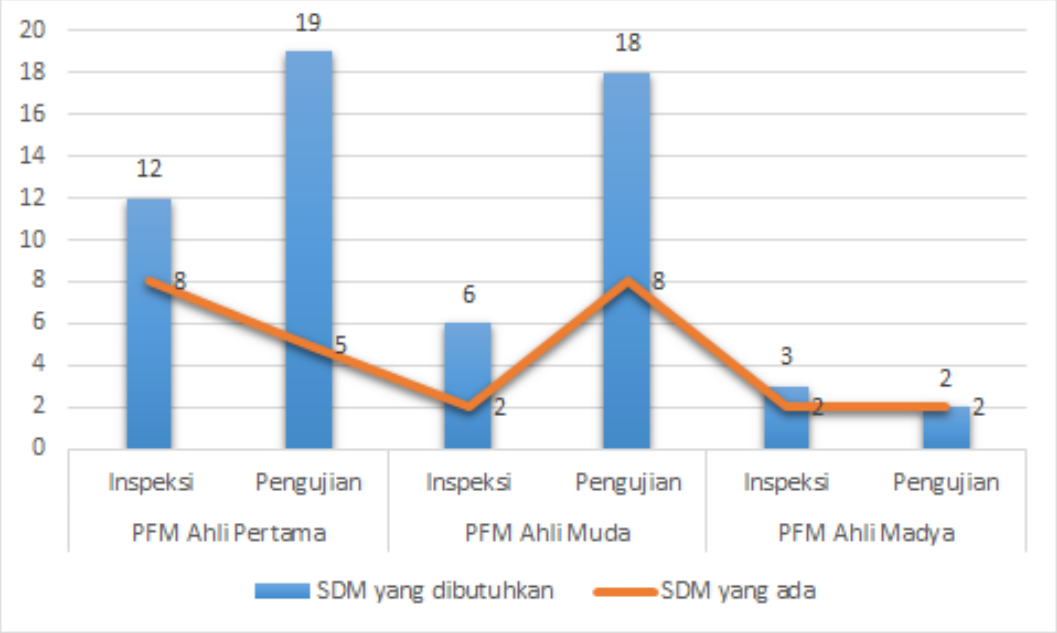
Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain:

a. Pelaksanaan sampling yang sesuai Pedoman Sampling tahun 2020, disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, sampling tetap dapat dilaksanakan sehingga mencapai target yang ditetapkan.

b. Peningkatan kapasitas pengujian melalui personil yang kompeten dan penggunaan instrumen yang berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang cepat dan dipercaya.
c. Pengawasan rutin sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha pada sarana distribusi dan pelayanan Obat, khususnya legalitas produk yang didistribusikan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat berada di Subkelompok Subtansi Inspeksi dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 27 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada dengan rincian seperti pada grafik 3.1.2.



Grafik 3.1.2. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang besar untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat juga efisien yaitu sebesar 1,11 kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan hasil kinerja di tahun 2020, BBPOM di Pontianak diharapkan dapat mempertahankan capaian yang telah diraih, bahkan meningkatkannya. Adanya peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa BBPOM di Pontianak senantiasa memperbaiki diri melalui pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki maupun peningkatan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan maupun dukungan sistem. Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian dalam pencapaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

a. Sampling dilakukan sesuai dengan Pedoman *Sampling* Tahun 2020.
b. Penertiban terhadap produk Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Penandaan terhadap produk Obat sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan label.
d. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji.
e. Kalibrasi peralatan laboratorium secara rutin.
f. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Sebagai contoh pada akhir Triwulan III tahun 2020, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian dan diperoleh hasil 87,20%. Hal ini telah melewati target Indikator Kinerja Persentase Obat tahun 2020 sebesar 80,80% sehingga ini menjadi perhatian dalam menetapkan target kinerja selanjutnya.

SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.7. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	78.02	100,03	Baik

Pada tahun 2020, untuk Indikator Kinerja persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 78,02% berada di atas target (78,00%) dengan capaian sebesar 100,03%, termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	71	90,56	127,55	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2020	78,00	78,02	100,03	Baik

Terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2019 dengan tahun 2020 yaitu angka yang digunakan dalam perhitungan capaian tahun 2020 merupakan data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel yang disampling secara acak sedangkan capaian pada tahun 2019 dihitung sebagai gabungan sampel yang disamping secara acak dan *targeted*. Berdasarkan perbedaan tersebut maka realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.9. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

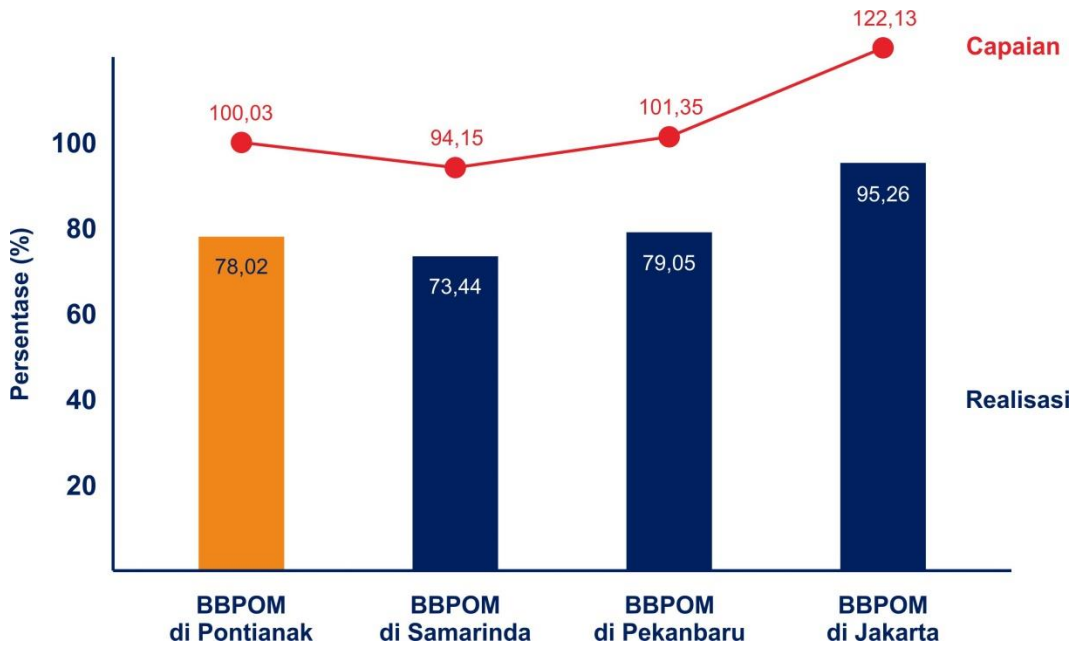
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	78,02	86,00

Realisasi terhadap Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2020 mencapai 78,02% dengan target 78,00%. Capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 90,72% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. BBPOM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.10. Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Realisasi	78,02	73,44	79,05	95,26
	Capaian	100,03	94,15	101,35	122,13



Grafik 3.1.3. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak masuk dalam kategori **Baik**. Untuk indikator

ini BBPOM di Jakarta memiliki nilai capaian paling tinggi (dengan kategori sangat baik), disusul BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Pontianak dan berikutnya BBPOM di Samarinda masing-masing dengan kategori Baik.

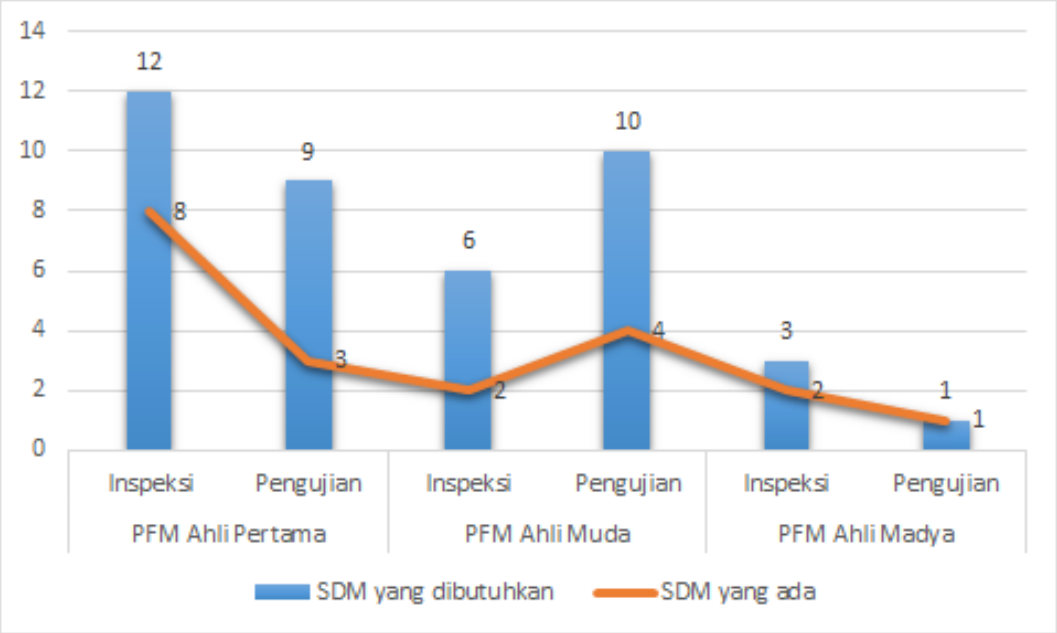
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

a. Efektivitas kegiatan KIE kepada pelaku usaha produksi dan distribusi pangan serta masyarakat yang baik meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan olahan aman dan bermutu.
b. Kemampuan laboratorium yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian sampel terhadap parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian 2020.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat berada di Subkelompok Subtansi Inspeksi dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 41 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 20 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada dengan rincian seperti pada grafik 3.1.4.



Grafik 3.1.4. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang besar untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 1,03 kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program BBPOM di Pontianak mempengaruhi pencapaian target atas indikator persentase makanan yang memenuhi syarat berperan dalam dua sisi:

a. Program yang mempengaruhi Kesadaran Pelaku usaha berupa pendampingan kepada pelaku usaha yang intensif, adapun rincian

kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha makanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pendampingan *on site* pada 7 sarana produksi.
- Pendampingan dan bimbingan teknis pada 24 sarana produksi.

b. Program yang mempengaruhi kemampuan petugas BBPOM di Pontianak menilai kualitas makanan yang beredar di pasaran yaitu:

- Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji.
- Kalibrasi peralatan laboratorium secara rutin.
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan ISO 17025 : 2017 secara konsisten.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Sebagai contoh pada akhir Triwulan III tahun 2020, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian dan diperoleh hasil 78,02%. Hal ini telah melewati target Indikator Kinerja Persentase Obat tahun 2020 sebesar 78,00% sehingga ini menjadi perhatian dalam menetapkan target kinerja selanjutnya.

SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah Memenuhi Syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Pengukuran terhadap indikator

dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targetes yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,00	82,81	88,10	Baik

Pada tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi

sebesar 82,81% berada di atas target (94,00%) dengan capaian sebesar 88,10%, termasuk dalam kriteria Cukup.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	94	95,64	101,75	Baik
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	94	82,81	88,10	Cukup

Terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja untuk Indikator Kinerja ini tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu capaian tahun 2019 dihitung sebagai gabungan sampel yang disampling secara acak dan *targeted*, sedangkan capaian tahun 2020 merupakan data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel yang disampling *targeted*. Berdasarkan perbedaan tersebut maka realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.13. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

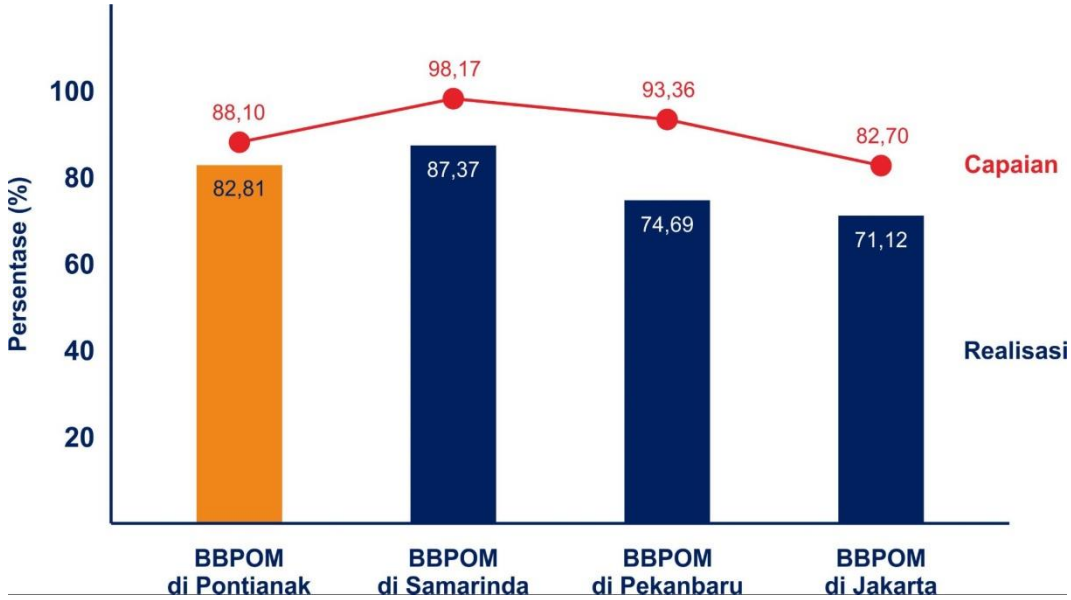
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	94,00	82,81	96,00

Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 mencapai 82,81% belum mencapai target 94%. Capaian Tahun 2020 sebesar 86,26 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Realisasi ini bila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2020-2024 perlu upaya strategis untuk mengatasi hambatan/tantangan yang terjadi pada tahun 2020. BBPOM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.14. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	82,81	87,37	74,69	71,12
	Capaian	88,10	98,17	93,36	82,70



Grafik 3.1.5. Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Capaian Indikator Kinerja persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Jakarta masuk ke dalam kategori Cukup. Sedangkan capaian dua Balai pembanding lainnya yaitu BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pekanbaru termasuk ke dalam kategori “Baik”. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa capaian paling tinggi untuk Indikator Kinerja ini diraih oleh BBPOM di Samarinda diikuti BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Jakarta.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak pada tahun 2020 hanya mencapai kategori cukup dari target yang telah ditetapkan. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat meliputi produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa, rusak, Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan serta Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian. Realisasi obat yang aman dan

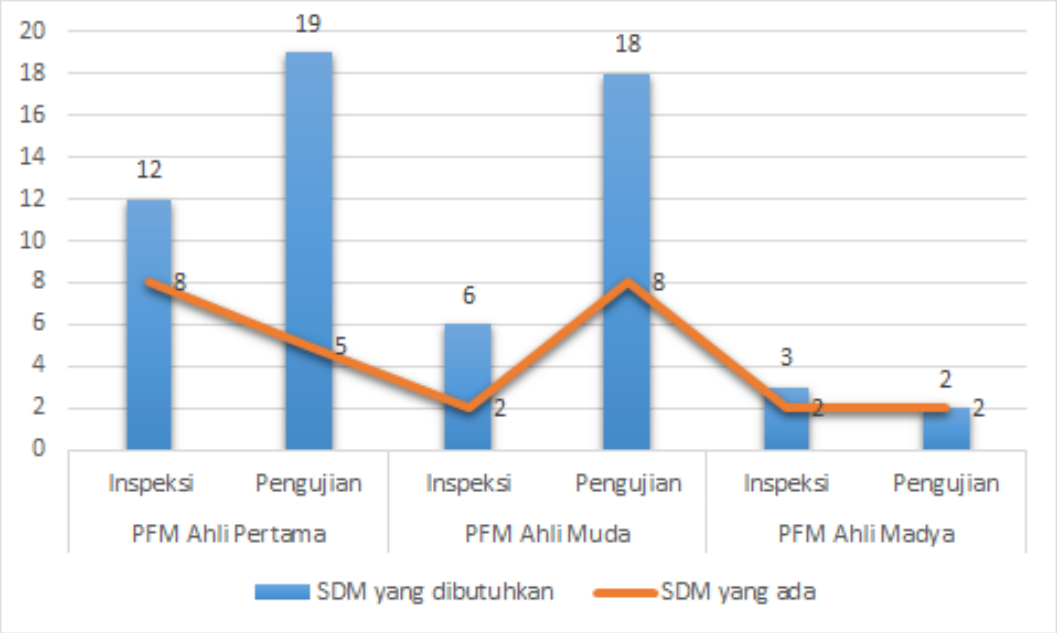
bermutu yang terealisasi di bawah target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Produsen Obat yang disampling secara *targeted* tidak memahami ketentuan penandaan (TMK Penandaan/Label);
b. Tindak lanjut terhadap produk Obat yang TMK Penandaan/Label membutuhkan waktu yang cukup lama;
c. Monitoring capaian yang kurang optimal;
d. Sanksi terhadap pelanggaran produk yang TMS/TMK tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.

Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain meningkatkan KIE kepada pelaku usaha, pembinaan, pendampingan dan pemberian sanksi yang tegas.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berada di Subkelompok Subtansi Inspeksi dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 27 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada dengan rincian seperti pada grafik 3.1.6.



Grafik 3.1.6. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, dan penggalangan komitmen petugas. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yaitu sebesar 0,89 (Kurang Efisien berdasarkan Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum tercapai oleh BBPOM di Pontianak pada tahun 2020 antara lain:

a. Pengawasan di lapangan belum mencapai seluruh kabupaten/kota
b. KIE belum menjangkau semua lapisan masyarakat dan pelaku usaha mengingat luasnya wilayah Kalimantan Barat dan terbatasnya akses informasi

c. Program sampling tidak bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota
d. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera
e. Koordinasi dalam rangka pengawasan dengan lintas sektor belum mendapatkan *feedback* yang diharapkan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Sebagai contoh pada akhir Triwulan III tahun 2020, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian dan diperoleh hasil 87%. Telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target 94% antara lain sampling sesuai pedoman, intensifikasi pengawasan, dan KIE kepada pelaku usaha. Namun hingga akhir tahun anggaran target kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak tercapai. Selanjutnya akan dilakukan perbaikan kinerja, monitoring dan evaluasi secara intensif sehingga diharapkan target setiap tahunnya dapat tercapai. Apabila capaian target dua tahun berturut-turut tidak terpenuhi maka akan dilakukan reviu target Renstra 2020-2024.

SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

(Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targetes yang diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.15. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	71,00	63,18	88,99	Cukup

Capaian Indikator Kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria Cukup yaitu sebesar 88,99%, dengan realisasi (63,18%) berada di bawah target (71,00%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	71	90,56	127,55	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	71	63,18	88,99	Cukup

Terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu angka yang digunakan dalam perhitungan capaian tahun 2020 merupakan data hasil pemeriksaan dan pengujian sampel yang disampling secara *purposive/targeted* sedangkan capaian pada tahun 2019 dihitung sebagai gabungan sampel yang disamping secara acak dan *targeted*, maka realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.17. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

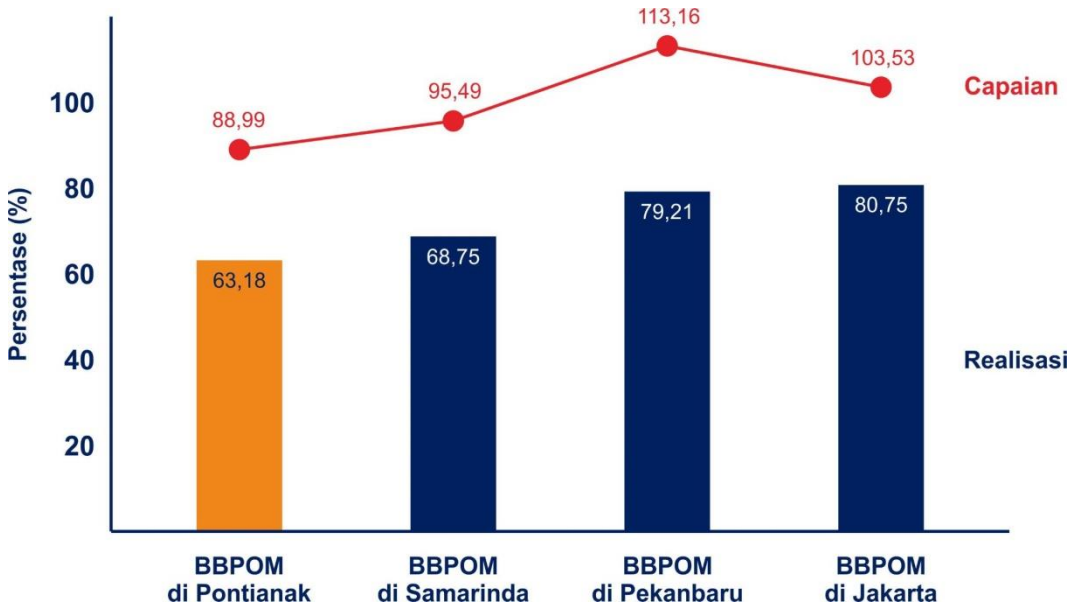
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	71,00	63,18	80,00

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2020 sebesar 63,18% dari target 71,00%, dengan capaian sebesar 88,99% kriteria **Cukup**. Capaian Tahun 2020 sebesar 78,98% dari target 80% di akhir tahun Renstra 2020-2024. BBPOM di Pontianak akan meningkatkan kinerja sampling beruapa perbaikan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian secara berkala, KIE yang tepat sasaran, pengawasan sarana yang lebih intens dan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera sesuai aturan yang berlaku agar target tahun Renstra 2024 dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.18. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	63,18	68,75	79,21	80,75
	Capaian	88,99	95,49	113,16	103,53



Grafik 3.1.7. Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah dibanding 3 (tiga) Balai pembanding lainnya (BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Jakarta). Capaian BBPOM di Pontianak untuk Indikator Kinerja ini **Cukup**. Capaian tertinggi untuk indikator ini yaitu BBPOM di Pekanbaru (113,16%) dengan kategori Sangat Baik, diikuti oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Samarinda dan terakhir BBPOM di Pontianak.

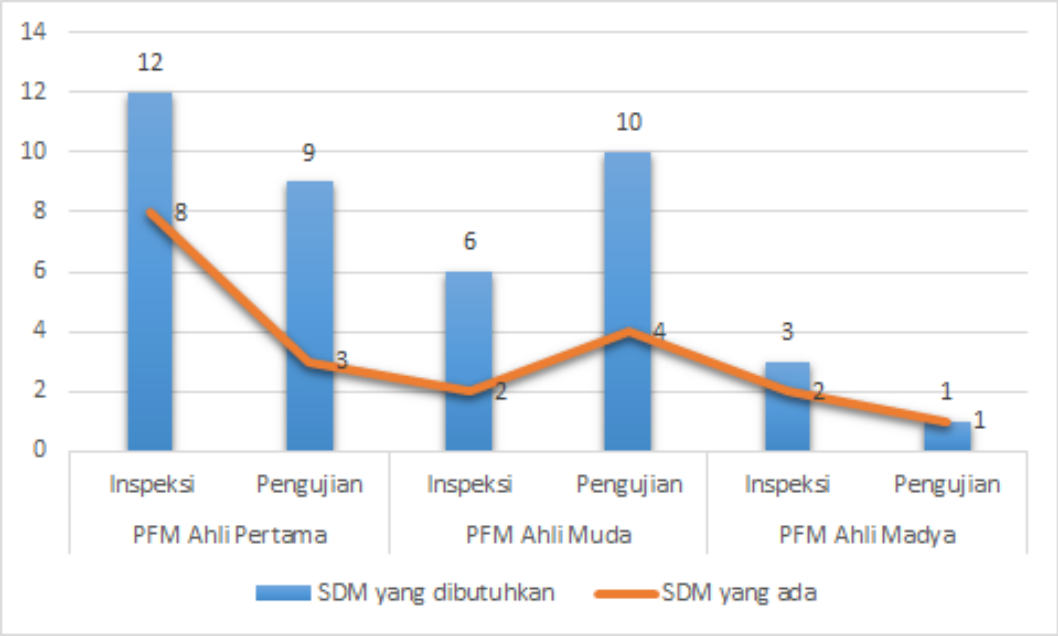
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak pada tahun 2020 mendapat kategori Cukup. Realisasi makanan yang aman dan bermutu di bawah target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Pontianak masih banyak yang belum memenuhi syarat. Hal ini terjadi karena:

a. Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap makanan yang aman dan bermutu.
b. Sanksi terhadap pelanggaran kurang memberikan efek jera.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berada di Subkelompok Subtansi Inspeksi dan Kelompok Subtansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 41 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 20 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada dengan rincian seperti pada grafik 3.1.8.



Grafik 3.1.8. SDM pada Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Infokom dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar sehingga target tercapai. Efisiensi

pemanfaatan SDM ini terutama didukung oleh kompetensi SDM yang memadai. Perihal Penggunaan sumber daya anggaran untuk indikator Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan sebesar 0,9 kategori Kurang Efisien (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Pontianak pada tahun 2020 antara lain:

a. Sanksi hukum yang diberikan belum memberikan efek jera.
b. Program pendampingan yang dilakukan pada tahun 2020 belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha.
c. Koordinasi dalam rangka pengawasan dengan lintas sektor belum mendapatkan *feedback* yang diharapkan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Sebagai contoh pada akhir Triwulan III tahun 2020, telah dilakukan evaluasi terhadap capaian dan diperoleh hasil 65,19% sementara di akhir tahun 2020 capaiannya 63,18% dengan capaian 88,99% dengan kriteria **Cukup.**

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

(1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.

(2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

(3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.19. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	70,00	80,54	115,05	Sangat Baik

Perbandingan realisasi terhadap target Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi (80,54) dari target (70) dengan persentase capaian 115,05%. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.20. Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness* Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	2019	66	67,08	101,64	Sangat Baik
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja UPT	2020	70	80,54	115,05	Sangat Baik

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Definisi Operasional tahun 2019 untuk indikator ini adalah sama dengan tahun 2020 dimana indeks kesadaran masyarakat mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada tahun 2020 indeks kesadaran masyarakat meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.21. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	70,00	80,54	82,00

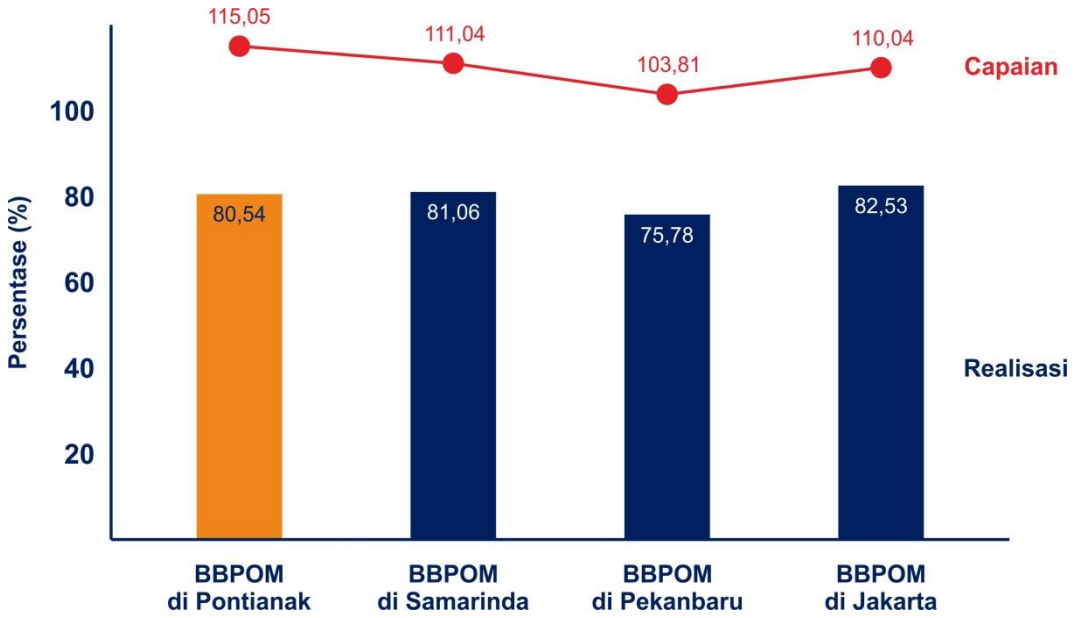
Realisasi Indikator Kinerja Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2020 mencapai 80,54, hal ini melampaui target 70. Capaian Tahun 2020 sebesar 98,21 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.22. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Realisasi	80,54	81,06	75,78	82,53
	Capaian	115,05	111,04	103,81	110,04

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak dengan kriteria **Sangat Baik,** capaian ini paling tinggi dibandingkan Balai pembanding lainnya. Capaian tertinggi kedua BBPOM di Samarinda diikuti BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Jakarta.



Grafik 3.1.9. Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Pontianak antara lain sebagai berikut:

a. Sosialisasi kepada masyarakat yang lebih intens dan bervariasi. Sosialisasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penyuluhan secara *offline* dan *online*, bimbingan teknis dan pameran. Variasi metode sosialisasi ini berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar.

b. Media informasi yang lebih beragam. Media informasi yang digunakan saat ini lebih beragam antara lain brosur, koran, poster, leaflet, videotron, spanduk, radio dan media sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang benar terkait Obat dan Makanan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu yang dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 9 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 9 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,16 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di BBPOM di Pontianak antara lain:

a. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang kreatif dan interaktif yang menyasar komunitas dan segmen tertentu.
b. Kemanfaatan media sosial yang intensif.
c. KIE bersama Tokoh Masyarakat dengan audiens yang lebih banyak dan paket informasi yang variatif.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas BBPOM di Pontianak tahun 2019, telah dilakukan upaya peningkatan capaian indikator

kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu antara lain dengan tetap intensif melakukan KIE di masa pandemi secara daring maupun luring.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan Pelaku Usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

1. Aspek bimbingan dan pembinaan;
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan;
3. Aspek penanganan saran dan masukan;
4. Aspek manfaat;
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan;
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.23. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	92,19	107,2	Baik

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Baik** yakni sebesar 107,20%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2020 sesuai Renstra 2020-2024, sehingga tidak ada Indikator di tahun 2019 yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.24. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

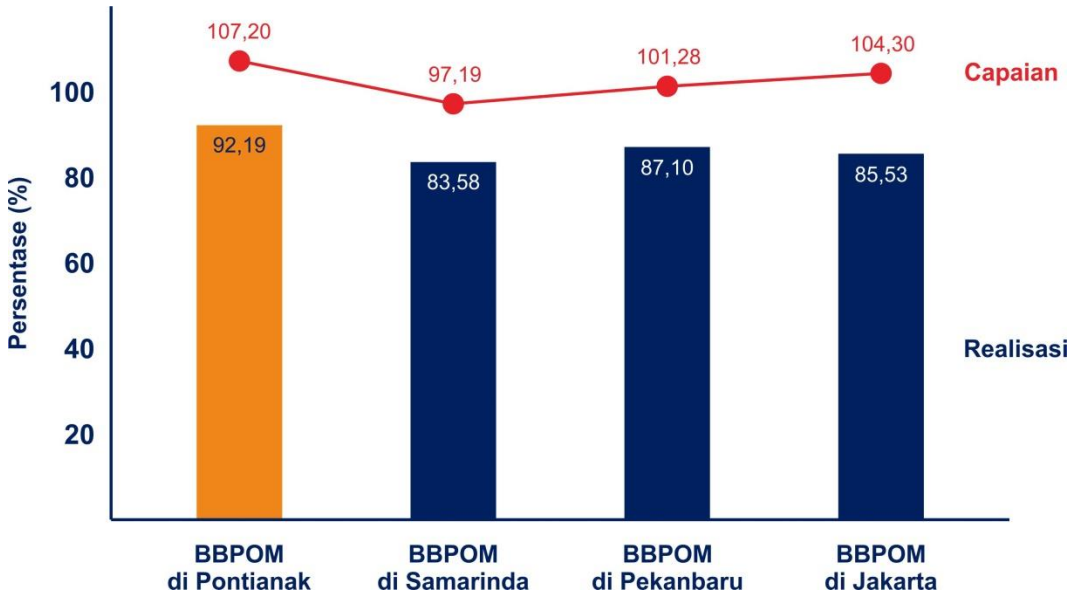
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,00	92,19	92,00

Realisasi Indikator Kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 telah mencapai 92,19. Hal ini melampaui target di tahun 2020. Capaian Tahun 2020 sebesar 100,20% dari target 92,00% pada akhir tahun Renstra 2020-2024 Program dan kegiatan tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi sesuai renstra. Namun, apabila capaian tahun 2021 juga melampaui target yang ditetapkan, maka akan dilakukan riviu target tahun 2022 hingga 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.25. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	92,19	83,58	87,10	85,53
	Capaian	107,2	97,19	101,28	104,30



Grafik 3.1.10. Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dan 3 Balai pembanding lainnya untuk Indikator Kinerja ini termasuk dalam kriteria **Baik**. Capaian Balai Besar POM di Pontianak berada pada peringkat **tertinggi**, diikuti BBPOM di Jakarta, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Samarinda pada urutan terakhir.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

a. Bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
b. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal seperti berbagai *platform* media sosial, aplikasi SIPERKASA, aplikasi Si Nyai Lagak, aplikasi *TRACKING*, dan *subsite* BBPOM di Pontianak.
c. Dukungan Badan POM secara penuh terhadap peningkatan pertumbuhan pelaku usaha baru dengan kebijakan potongan biaya PNBP (pendaftaran) untuk UMKM sebesar 50%.
d. Pelayanan informasi dan pengaduan yang responsif, informatif, dan solutif.
e. Petugas yang kompeten dan berintegritas.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom dan Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 30

orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 21 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan yang sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak sebesar 1,09 **(Efisien)**, Hal ini didukung antara lain dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Pontianak antara lain:

a. Pembinaan langsung kepada pelaku usaha.
b. Sosialisasi, workshop atau pelatihan, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, *Focus Group Discussion* (FGD), penyuluhan.
c. *Desk* CAPA (*Corrective Action & Preventive Action*).
d. Kegiatan konsultasi kepada pelaku usaha.
e. Layanan pengujian sampel pihak ketiga yang selalu sesuai SLA (*Service Level Agreement*).

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu secara konsisten dan intensif membangun komunikasi

dengan para pelaku usaha dan melaksanakan program pembinaan serta pendampingan hingga akhir tahun anggaran 2020.

SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PRKOM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance,* dan *emphaty*. Untuk mengukur kelima indikator tersebut ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1) Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BBPOM di Pontianak melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosia (*tangibles*).
2) Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BBPOM di Pontianak dalam melakukan pengawasan (*reliability)*, tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*), dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Tabel 3.1.26. Skala Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Skor	Kategori
1.	≤ 45,00	Tidak Puas
2.	45,01 – 60,00	Kurang Puas
3.	60.01 – 75,00	Cukup Puas
4.	75.01 – 90,00	Puas
5.	≥ 90,01	Sangat Puas

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 adalah 65,76 dari target 69,00 dengan capaian 95,30%. Kriteria Kepuasan Masyarakat masuk dalam kategori Cukup Puas, sementara dari sisi capaian terhadap target masuk dalam kategori Baik.

Tabel 3.1.27. Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69,00	65,76	95,30	Baik

Capaian Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Baik** yaitu sebesar 95,30%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan baru menjadi Indikator Kinerja BBPOM di Pontianak tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, indeks kepuasan masyarakat ini belum menjadi Indikator Kinerja BBPOM di Pontianak, capaian tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.28. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

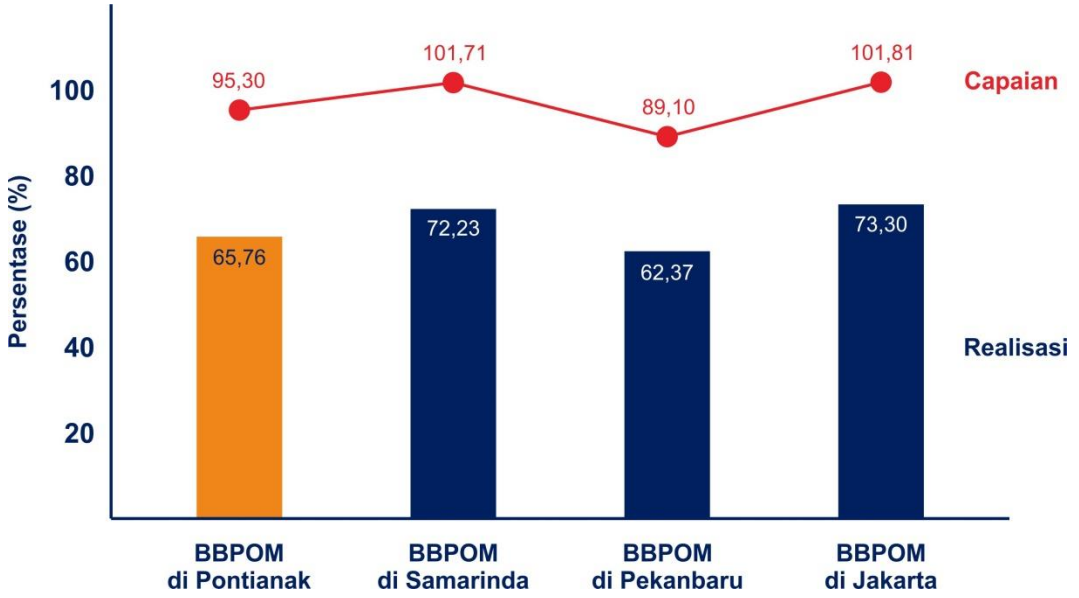
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	69,00	65,76	81,00

Realisasi Indikator Kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 mencapai 65,76. Hal ini tidak mencapai target tahun 2020. Capaian Tahun 2020 sebesar 81,18% dari target akhir tahun. Jika dibandingkan dengan target realisasi pada akhir tahun Renstra sebesar 81,00 terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. BBPOM di Pontianak akan meningkatkan kinerja dan efektivitas untuk mencapai target Renstra 2024 dengan meningkatkan kualitas KIE, dan pengawasan Obat dan Makanan.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.29. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	65,76	73,23	62,37	73,3
	Capaian	95,30	101,71	89,10	101,81



Grafik 3.1.11. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak kriteria **Baik**. Capaian tertinggi ditempati oleh BBPOM di Jakarta, disusul BBPOM di Samarinda, kemudian BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Pekanbaru.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak pada tahun 2020 mencapai kategori Baik dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan BBPOM di Pontianak cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Dari sisi hasil survey, nilai realisasi indeks kepuasan masyarakat 65,76 menunjukkan pada kategori cukup puas. Hal ini menunjukkan masyarakat cukup puas dengan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak pada tahun 2020. Masyarakat adalah konsumen

obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan komoditi yang diawasi oleh BBPOM di Pontianak. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Pontianak dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab capaian indeks kepuasan masyarakat.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari target yang sudah ditetapkan antara lain:

a. Informasi yang benar tentang Obat dan Makanan mudah diakses oleh masyarakat.
b. Pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan direspon dan diberikan solusi oleh petugas.
c. Pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian dan pemeriksaan secara intensif menjelang perayaan hari raya.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom dan Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 30 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 21 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Dengan kondisi kesenjangan SDM yang cukup besar BBPOM di Pontianak melakukan upaya yang sangat besar sehingga target tercapai. Efisiensi pemanfaatan SDM ini terutama didukung oleh kompetensi SDM yang memadai.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan

Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak sebesar 0,97 (Kurang Efisien), Hal ini terjadi karena relisasi BBPOM di Pontianak belum melampaui target yang ditentukan. Hal ini dapat diupayakan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Pontianak antara lain:

a. Penyebaran informasi secara intensif melalui berbagai platform media sosial.
b. KIE secara berkala melalui radio dan televisi dengan topik yang *up to date*.
c. KIE bersama Tokoh Masyarakat serta membagikan media informasi yang variatif dan menarik.
d. Pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.
e. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Pemanfaatan aplikasi Sistem Penyebaran Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen (Si Nyai Lagak).

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu secara konsisten dan intensif melakukan kegiatan KIE

dengan berbagai media dan metode, serta melakukan pengawasan secara rutin dan intensifikasi pada menjelang hari raya.

SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,83	109,12	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak, bahwa realisasi (3,83) berada di atas target (3,51), dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 109,12%. Sehingga capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator indeks Pelayanan Publik merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2020 sesuai Renstra 2020-2024, sehingga tidak ada Indikator di tahun 2019 yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.31. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

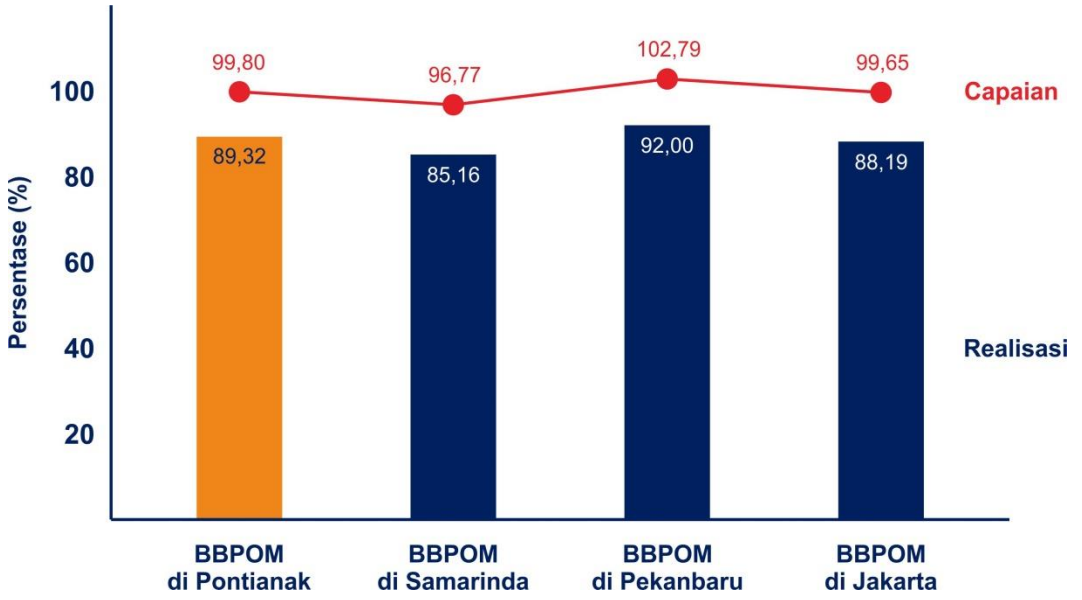
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,83	4,51

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 mencapai 3,83 dari target 3,51. Capaian Tahun 2020 sebesar 84,92% dari target 4,51 di akhir tahun Renstra 2020-2024. BBPOM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.32. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Realisasi	89,32	85,16	92,00	88,19
	Capaian	99,80	96,77	102,79	99,65



Grafik 3.1.12. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan Grafik diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak kriteria **Baik** dan berada

pada urutan keempat setelah BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Jakarta.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian **Indeks Pelayanan Publik** di BBPOM di Pontianak antara lain:

a. Petugas pelayanan publik yang kompeten, profesional, berintegritas, dan selalu responsif serta memberikan solusi.
b. Alur pelayanan yang jelas dan timeline yang pasti.
c. Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai PNBP.
d. Fasilitas yang memadai.
e. Sikap petugas yang proaktif dalam memberikan pelayanan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang dilaksanakan berada di Kelompok Substansi Infokom dan Subkelompok Substansi Sertifikasi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 11 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 11 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak sebesar 1,02 yang termasuk kriteria Efisien (Tabel 3.2.2), hal ini menunjukkan capaian Indikator Kinerja ini seiring dengan realisasi penggunaan anggaran, dan didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam **Indeks Pelayanan Publik** di BBPOM di Pontianak antara lain:

a. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.
b. Perbaikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
c. Pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur.
d. Percepatan *timeline* pelayanan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian termasuk kendala/hambatan dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) serta monitoring RATL pada RAPK. Adapun tindak lanjut yang dilakukan yaitu secara konsisten meningkatkan kompetensi petugas, melakukan perbaikan pelayanan, melakukan perbaikan sarana prasarana, dan tetap melakukan pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

SK.4.IKSK.1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan atau rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.33. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46,00	87,67	190,59	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 sebesar 87,67% dari target 46,00%, dengan capaian 190,59% **(Tidak dapat disimpulkan).**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan dilakukan pertama kali pada tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.34. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 dengan Target 2024

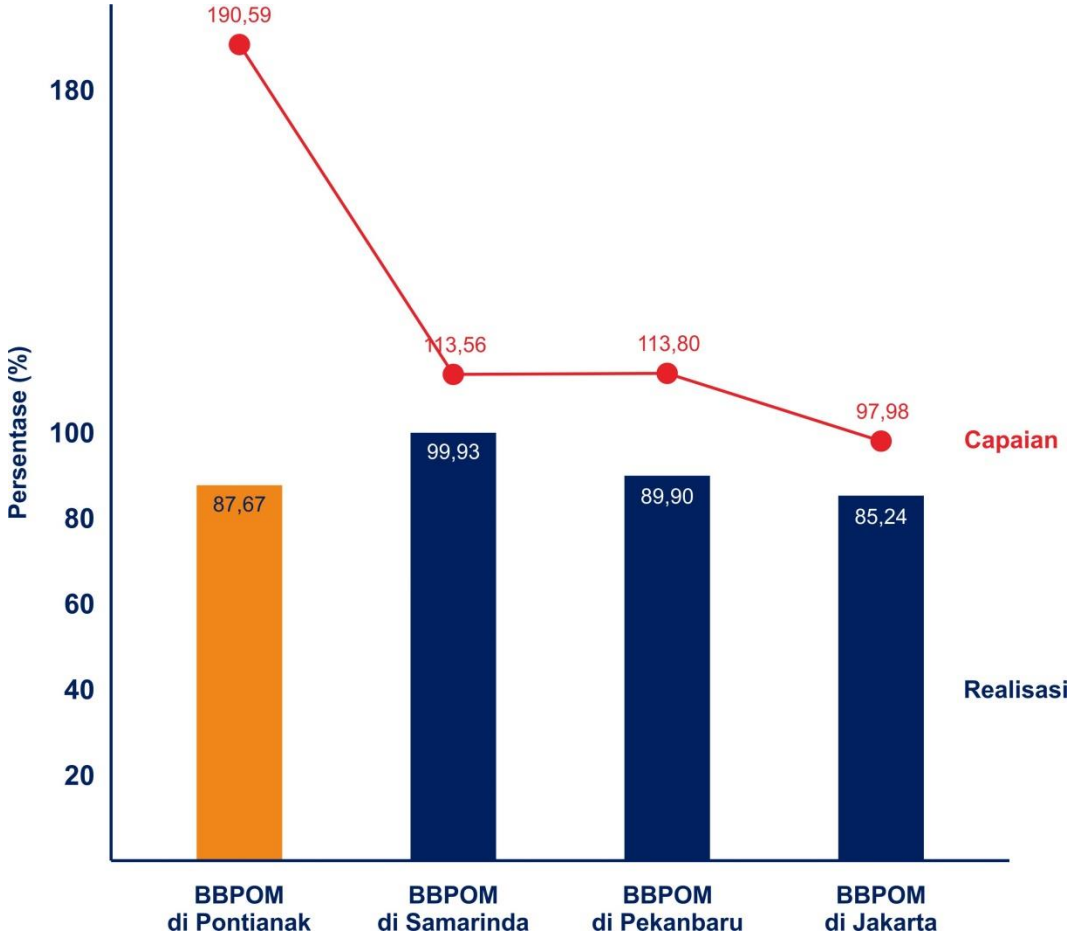
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46,00	87,67	47,00

Realisasi Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2020 mencapai 87,67%. Realisasi ini sebesar 186,53% dari target akhir Renstra tahun 2024. Capaian tersebut telah melampaui target akhir Renstra sehingga perlu dilakukan riviu target.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.35. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi	87,67	99,93	89,90	85,24
	Capaian	190,59	113,56	113,80	97,98



Grafik 3.1.13. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak paling tinggi dibandingkan dengan 3 Balai Pembanding lainnya, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, selanjutnya BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Jakarta.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan merealisasikan target Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan didukung antara lain:

a. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah

b. Respon positif dari pelaku usaha menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan melalui program *Desk CAPA*
c. Pemanfaatan *Google Drive* dalam penyampaian *CAPA* sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha yang selalu direspon cepat oleh petugas.
d. Petugas yang kompeten dalam memberikan solusi kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan *CAPA*.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 21 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 12 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan sebesar 1,99 **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi pada tahun 2020 didukung oleh program/kegiatan antara lain:

a. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
b. Respon cepat menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM
c. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai media penyampaian CAPA merupakan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan
d. Program *Desk CAPA* untuk memberikan penyelesaian terhadap tindakan perbaikan sarana. Program tersebut sebagai bentuk pendampingan langsung dan keterbukaan komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dan petugas.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan perbaikan kinerja terhadap Persentase tindak lanjut hasil pengawasan sebagai tindak lanjut rekomendasi sebelumnya antara lain sosisalisasi terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dan kegiatan bimbingan teknis dan desk tindakan perbaikan dan pencegahan terutama kepada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

(1) Pelaku usaha;

(2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.36. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,70	31,70	110,45	Sangat Baik

Capaian Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** yaitu sebesar 110,45%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.37. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Rasio tindak lanjut pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	46,95	19,63	41,81	Sangat Kurang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	28,7	31,7	110,45	Sangat Baik

Pada tahun 2019, indikator rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak dengan target 46,95% dan realisasi sebesar 19,63% dengan capaian sebesar 41,80% **(Sangat Kurang)**. Sedangkan pada Tahun 2020, yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024, terjadi perubahan indikator penilaian menjadi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 28,70% dan realisasi sebesar 31,70% dengan capaian sebesar 110,45% **(Sangat Baik)**. Dengan perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta definisi operasionalnya yang berbeda, maka realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan walaupun terjadi beberapa persamaan terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.38. Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

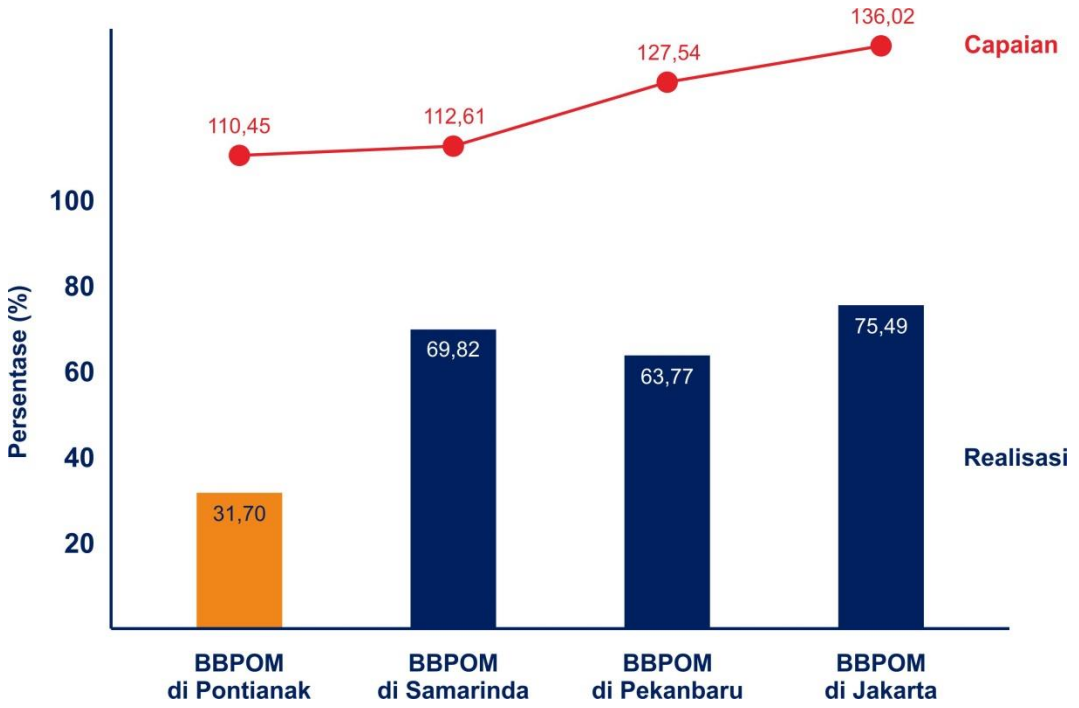
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	28,70	31,70	65.00

Realisasi Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2020 mencapai 31,70%. Realisasi ini bila dibandingkan dengan target tahun 2024 mencapai 48,77% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Perlu upaya yang intensif untuk meningkatkan realisasi, serta monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.39. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi	31,70	69,82	63,77	75,49
	Capaian	110,45	112,61	127,54	136,02



Grafik 3.1.14. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Samarinda bernilai Sangat Baik. Sedangkan Balai Besar POM di Pekanbaru dan Balai Besar POM di Jakarta bernilai Sangat Baik.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan didukung oleh:

a. Respon positif dari pelaku usaha menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan melalui program *Desk CAPA*.
b. Pemanfaatan *Google Drive* dalam penyampaian *CAPA* sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha yang selalu direspon cepat oleh petugas.

c. Petugas yang kompeten dalam memberikan solusi kepada pelaku usaha dalam menyelesaikan *CAPA.*
d. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 21 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 12 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan yang sumber daya manusia yang sudah ada. Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target Indikator Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan sebesar 1,13 **(Efisien)**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan didukung oleh program/kegiatan antara lain:

a. Pemanfaatan *Google Drive* sebagai media penyampaian CAPA merupakan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Program *Desk CAPA* untuk memberikan penyelesaian terhadap tindakan perbaikan sarana. Program tersebut sebagai bentuk pendampingan langsung dan keterbukaan komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha dan petugas.
c. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan perbaikan kinerja terhadap Persentase tindak lanjut hasil pengawasan sebagai tindak lanjut rekomendasi sebelumnya antara lain sosisalisasi terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dan kegiatan bimbingan teknis dan desk tindakan perbaikan dan pencegahan terutama kepada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam Indikator Kinerja ini meliputi:

a. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk.
c. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
d. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar.
e. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi *CAPA* dalam rangka sertifikasi CDOB.
f. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

g. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
h. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikat yang Diselesaikan Tepat Waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikat}}{\text{Jumlah permohonan penilaian}} \times 100\%$$

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.40. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	99,38	116,92	Sangat Baik

Capaian Indikator Kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** yaitu sebesar 116,92%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.41. Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	85	100,00	117,65	Sangat Baik
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	99,38	116,92	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,62%. Namun demikian capaian dalam Indikator Kinerja ini masih berada dalam kriteria **Sangat Baik**.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.42. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 dengan Tahun 2024

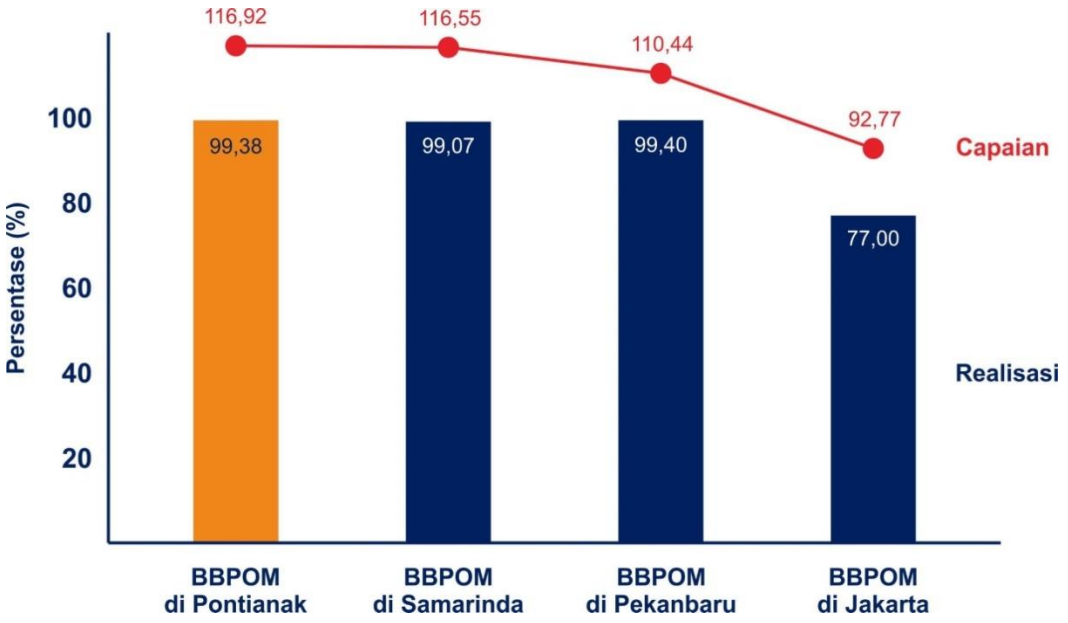
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	99,38	90,00

Realisasi Indikator Kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 mencapai 99,38%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka realisasi tahun 2020 pada indikator ini sebesar 110,42% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024. Realisasi tahun 2020 melampaui target akhir renstra sehingga perlu dilakukan riviu target.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.43. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	99,38	99,07	99,38	77,00
	Capaian	116,92	116,55	99,40	92,77



Grafik 3.1.15. Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak kriteria **Sangat Baik** dengan capaian paling tinggi, diikuti BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru, dan selanjutnya BBPOM di Jakarta.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan/peningkatan kinerja dari target Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu didukung antara lain:

a. Tingkat pemahaman pelaku usaha semakin baik sebagai hasil bimbingan teknis yang diberikan oleh BBPOM di Pontianak terkait pendaftaran produk semakin baik.
b. Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran produk.
c. Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-registration* yang mudah diakses.
d. Alur pelayanan yang jelas dan kepastian biaya, serta timeline yang pasti.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu berada di Subkelompok Substansi Sertifikasi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang dan sumber daya manusia yang ada sebanyak 2 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar

1,19 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM Pontianak yaitu:

a. Pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
b. Bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
c. Komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas BBPOM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
d. Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) dalam rangka sertifikasi secara *online.*
e. Sosialisasi yang masif tentang pelayanan publik di berbagai media.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan rekomendasi hasil evaluasi capaian sebelumnya berupa kegiatan pelayanan prima, bimbingan teknis *e-registrastion* UMKM pangan, dan *desk CAPA* sehingga telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keputusan penilaian sertifikasi diselesaikan tepat waktu.

SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.44. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	20,00	26,56	132,81	Tidak dapat disimpulkan

Capaian Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** yaitu sebesar 132,81%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.45. Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	49,8	9,33	18,73	Sangat Kurang
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	20	26,56	132,80	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sebesar 26,56%, terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2019 (9,33%). Capaian Indikator Kinerja ini untuk tahun 2020 yaitu 132,80% **(Tidak Dapat Disimpulkan).**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.46. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2024

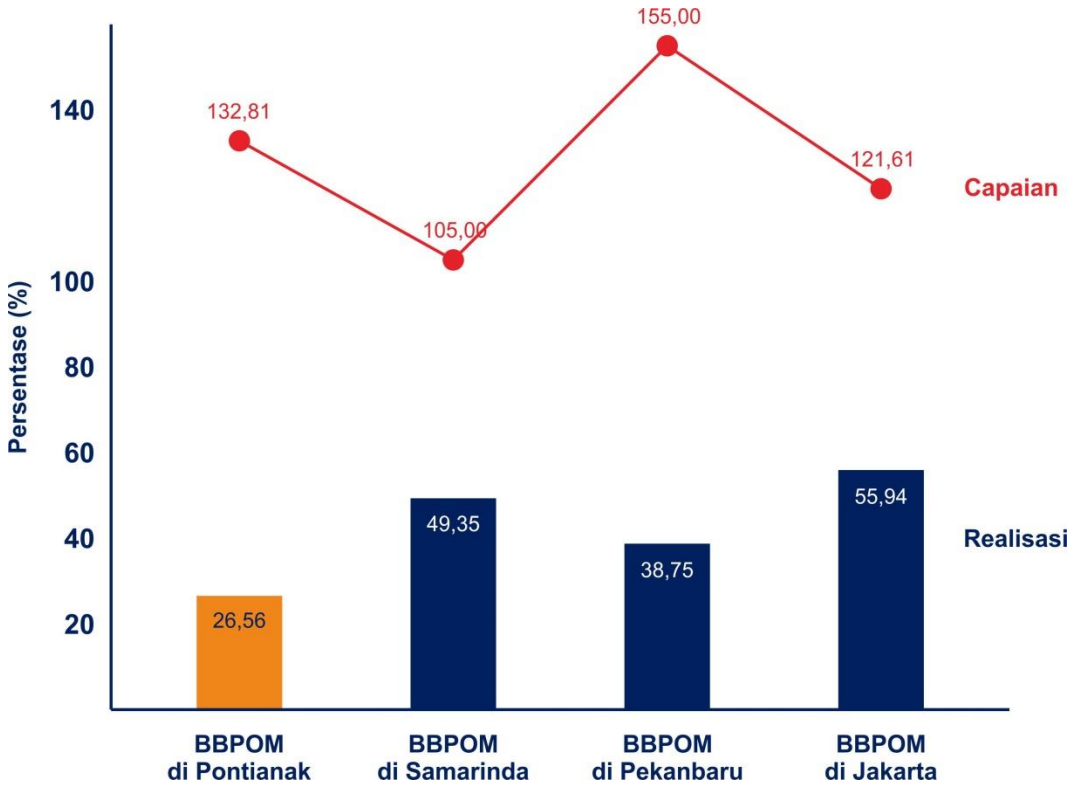
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	20,00	26,56	24,00

Realisasi Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020 mencapai 26,56%. Sedangkan target akhir Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 24,00%. Capaian tersebut melampaui target akhir Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi target.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.47. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	26,56	49,35	38,75	55,94
	Capaian	132,81	105,00	155,00	121,61



Grafik 3.1.16. Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak bersama BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Jakarta dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan,** sedangkan BBPOM di Samarinda bernilai **Baik**.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan didukung oleh:

a. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha karena Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang efektif.
b. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang menjangkau semua level pelaku usaha.

c. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 21 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 12 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 1,34 yang termasuk kategori **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di BBPOM di Pontianak yaitu:

a. Pelaksanaan KIE yang efektif dan efisien sehingga kesadaran pelaku usaha meningkat.
b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada semua level pelaku usaha Obat dan Makanan.
c. Program pendampingan dan komunikasi intensif untuk memberikan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemeriksaan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Lapkin interim TW III, yaitu pelaksanaan pengawasan pada semua daerah yang bisa dijangkau dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.48. Perbandingan dan Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Pontianak

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	78,01	141,83	Tidak dapat disimpulkan

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** yaitu sebesar 141,83%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.49. Perbandingan Pencapaian Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Pontianak	2019	46	48,86	106,22	Baik
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55	78,01	141,84	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2020 sebesar 78,01%, terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2019 (29,15%). Capaian Indikator Kinerja ini untuk tahun 2020 yaitu 141,84% **(Tidak Dapat Disimpulkan).**

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.50. Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 dengan Tahun 2024

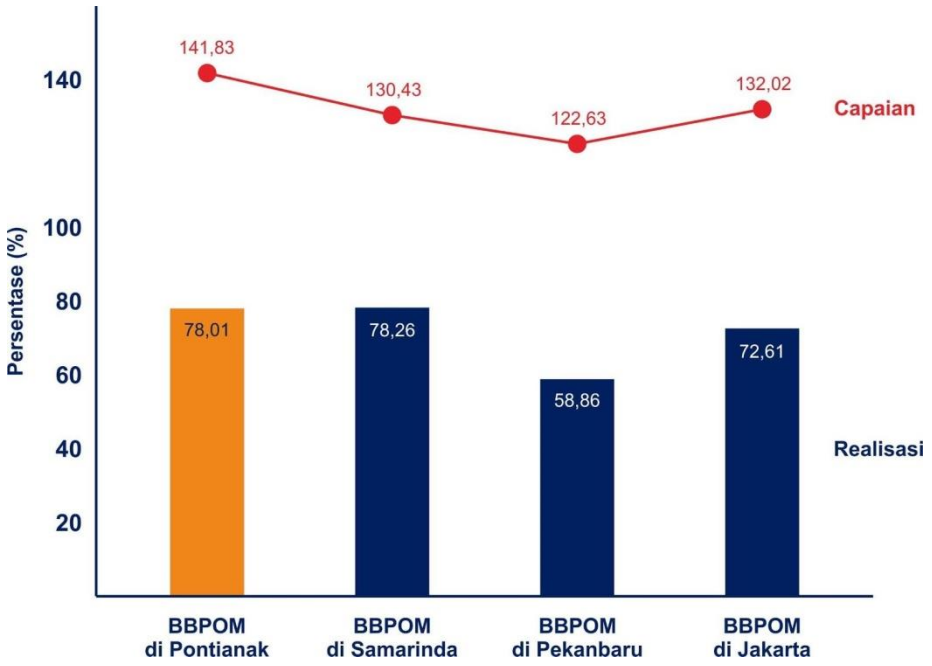
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	78,01	65,00

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2020 mencapai 78,01%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka realisasi Indikator Kinerja ini tahun 2020 sebesar 120,01% dari target akhir Renstra 2020-2024. Realisasi indikator ini melampaui target akhir renstra sehingga perlu dilakukan reviu target.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.51. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	78,01	49,35	38,75	55,94
	Capaian	141,83	130,43	122,63	132,02



Grafik 3.1.17. Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Pontianak bersama BBPOM di BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Samarinda dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan,** sedangkan BBPOM di Pekanbaru bernilai **Baik**.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada akhir tahun 2019 Definisi Operasional terkait tindak lanjut Pemeriksaan berupa sanksi "Peringatan" yang sebelumnya termasuk kategori Tidak Memenuhi Ketentuan mengalami perubahan menjadi Memenuhi Ketentuan. Penetapan target sebesar 55,00% pada tahun 2020 didasarkan dengan data capaian sebelumnya dan Definisi Operasional bahwa hasil Pemeriksaan kategori "Peringatan" berarti "Tidak Memenuhi Ketentuan".

Faktor pendukung untuk pencapaian Indikator Kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha didorong oleh pengawasan secara berkelanjutan.
b. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Profesionalisme, Kompetensi dan integritas petugas yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan.
d. Informasi tentang Obat dan Makanan termasuk regulasi yang mudah diakses melalui berbagai media.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Subkelompok Substansi Inspeksi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang

dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 21 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 12 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Adanya kesenjangan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan sumber daya manusia yang ada telah dilakukan upaya maksimal memberdayakan seluruh sumber daya manusia untuk dapat mencapai target Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 1,44 termasuk kategori **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di BBPOM Pontianak yaitu:

a. Pengawasan secara berkelanjutan dan pemberian sanksi secara konsisten.
b. Pembinaan langsung oleh petugas pada saat pengawasan
c. Penyebaran informasi melalui berbagai media terkait regulasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
d. Sosialisasi tentang peraturan di bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dan *stakeholder*.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Lapkin *interim* TW III, yaitu mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada semua

daerah yang bisa dijangkau dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.52. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	3,83	109,12	Baik

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak adalah 3,83 terhadap target 3,51 dengan persentase capaian sebesar 109,12%. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria "**Baik**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator baru pada Renstra Badan POM dan tidak terdapat indikator sejenis pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator pelayanan publik tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.53. Perbandingan Persentase Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 dengan Tahun 2024

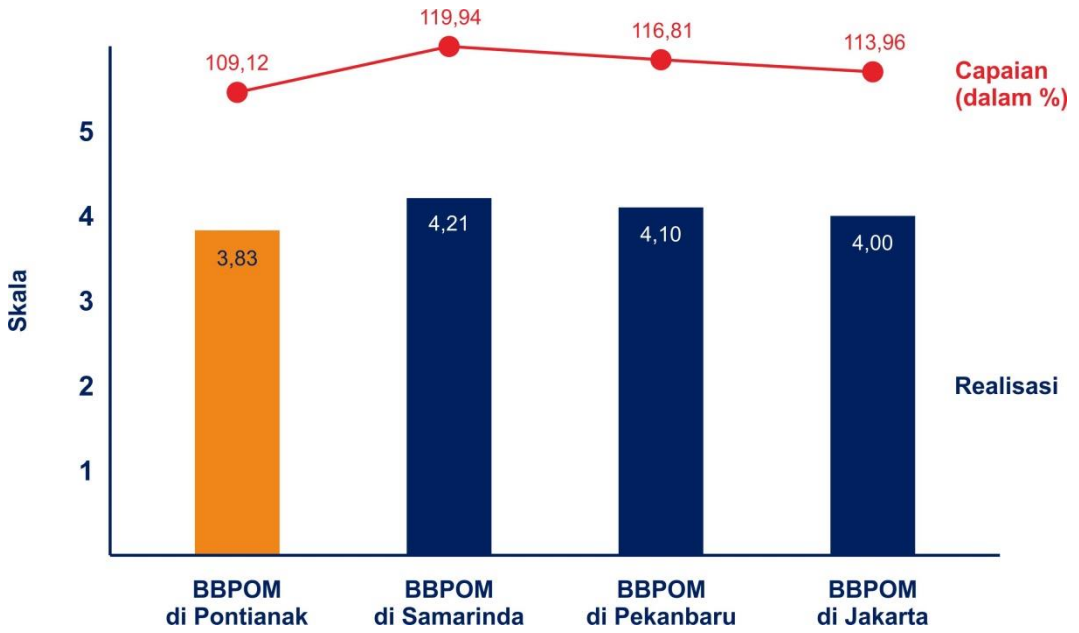
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,83	4,51

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 mencapai 3,83, hal ini melebihi target 3,51. Capaian tahun 2020 sebesar 84,92% dari target 4,51 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.54. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	Realisasi	3,83	4,21	4,10	4,00
	Capaian	109,12	119,94	116,81	113,96



Grafik 3.1.18. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria

Baik sedangkan tiga Balai pembanding lainnya termasuk kriteria **Sangat Baik.**

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam indeks pelayanan publik di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh dari sikap petugas pada saat melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat. Dengan demikian semakin banyaknya petugas yang mendapat pelatihan pelayanan publik membuat petugas makin kompeten didalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
b. Empati untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat.Sifat empati dan peduli petugas ULPK yang semakin meningkat membuat masyarakat bebas menginformasikan keluhan yang dirasakan tentang obat dan makanan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom, Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia Komoditi Obat, Subkelompok Substansi Sertifikasi dan Subkelompok Subtansi Umum . Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 26 orang sedangkan SDM yang ada sebanyak 18 orang sehingga terdapat kesenjangan SDM antara kebutuhan dengan yang ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indeks pelayanan publik sebesar 1,09 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam I**ndeks Pelayanan Publik** di BBPOM di Pontianak antara lain:

a. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan sikap pelayanan yang baik kepada petugas pelayanan publik.
b. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik.
c. Alur pelayanan yang jelas, timeline yang pasti dan biaya yang transparan.
d. Pelaksanaan pelayanan publik diluar jam kerja, termasuk pelayanan pengujian sampel NAPZA pihak ketiga pada hari libur.
e. Media komunikasi yang semakin beragam dengan menggunakan berbagai *platform*.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 terkait perbaikan fasilitas pelayanan publik. Terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan fasilitas dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain itu telah dilakukan pelatihan terhadap petugas pelayanan publik.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.55. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,66	88,85	102,52	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020 untuk Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak, bahwa realisasi (88,85%) berada di atas target (86,66%), dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 102,52%. Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.56. Profil pencapaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja UPT	2019	61	73	119,67	Sangat Baik
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	72	88,85	102,52	Baik

Berdasarkan definisi operasional, Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan merupakan indikator yang sama dengan Indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman. Namun pada pengukuran kinerja tahun 2020 indikator ini mengalami penurunan sebesar 17,15%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.57. Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,66	88,85	93,80

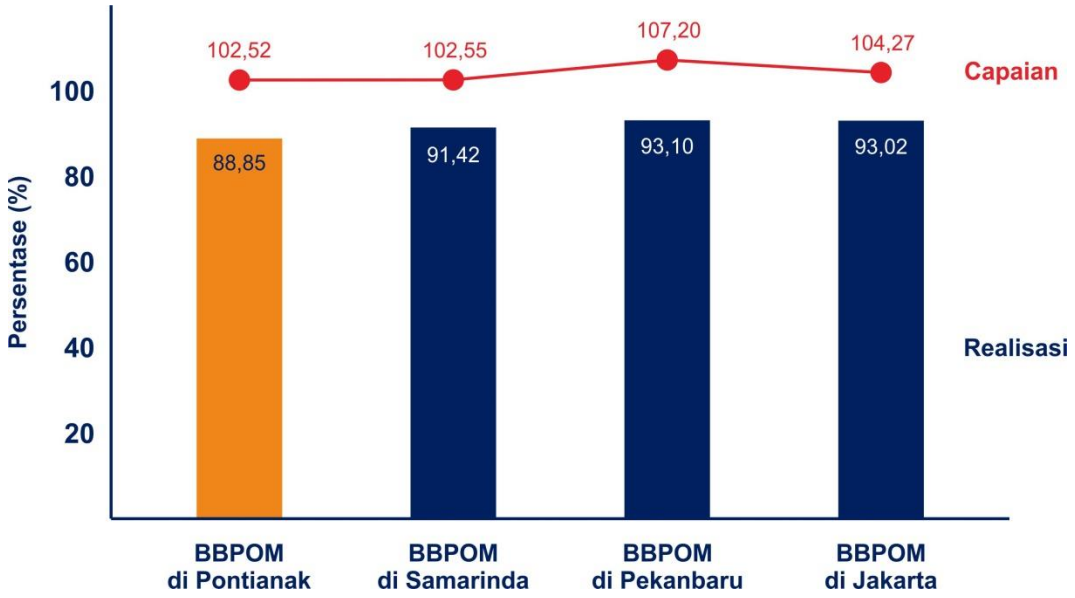
Realisasi Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020 mencapai 88,85, hal ini melampaui target yaitu 86,66. Capaian tahun 2020 sebesar 92,39% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.58. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Realisasi	88,85	91,42	93,10	93,02
	Capaian	102,52	102,55	107,20	104,27

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.19. Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak adalah penyampaian informasi

kepada berbagai elemen masyarakat, melalui berbagai media dan metoda antara lain:

a. Penyuluhan baik secara daring maupun luring.
b. Pameran pada Hari Besar Keagamaan.
c. Pemasangan spanduk pada titik-titik strategis.
d. Pemberitaan dalam bentuk artikel atau advertorial melalui media cetak (koran, brosur, leaflet, poster, baliho), media elektronik (radio dan televisi), dan videotron.
e. Penyebaran informasi melalui subsite BBPOM di Pontianak (www.pontianak.pom.go.id).
f. Penyebaran informasi melalui media sosial antara lain *twitter*, *facebook*, *instagram*, *youtube*.
g. *Talk Show* melalui radio.
h. Pemberian produk informasi kepada komunitas pasar, komunitas ojek online, komunitas mahasiswa dan sopir truk antar kota.
i. KIE dan pemberian produk informasi kepada masyarakat bersama Tokoh Masyarakat (anggota Komisi IX DPR RI).

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut:

a. Telah tersedia akses informasi yang memadai.
b. Petugas pemberi informasi yang kompeten, lugas dan kreatif.
c. Informasi yang disajikan *up to date* dan sesuai kebutuhan.
d. KIE yang menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor).
e. Tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap informasi Obat dan Makanan.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 9 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 9 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 1,11 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Lapkin interim TW III, yaitu melakukan KIE dengan pola baru, memperbanyak KIE secara daring, mengoptimalkan penyebaran informasi secara media sosial, pemasangan spanduk pada titik strategis, melakukan KIE kepada masyarakat secara daring dan luring.

SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.59. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	100,00	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak, realisasi mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Pontianak dilakukan pertama kali pada tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.60. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	104

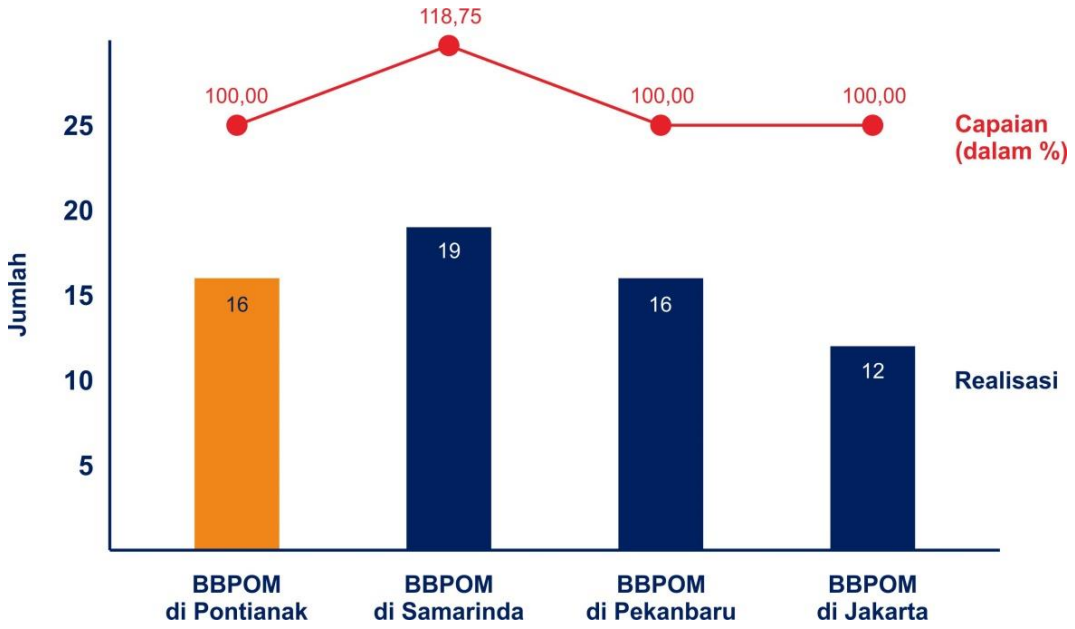
Di Tahun 2020, terjadi perubahan target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dikarenakan faktor pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada Renstra 2020-2024 dimana untuk tahun 2020 target yang semula 20 sekolah menjadi 16 sekolah. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 mencapai 16, hal ini sama dengan target, sehingga capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 15,38% dari target tahun 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 BBPOM di Pontianak Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.61. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Realisasi	16,00	19,00	16,00	12,00
	Capaian	100,00	118,75	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** ini sama dengan BAlai Besar POM di Pekanbaru dan Jakarta untuk Balai Besar POM di Samarinda bernilai kriteria **Sangat Baik**.



Grafik 3.1.20. Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman oleh BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap siswa dan guru dari 16 (enam belas) sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang sudah ditetapkan dalam program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
b. Pendampingan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pihak Sekolah);
b. Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah terutama kader melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 9 orang sedangkan SDM yang ada sebanyak 9 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebesar 1,08 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Lapkin Interim TW III berupa pengalihan anggaran kegiatan menjadi pengadaan paket edukasi dan pelaksanaan Bimbingan Teknis secara daring.

SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.62. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak, realisasi mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman dilakukan pertama kali pada tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Pembandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.63. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Jumlah desa pangan aman	4	4	32

Pada Tahun 2020, terjadi perubahan target jumlah desa pangan aman dikarenakan faktor pandemi Covid-19, yang semula 6 desa menjadi 4 desa. Realisasi Indikator Kinerja desa pangan aman tahun 2020 mencapai 4

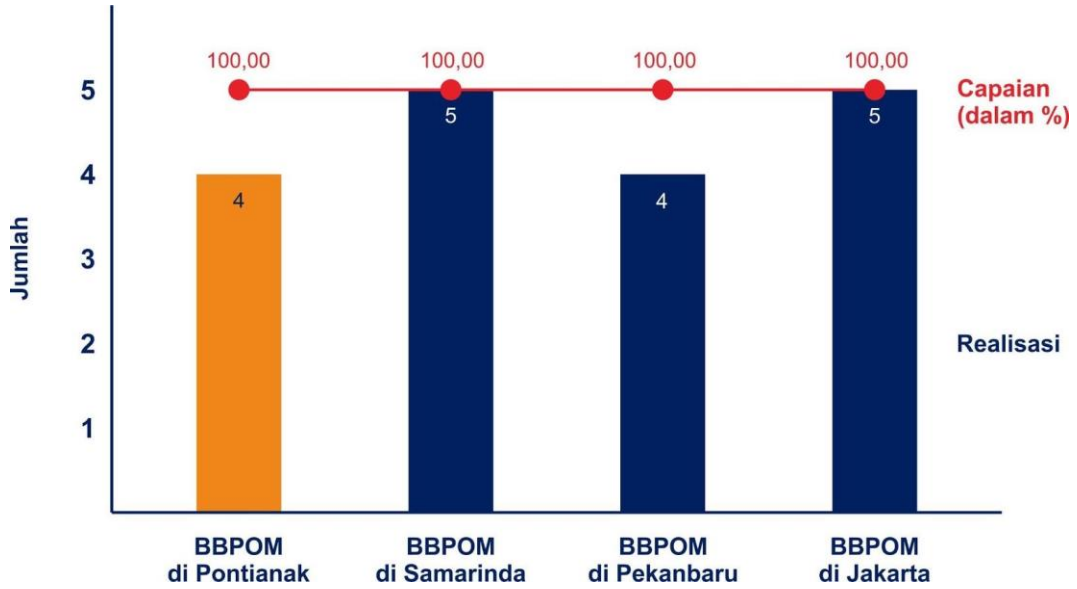
desa. Capaian tahun 2020 sebesar 12,50% dari target 32 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.64. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Jumlah desa pangan aman	Realisasi	4,00	5,00	4,00	5,00
	Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja. Jumlah desa pangan aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.21. Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik** sama dengan Balai pembanding lainnya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan jumlah Desa Pangan Aman oleh BBPOM di Pontianak adalah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 4 (empat) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa yang diintervensi menjadi desa pangan aman yang mandiri dimana desa tersebut mempunyai kader keamanan pangan yang aktif, mampu melaksanakan sosialisasi keamanan pangan pada komunitas desanya dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah desa pangan aman di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Pihak Desa).
b. Komitmen yang tinggi dari pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan jumlah desa pangan aman yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 9 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 9 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah desa pangan aman sebesar 1,00 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak tidak ada hasil rekomendasi akuntabilitas tahun 2019 dikarenakan Sasaran Indikator nya sudah berbeda. Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Lapkin *Interim* TW III berupa optimalisasi pelaksanaan beberapa program secara paralel yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.

SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.65. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100,00	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Pontianak, realisasi mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilakukan pertama kali pada tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.66. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2020 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	13

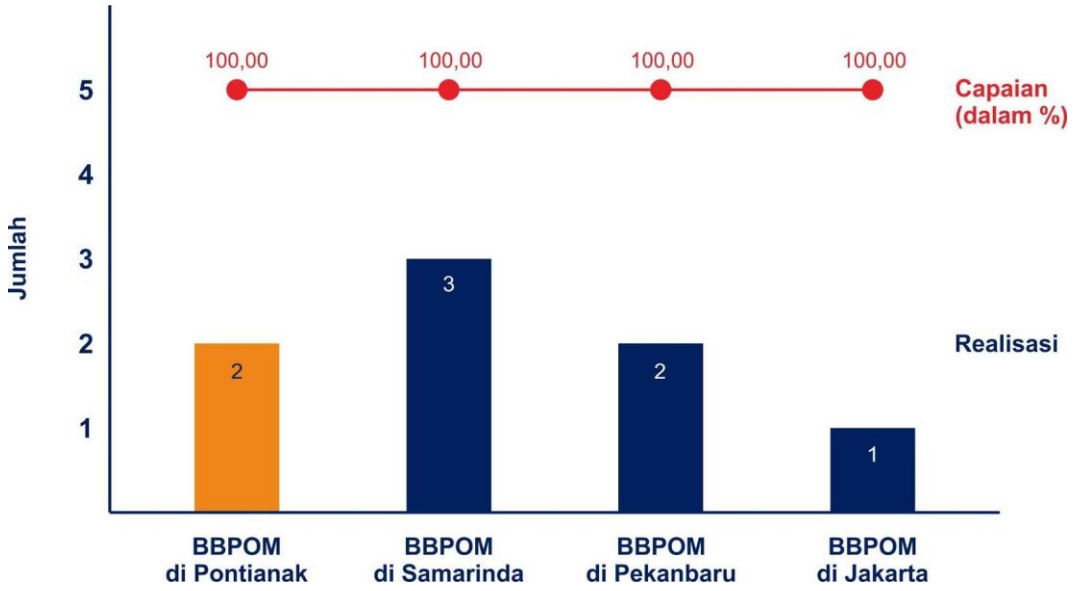
Di Tahun 2020, target Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Pontianak adalah 2. Realisasi Indikator Kinerja Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 mencapai 2 pasar. Capaian tahun 2020 sebesar 15,38% dari target 13 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.67. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Realisasi	2,00	3,00	2,00	1,00
	Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.22. Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya oleh BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Petugas pengawas pasar terhadap 2 (dua) pasar yang masuk dalam target intervensi program pasar aman dari bahan berbahaya.
b. Penyuluhan kepada pedagang pasar terhadap 2 (dua) pasar yang masuk dalam target intervensi program pasar aman dari bahan berbahaya.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan dalam peningkatan indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di BBPOM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar).
b. Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi pasar aman dari bahan berbahaya sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Infokom. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 9 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 9 orang sehingga tidak terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sebesar 1,03 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh BBPOM Pontianak tidak ada hasil rekomendasi akuntabilitas tahun 2019 dikarenakan sasaran indikatornya sudah berbeda. Telah dilakukan

tindak lanjut atas rekomendasi pada Lapkin *Interim* TW III berupa optimalisasi pelaksanaan beberapa program secara paralel yang dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu: Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud mencakup Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman *Sampling* dan Pengujian.

SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar. Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian

pemeriksaan dengan mengecek nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai parameter kritis wajib yang diatur dalam pedoman *sampling* dan pengujian yang sesuai dengan *timeline* berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.68. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.00	93,55	103,95	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, bahwa realisasi (93,55%) berada di atas target (90,00%), dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 103,95%. Sehingga capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.69. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	94	95,64	101,75
2020	90	93.55	103.95

Pada tahun 2019 Definisi Operasional untuk Indikator Kinerja ini adalah Persentase Sampel Obat yang Diuji Sesuai Standar. Standar yang

dimaksud adalah Parameter Uji Kritis Wajib sesuai Pedoman *Sampling*. Perhitungan dilakukan masing-masing terhadap setiap komoditi yaitu obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan. Dalam Definisi Operasional tahun 2019 hanya menghitung *output* dari proses pengujian saja, belum mencakup proses pemeriksaan. Selain itu *timeline* pemeriksaan dan pengujian belum dievaluasi pada tahun 2019. Sedangkan Definisi Operasional tahun 2020 untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diuji Sesuai Standar meliputi:

a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan.
b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
f. Terdapat relevansi Indikator Kinerja tahun 2019 dan 2020 namun terdapat beberapa perbedaan sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.70. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	93,55	94

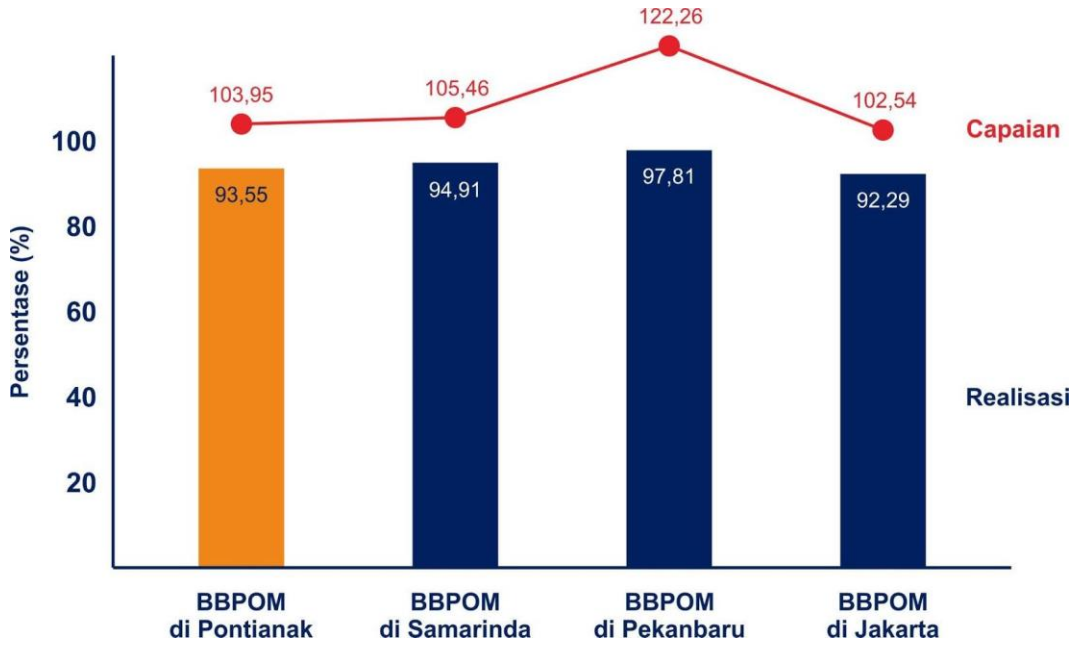
Realisasi Indikator Kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 adalah 93,55%. Capaian tahun 2020 sebesar 99,52% dari target 94 di akhir tahun Renstra 2020-2024. Dengan titik tolak pencapaian tahun 2020 diiringi dengan perbaikan kinerja dalam

pemenuhan *timeline* pemeriksaan dan pengujian diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.71. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinelrja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	93,55	94,91	97,81	92,29
	Capaian	103,95	105,46	122,26	102,54



Grafik 3.1.23. Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di

Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik** bersama dengan BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Samarinda. Sedangkan BBPOM di Pekanbaru termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

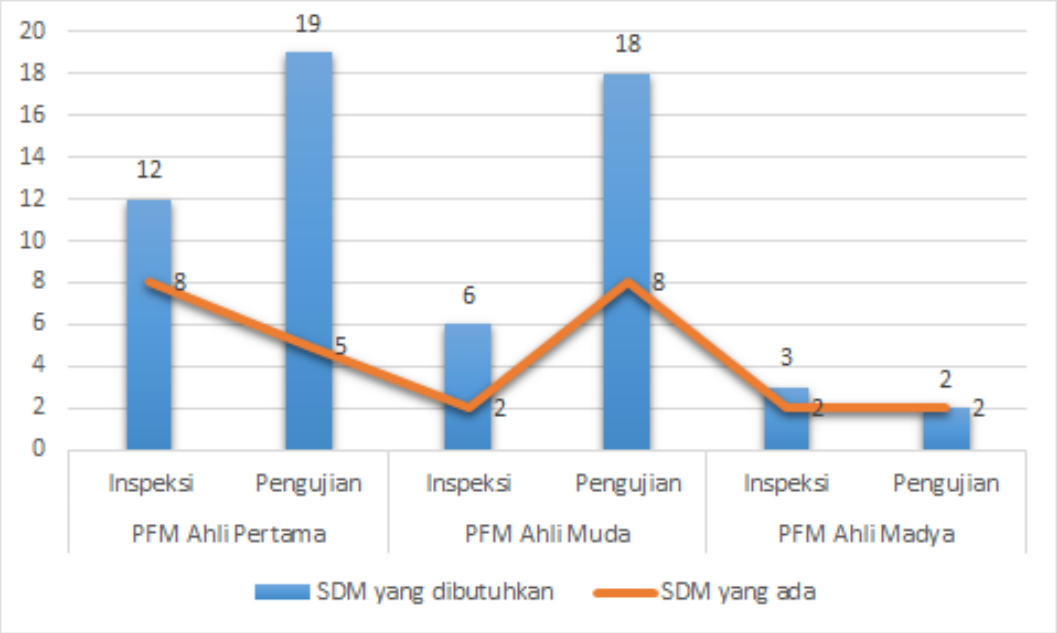
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2020 merupakan sumbangan *output* dari Indikator Kinerja pengujian dan pemeriksaan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

a. Sampling dilakukan sesuai pedoman.
b. Dukungan instansi Dinas Kesehatan terhadap sampling obat.
c. Ketersediaan alat laboratorium dengan teknologi canggih sehingga jumlah sampel dalam sekali pengujian menjadi lebih banyak.
d. Ketersediaan personel pemeriksaan dan pengujian dengan kompetensi yang memadai.
e. Ketersediaan *reagen* yang memenuhi syarat, sesuai kebutuhan dan tepat waktu juga sangat membantu kelancaran proses pengujian.
f. Akses informasi yang lebih mudah membantu personel pengujian dalam mengembangkan kompetensinya dalam melakukan pengujian menggunakan teknologi mutakhir.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terkait Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar adalah 60 orang. SDM yang ada saat ini adalah 27 orang dengan rincian seperti pada grafik 3.1.24.



Grafik 3.1.24. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebesar 1,04 kategori **Efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penggalangan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Pontianak yaitu:

a. Perencanaan *sampling* sudah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian, sehingga jenis dan jumlah obat yang disampling dapat ditindaklanjuti oleh kelompok substansi pengujian.

b. Pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan *reagen* sesuai dengan kebutuhan.
c. Peningkatan kompetensi personel pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar.
d. Penunjukkan analis khusus Penguji NAPZA sampel pihak ketiga sehingga analis sampel rutin yang lain dapat melakukan tugas dengan fokus.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Perbedaan definisi operasional Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, menyebabkan rekomendasi pada tahun sebelumnya tidak dapat dievaluasi dan dianalisis untuk capaian Indikator Kinerja tahun ini di tahun 2020. Namun telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Kinerja *Interim* TW III tahun 2020 berupa optimalisasi sisa dana lelang untuk pembelian reagensia, dan tetap melakukan *sampling* Obat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100. Capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman *Sampling* dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Tabel 3.1.72. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	90,00	86,35	95,94	Baik

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2020, untuk Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak, bahwa realisasi (86,355%) berada di bawah target (90,00%), dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 95,94%. Sehingga capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.73. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	71,00	90,56	127,55
2020	90,00	86,35	95,94

Sama halnya dengan Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Duji Sesuai Standar, Definisi Operasional tahun 2019 berbeda dengan tahun 2020. Definisi Operasional untuk Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 adalah Persentase Sampel Makanan yang Diuji Sesuai Standar. Standar yang dimaksud adalah Parameter Uji Kritis Wajib sesuai Pedoman *Sampling*. Dalam Definisi Operasional tahun 2019 hanya menghitung *output* dari proses pengujian saja, belum mencakup proses pemeriksaan serta belum memperhitungkan pemenuhan *timeline*. Sedangkan Definisi Operasional tahun 2020 untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diuji Sesuai Standar meliputi:

a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.
b. Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.
c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Terdapat relevansi Indikator Kinerja tahun 2019 dan 2020 namun terdapat beberapa perbedaan sehingga tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.74. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 dengan Tahun 2024

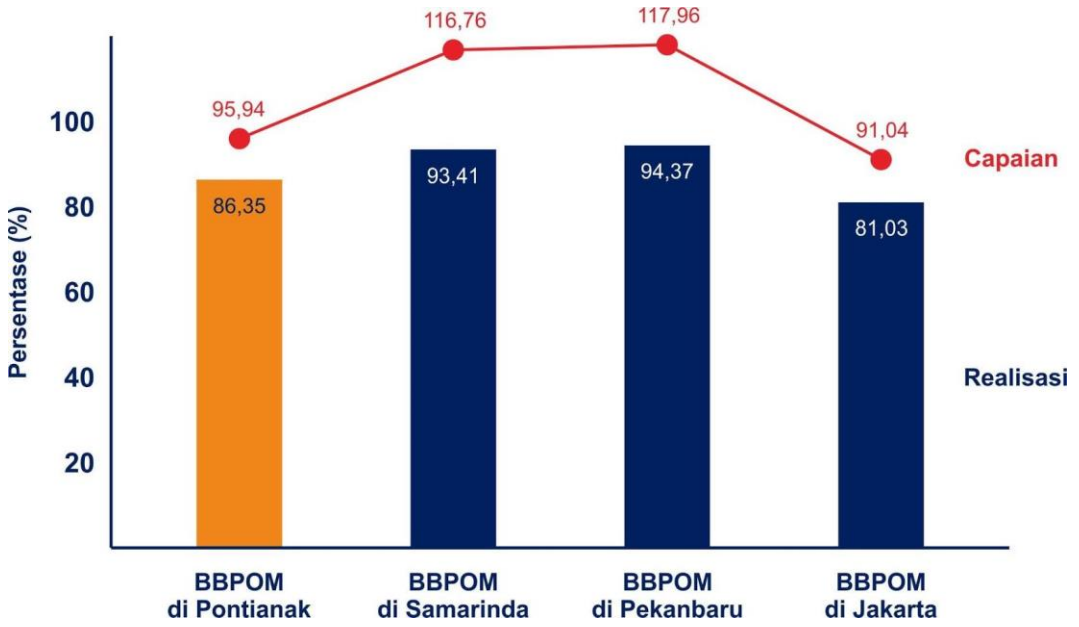
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	86,35	94

Realisasi Indikator Kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2020 adalah 86,35%. Capaian tahun 2020 sebesar 91,86% dari target 94 di akhir tahun Renstra 2020-2024. Dengan titik tolak pencapaian tahun 2020 diiringi dengan perbaikan kinerja dalam pemenuhan *timeline* pemeriksaan dan pengujian diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.75. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	86,35	93,41	94,37	81,03
	Capaian	95,94	116,76	117,96	91,04



Grafik 3.1.25. Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yang termasuk kriteria **Baik** sama dengan BBPOM di Jakarta, sedangkan

BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Pekanbaru termasuk kriteria Sangat Baik.

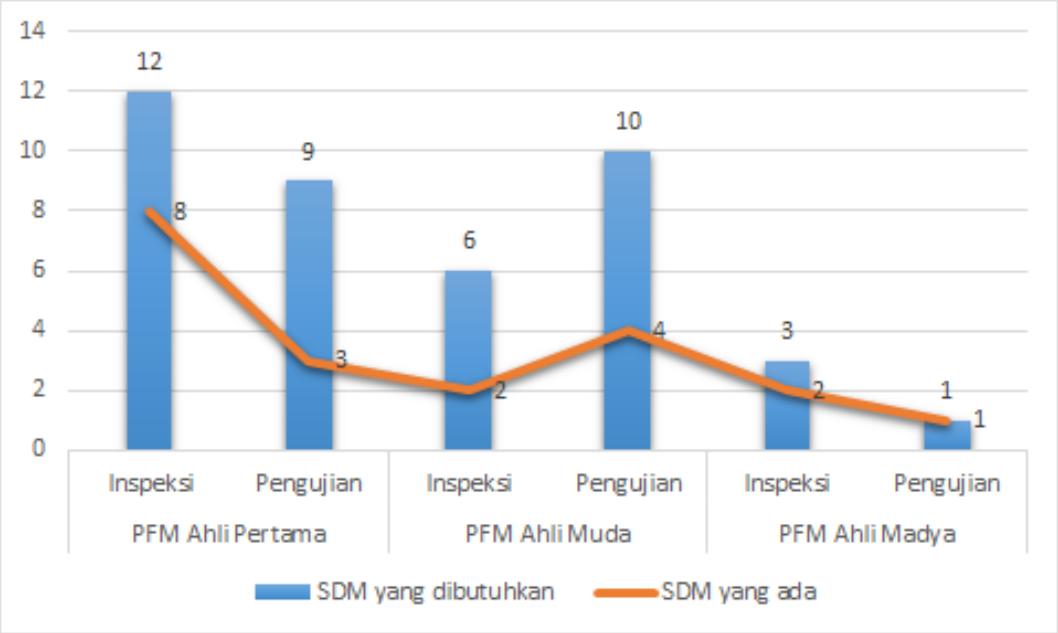
5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target sebagaimana ditetapkan, disebabkan antara lain oleh:

a. Kerusakan alat yang tidak dapat langsung diperbaiki sehubungan dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
b. Keterlambatan pengiriman *reagen* dan media oleh *supplier* disebabkan pembatasan perjalanan antar negara.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar berada di Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 41 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 20 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada dengan rincian seperti pada grafik 3.1.31.



Grafik 3.1.26. SDM pada Subkelompok Substansi Inspeksi dan Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, dan penggalangan komitmen petugas. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sebesar 0,96 kategori Kurang Efisien (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

a. Pekerjaan pengujian tidak bisa dilakukan secara *full time* di laboratorium.
b. Perbaikan peralatan tidak bisa tepat waktu sehubungan dengan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

c. Pengadaan reagensia dan media tidak tepat waktu karena perbatasan perjalanan antar negara.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan upaya untuk merealisasikan target berdasarkan evaluasi capaian triwulan yaitu melakukan percepatan pengujian setelah *reagen* dan media diterima.

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Tabel 3.1.76. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	90,50	102,84	Baik

Pada tahun 2020, untuk indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak

mencapai realisasi sebesar 90,50% berada di atas target (88%) dengan capaian sebesar 102,84% termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.77. Pencapaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 Dibandingkan dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM	2019	50	72,73	145,45	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	88	90,5	102,82	Baik

Terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2020 dengan tahun 2019 yaitu:

a. Capaian tahun 2019 menggunakan Renstra BBPOM di Pontianak 2015-2019 di imana indikator persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM diperhitungkan sebagai perkara yang diselesaikan sampai dengan tahap II dengan perhitungan (Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara di tahun n) x 100%.
b. Capaian tahun 2020 terhadap indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan perhitungan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas yaitu SPDP, tahap I, P21, dan tahap II.

Terdapat relevansi Indikator Kinerja tahun 2019 dan 2020 namun terdapat beberapa perbedaan sehingga tidak dapat dibandingkan. Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak dihitung terhadap 6 (empat) target perkara, terdiri dari 4 (empat) perkara dapat diselesaikan hingga tahap II di tahun 2020, dan 2 (dua) perkara *carry over* pada tahap P21 dan tahap II di tahun 2021.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.78. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

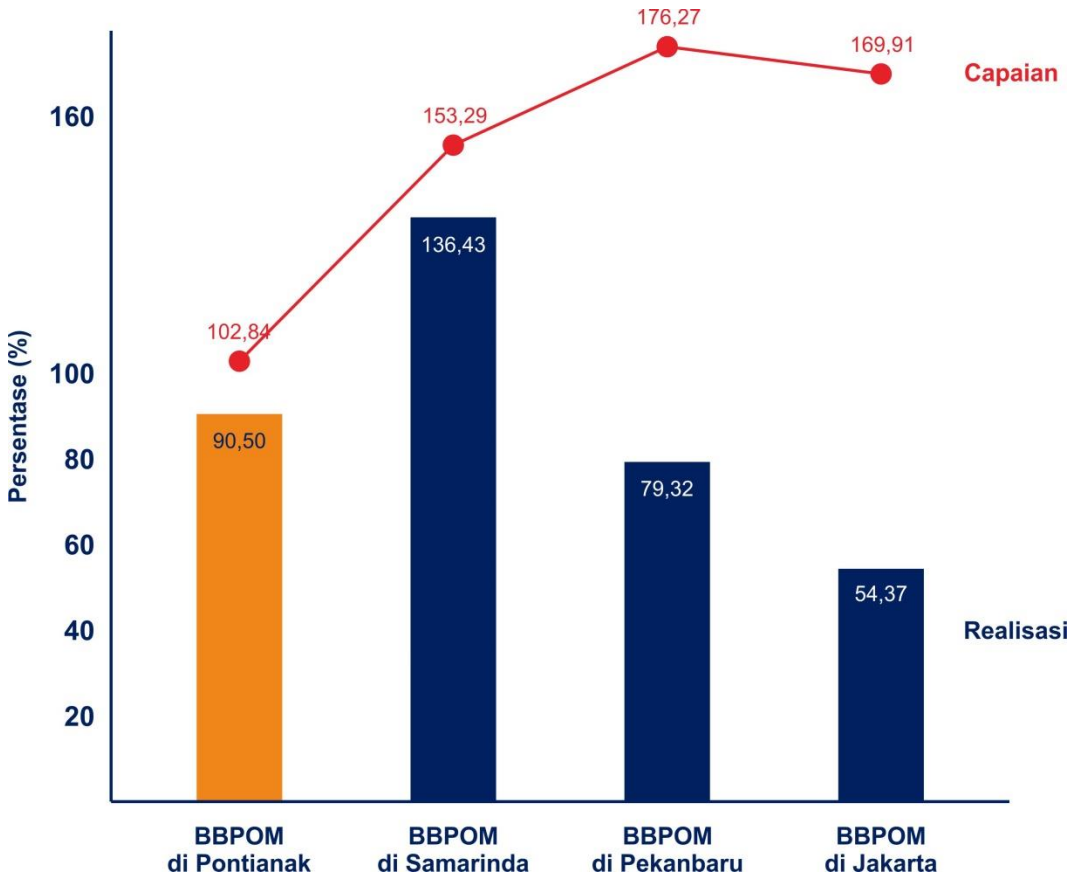
Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00	90,50	95,00

Realisasi Indikator Kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2020 mencapai 90,50%, melampaui target 88%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi tahun 2020 ini sebesar 95,26% dari target 95% pada akhir Renstra 2020-2024. Program dan kegiatan tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra 2020-2024. Untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.79. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak dengan Balai lain Sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Realisasi	90,50	136,43	79,32	54,37
	Capaian	102,84	153,29	176,27	169,91



Grafik 3.1.27. Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Baik**, sedangkan 3 (tiga) Balai pembanding lainnya termasuk kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Samarinda.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan Indikator Kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan antara lain:

a. Petugas yang kompeten dalam melakukan kegiatan dan operasi intelijen serta penyidikan.
b. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* yaitu Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta lintas sektor antara lain Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mendukung capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di Kelompok Substansi Penindakan. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dengan SDM yang tersedia dimana, berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah SDM yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 11 orang, sedangkan SDM yang ada sebanyak 7 orang (5 orang diantaranya adalah PPNS aktif).

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 1,03 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, komitmen dan integritas yang tinggi

pada penyidik dan petugas lainnya, serta realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh BBPOM di Pontianak antara lain:

a. Koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat.
b. Peningkatan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen, investigasi, dan penyidikan sesuai kebutuhan.

8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi pada Laporan Kinerja *Interim* TW III tahun 2020 dengan mengintensifkan patroli siber dan menindaklanjuti hasilnya berupa kegiatan intelijen di lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

a. Manajemen Perubahan : bobot 5%
b. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
c. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
e. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.80. Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	90,00	76,74	85,27	Cukup

Berdasarkan tabel di atas realisasi untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak sebesar 76,74 dengan capaian 85,27 kriteria **Cukup**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Indeks RB dilakukan pertama kali pada tahun 2020 sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.81. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	90	76,74	95

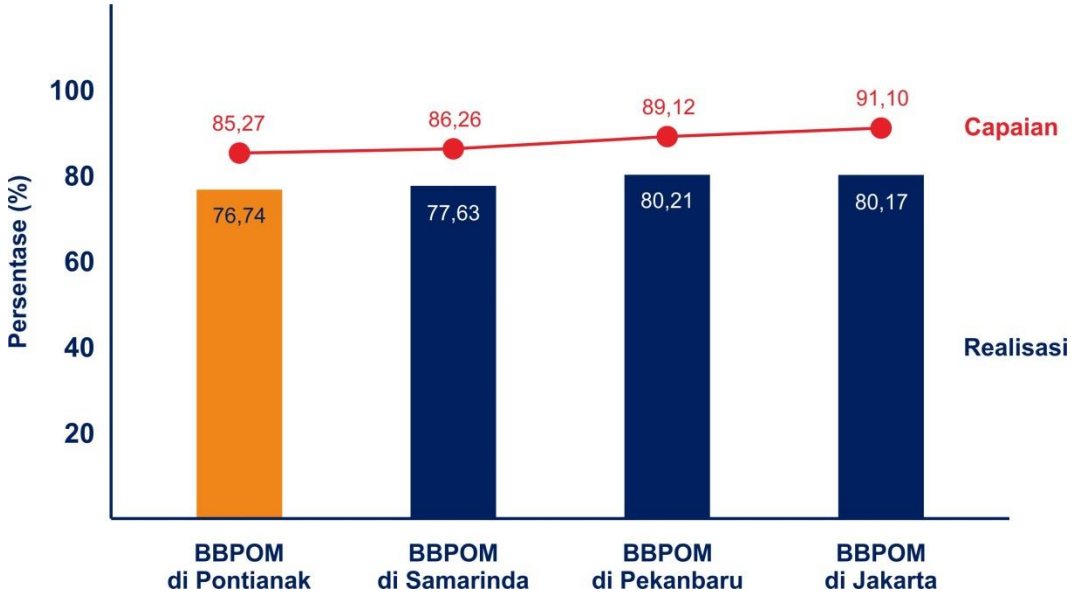
Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Indeks RB tahun 2020 adalah 76,74 atau 80,78% dari target 95 pada akhir tahun Renstra 2020-2024. Akan dilakukan berbagai upaya dan terobosan pada setiap area perubahan RB dan mengupayakan predikat WBBM pada tahun 2021 sebagai kelanjutan predikat WBK yang diterima pada tahun 2019, sehingga target akhir Renstra dapat dicapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.82. Perbandingan capaian Indeks RB BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Realisasi	76,74	77,63	80,21	80,17
	Capaian	85,27	86,26	89,12	91,10

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Pekanbaru berada di kriteria Cukup, sedangkan BBPOM di Jakarta berada di kriteria Baik.



Grafik 3.1.28. Perbandingan Indeks RB BBPOM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang menyebabkan Indeks RB belum sesuai target, antara lain belum semua SOP Mikro mengacu pada bisnis proses, masih terdapat SOP Mikro yang belum diterapkan (belum ada data dukung), belum

dilakukan Monev Target Prioritas secara rutin, belum memiliki inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, dan lain-lain.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya telah diberdayakan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di Pontianak. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks RB sebesar 0,86 yang termasuk kriteria **Kurang Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini disebabkan oleh monitoring implementasi dan *updating* LKE yang kurang konsisten.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut antara lain:

a. Sosialisasi dan internalisasi peta bisnis proses dan SOP Mikro.
b. Internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif pada masing-masing kelompok substansi, antara lain Pojok RB, SPOT (***SP****irit* ***O****f* ***T****he day*).
c. Membuat inovasi mandiri untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik antara lain aplikasi SIPERKASA dan *TRACKING*.
d. Membuat inovasi pemberian *reward* dan *punishment* secara berkala.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut atas capaian Indeks RB yang belum memenuhi target antara lain pencanangan BBPOM di Pontianak *goes to* WBBM 2021, sosialisasi dan internalisasi RB ke semua pegawai, membangun aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan, penguatan tim RB dan tim AOC, dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.

SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- **Perencanaan Kinerja (30%)** meliputi aspek:
  a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
  b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- **Pengukuran Kinerja (25%)** meliputi aspek:
  a. Pemenuhan pengukuran (5%)
  b. Kualitas pengukuran (12,5%)
  c. Implementasi pengukuran (7,5%)
- **Pelaporan Kinerja (15%)** meliputi aspek:
  a. Pemenuhan pelaporan (3%)
  b. Kualitas pelaporan (7,5%)
  c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- **Evaluasi Internal (10%)** meliputi aspek:
  a. Pemenuhan evaluasi (2%)
  b. Kualitas evaluasi (5%)
  c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- **Capaian Kinerja (20%)** meliputi aspek:
  a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
  b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)

c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.83. Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80	77,57	96,96	Baik

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Pontianak tahun 2020 adalah 77,57 dari target 80, dengan capaian sebesar 96,96% termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.84. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP UPT	2019	81	72,32	89,28	Cukup
Nilai AKIP UPT	2020	80	77,57	92,00	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,25 dari 72,32 (tahun 2019) menjadi 77,57.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.85. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Pontianak Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80,00	77,57	92

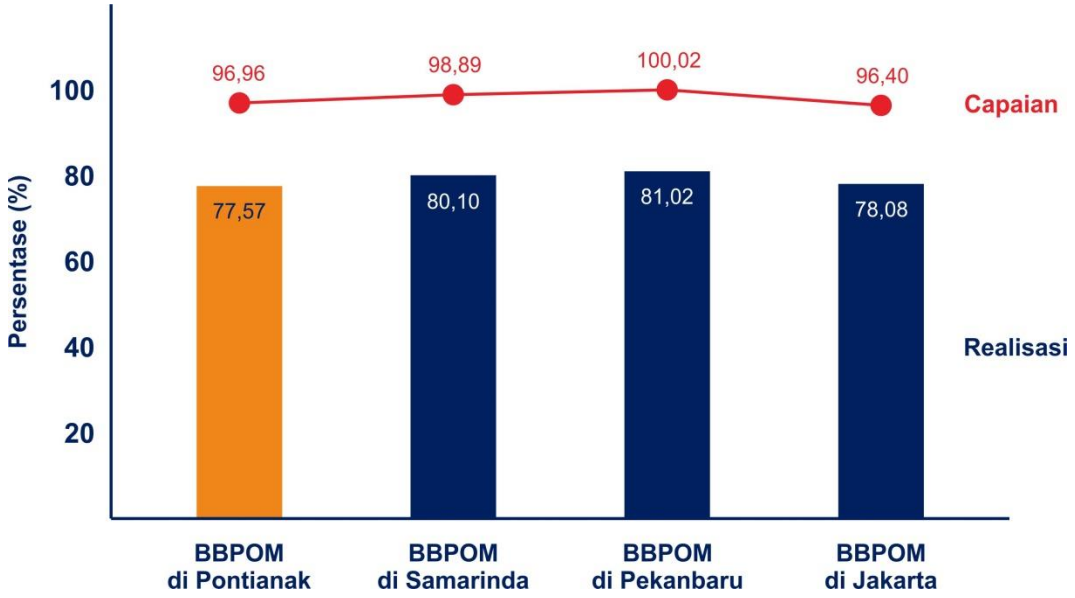
Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Nilai AKIP tahun 2020 adalah 77,57 atau 84,32% dari target 92 pada akhir tahun Renstra 2020-2024. Akan dilakukan berbagai upaya perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi monev SAKIP 2019.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.86. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Realisasi	77,57	80,10	81,02	78,08
	Capaian	96,96	98,89	100,02	96,40

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai AKIP pada semua Balai termasuk dalam kriteria **Baik**.



Grafik 3.1.29. Perbandingan Nilai AKIP BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari segi capaian, Balai Besar POM di Pontianak sudah masuk kategori Baik namun belum mencapai target. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator Nilai AKIP antara lain:

a. Proses pelaksanaan evaluasi internal sudah dilaksanakan, namun belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
b. Evaluasi belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja secara detail.
c. Pelaksanaan pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara rutin dan belum menyajikan alternatif perbaikan jika indikator belum mencapai target.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya telah diberdayakan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pencapaian Nilai AKIP pada Balai Besar POM di Pontianak. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai AKIP sebesar 0,98 yang termasuk kriteria **Kurang**

Efisien (Tabel 3.2.2). Hal ini disebabkan oleh pengukuran kinerja, serta monitoring dan evaluasi capaian belum dilakukan secara detail dan komprehensif.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Nilai AKIP tahun 2020 antara lain:

a. Melakukan perbaikan perencanaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
b. Melakukan perbaikan pengukuran kinerja antara lain membuat mekanisme pengumpulan data kinerja secara triwulan.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan, termasuk kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan serta rencana aksi tindak lanjutnya.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Terhadap rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja 2020, telah dilakukan dan akan terus ditindak lanjuti secara konsisten antara lain:

a. Perbaikan perencanaan yaitu mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.
b. Perbaikan pengukuran kinerja yaitu dengan membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman, berkoordinasi dengan unit pusat terkait dalam hal pelaporan dan pendampingan/bimbingan teknis.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, membuat rencana aksi tindak lanjut dan alternatif-alternatif tindakan untuk mencapai target indikator.

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal

SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
- Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
- Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.
- Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.87. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	75	82,96	110,61	Sangat Baik

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 BBPOM di Pontianak adalah sebesar 82,96, dengan capaian sebasar 110,61% dan termasuk kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru dalam Renstra, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.88. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2024
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	75,00	82,96	85,00

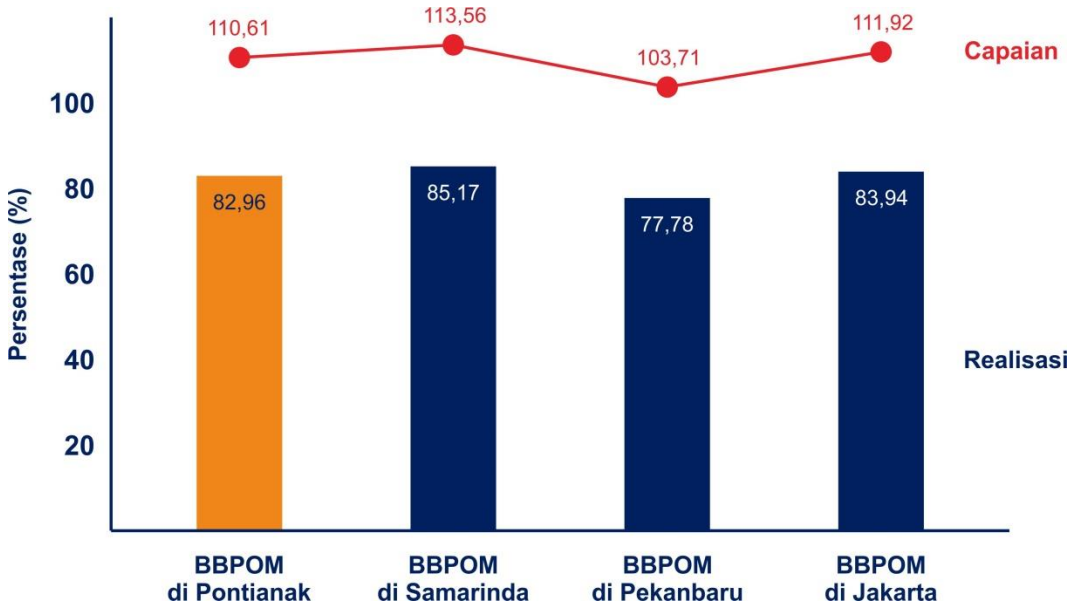
Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 adalah 82,96 dari target 75,00. Capaian tersebut sebesar 97,6% dari target 85,00 pada akhir tahun Renstra 2020-2024..

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.89. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Realisasi	82,96	85,17	77,78	83,94
	Capaian	110,61	113,56	103,71	111,92

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN di BBPOM di Pontianak, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Jakarta telah mencapai target. Pada BBPOM di Pontianak mempunyai capaian 110,61% dengan kategori **Sangat Baik** sebagaimana diraih oleh BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Samarinda, sedangkan BBPOM di Pekanbaru termasuk dalam kriteria Baik.



Grafik 3.1.30. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indiktor Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Pontianak didukung antara lain oleh:

a. Pegawai yang memenuhi kualifikasi, dengan latar belakang pendidikan formal yang memadai.
b. Konsistensi pengembangan kompetensi semua pegawai. Dipersyaratkan setiap pegawai harus mengikuti miinimal 20 JP setahun, namun berdasarkan data pengembangan kompetensi rata-rata pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi 76 JP dalam setahun.
c. Komitmen yang tinggi untuk mencapai SKP yang ditetapkan.

d. Tingkat kepatuhan pegawai yang tinggi terhadap peraturan Disiplin Pegawai.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh SDM BBPOM di Pontianak telah diberdayakan, dan sebagian besar (97,80%) pegawai telah memberikan kontribusi yang sangat baik untuk pencapaian indeks Profesionalitas ASN. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Profesionalitas sebesar 1,17 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh pegawai yang disiplin, kompeten, berintegritas serta realisasi anggaran terkait indeks tersebut selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

a. Kualifikasi pegawai BBPOM di Pontianak dan Loka POM di Sanggau sudah memadai dimana sebagian besar pegawai berlatar pendidikan formal antara lain S2/Profesi sebanyak 32 orang, S1/D4 sebanyak 46 orang, dan D3 sebanyak 18 orang.
b. Pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan secara konsisten. Dipersyaratkan setiap pegawai harus mengikuti minimal 20 JP setahun, namun berdasarkan data pengembangan kompetensi rata-rata pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi 76 JP dalam setahun.
c. Telah dilakukan pengukuran kinerja semua pegawai secara transparan melalui capaian SKP secara periodik.
d. Penerapan disiplin kepada seluruh pegawai termasuk penerapan sanksi kepada pegawai yang melanggar.
e. Pemberian kesempatan Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada pegawai sesuai kebutuhan kualifikasi dan kompetensi. Pada tahun 2020

kesempatan Tugas Belajar diberikan kepada 5 (lima) orang pegawai, dan Izin Belajar kepada 2 (dua) orang pegawai.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Menindaklanjuti Laporan Evaluasi Triwulanan, telah dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi, penerapan disiplin, penilaian prestasi kerja secara konsisten agar indeks Profesionalitas ASN dapat tercapai.

Sasaran Kegiatan 10
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan laboratorium yang meliputi kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi personel, dan peralatan laboratorium yang dibandingkan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun 2020-2024 yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020.

Standar kemampuan laboratorium tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019, dengan perubahan antara lain:

- Penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai POM.
- Pemutakhiran metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan.
- Pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi riil sesuai situasi saat ini.

Tujuan penilaian ini adalah untuk memetakan kondisi peralatan, sumber daya manusia terkait kompetensi personel laboratorium dan ruang lingkup pengujian sebagai dasar pengembangan dan peningkatan kinerja laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Pengujian Badan POM. Target pemenuhan kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM pada tahun 2020 adalah 23 dari 33 laboratorium BBPOM/BPOM (dengan *cut off* 70%).

1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Berikut adalah perbandingan nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak terhadap standar Kemampuan Laboratorium dengan target BBPOM di Pontianak.

Tabel 3.1.90. Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	84,00	72,80	86,67	Cukup

Persentase pemenuhan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak terhadap standar Kemampuan Laboratorioum adalah 72,8%. Nilai capaian Indikator Kinerja utama ini adalah 86,67% dari target yang ditetapkan BBPOM di Pontianak untuk tahun 2020 sebesar 84,00% dengan kategori **Cukup**.

Nilai pemenuhan persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP ditentukan oleh tiga hal yaitu persentase pemenuhan standar ruang lingkup dengan nilai pemenuhan 67%, persentase

pemenuhan standar kompetensi 91,8%, dan persentase pemenuhan standar peralatan 57,2%. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.91. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per komponen per laboratorium

No.	Bidang/ Laboratorium	Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1.	KONAPPZA	59,0	97,4	55.4
2.	Kimia OTSK	76,3	89,9	
3.	Kimia Kosmetik	69,4	95,0	
4.	Kimia Pangan	74,0	90,7	
5.	Mikrobiologi dan Biologi Molekuler	60,0	86,0	58,9
Rata-rata Nilai Pemenuhan (%)		67,7	91,8	57,2
Nilai Pemenuhan GLP		72,2 %		
Nilai Target sesuai Renstra Badan POM		>65 %	>75 %	> 70 %

Batas nilai minimal pemenuhan standar Kemampuan Laboratorium sesuai Renstra Badan POM adalah 70%, dengan ketentuan: Standar ruang lingkup >65%, standar kompetensi personel laboratorium >75%, dan standar Alat Laboratorium >70%. Berdasarkan batas minimal tersebut capaian pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan di Pontianak ada yang tidak memenuhi batas minimal yaitu standar alat laboratorium (57,2%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP merupakan indikator baru dalam Renstra 2020-2024.

Sehingga hasil Realisasi dan Capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Pengukuran Persentase Pemenuhan Standar GLP telah dilakukan oleh laboratorium pada beberapa tahun sebelum tahun 2020, tetapi belum menjadi Indikator Kinerja Balai.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Berikut adalah perbandingan capaian persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target renstra tahun 2024.

Tabel 3.1.92. Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	84,00	72,80	88,00

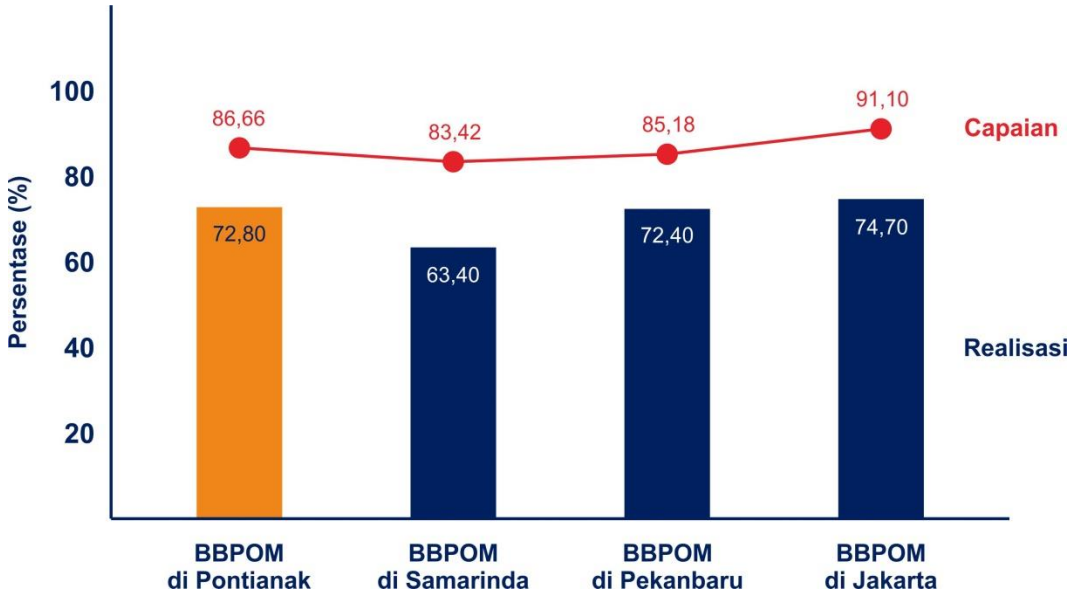
Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP tahun 2020 adalah sebesar 72,8% dari target 84%. Capaian tersebut adalah 82,73 % dari target 88% pada akhir tahun Renstra 2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.93. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	Realisasi	72,80	63,40	72,40	74,70
	Capaian	86,66	83,42	85,18	91,10

Berdasarkan tabel tersebut diketahui capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk BBPOM di Pontianak adalah 86,66% termasuk dalam kriteria **Cukup**, sama dengan BBPOM di Samarinda dan BBPOM Pekanbaru. Sedangkan BBPOM di Jakarta berada pada kriteria **Baik**.



Grafik 3.1.31. Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan nilai pemenuhan per komponen Standar Kemampuan Laboratorium, diperoleh rincian Persentase pemenuhan:

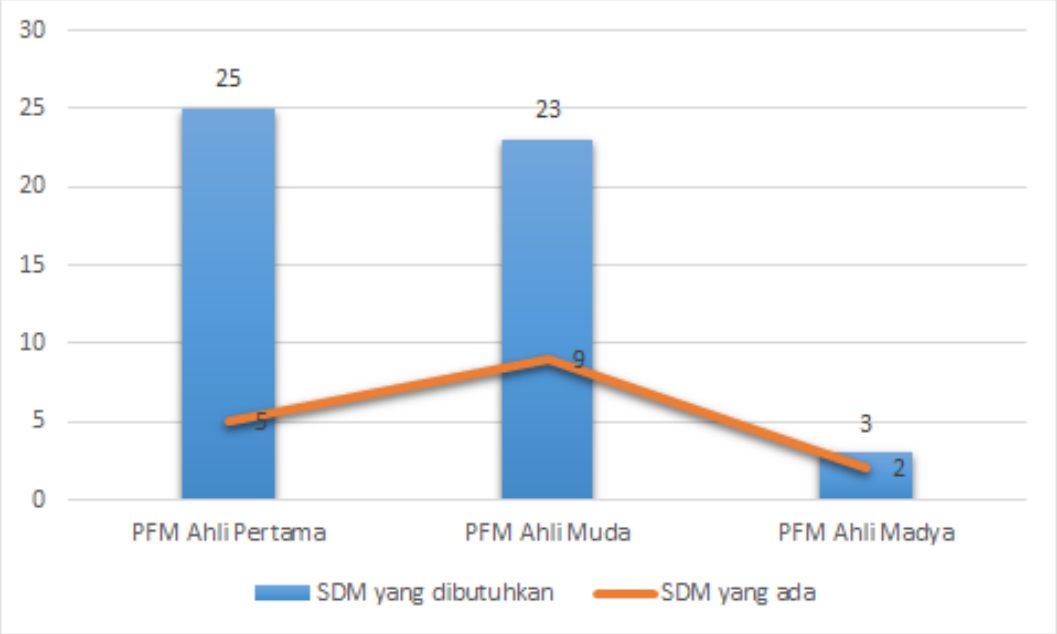
a. Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup 67,7%. Nilai Pemenuhan Standar Ruang Lingkup di bawah *cut off 70%* terdapat pada laboratorium KONAPPZA (59,0%), laboratorium Mikrobiologi (60,0%) dan kimia kosmetik 69,4%.
b. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi 91,8%.
c. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium 57,2% berada di bawah *cut off 70%*.

Tidak tercapainya target Indikator Kinerja ini disebabkan antara lain:

a. Parameter yang digunakan untuk evaluasi pemenuhan Standar GLP tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019, dan parameter baru tersebut disosialisasikan dalam waktu yang berdekatan dengan evaluasi. Di sisi lain, sebagian dari parameter uji yang masuk dalam standar ruang lingkup GLP ini merupakan parameter uji pilihan yang tidak wajib dilakukan oleh laboratorium berdasarkan Pedoman *Sampling* dan Pengujian. Hal ini menyebabkan sebagian besar parameter yang masuk dalam Standar Ruang Lingkup GLP, belum dilakukan oleh laboratorium.
b. Persentase pemenuhan standar peralatan laboratorium BBPOM di Pontianak belum memenuhi batas minimal Standar Peralatan Laboratorium. Hal ini salah satunya disebabkan karena terdapat perubahan yang signifikan dalam standar alat yang harus dipenuhi untuk Standar GLP tahun 2019 dengan tahun 2020. Perubahan signifikan ini menyangkut jumlah minimal alat laboratorium. Laboratorium belum dapat menyesuaikan dengan standar yang baru, sehubungan dengan pemenuhan alat laboratorium membutuhkan proses yang kompleks.

c. Adanya pemotongan anggaran Pengadaan Laboratorium tahun 2020 menyebabkan pemenuhan alat laboratorium mengalami penundaan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Grafik 3.1.32. SDM Kelompok Substansi Pengujian

Berdasarkan grafik di atas terlihat kesenjangan antara jumlah SDM yang dibutuhkan dengan kondisi eksisting dan BBPOM di Pontianak telah melakukan upaya yang sangat besar untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi dan ruang lingkup pengujian. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP Kurang Efisien yaitu sebesar 0,91 (Tabel 3.2.2). Hal tersebut disebabkan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan standar GLP 2019 dan sebagian besar telah terealisasi, sehingga penyesuaian terhadap parameter yang baru tidak dapat dilakukan segera untuk mencapai pemenuhan target.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menyebabkan capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak terhadap Standar GLP di bawah target antara lain:

a. Penyesuaian pengadaan alat laboratorium terhadap parameter standar pemenuhan GLP yang baru, tidak dapat dilakukan karena pengadaan sudah berjalan sesuai dengan standar pemenuhan GLP yang lama.
b. Program pengujian parameter kritis untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, tidak dapat dilakukan dengan segera karena keterbatasan waktu (menjelang akhir tahun 2020), sampel, media dan reagensia.
c. *Refocusing* anggaran tahun 2020 sehingga sebagian besar pengadaan peralatan laboratorium tidak dapat dilaksanakan.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan rekomendasi hasil evaluasi Pemenuhan Standar GLP tahun 2019 yaitu peningkatan kompetensi petugas sesuai kebutuhan. Telah dilakukan juga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemenuhan Standar Pemenuhan GLP yang baru pada Triwulan ke IV tahun 2020, yaitu perencanaan pelatihan dan magang, penambahan ruang lingkup pengujian dan pengadaan alat yang mengacu pada standar Pemenuhan GLP yang baru.

SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal

Capaian Indikator Kinerja indeks pengelolaan data informasi Balai Besar POM di Pontianak dinilai dari beberapa aspek antara lain:

a. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM *email*

   BPOM *email* adalah pemanfaat akun *email corporate* bagi seluruh pegawai Badan POM.
b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-BCC

Dinilai dari frekuensi akses dan *login* seluruh pegawai BBPOM di Pontianak ke aplikasi Badan POM *Command Center (BCC).*

c. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-*sharing folder*
   Dinilai dari frekuensi akses seluruh pegawai BBPOM di Pontianak ke dokumen *sharing folder*.

d. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-Berita Aktual
   Dinilai dari jumlah *upload* berita yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak.

e. Nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BCC-SIPT
   Dinilai dari realisasi data dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu.

f. Nilai indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BCC-SPIMKER
   Dinilai dari jumlah *entry* data keracunan sepanjang tahun 2020.

Gabungan dari beberapa indeks pemanfaatan data dan informasi tersebut disebut Nilai indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Nilai capaian indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun 2020 adalah sebesar 1,95.

Tabel 3.1.94. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	1,5	1,95	130	Tidak dapat disimpulkan

Capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak adalah 130% dari target, yaitu 1,95 dari target 1,5. Nilai capaian ini **Tidak Dapat Disimpulkan.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan indikator baru dalam Renstra 2020-2024, sehingga realisasi dan capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.95. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	1,5	1,95	3

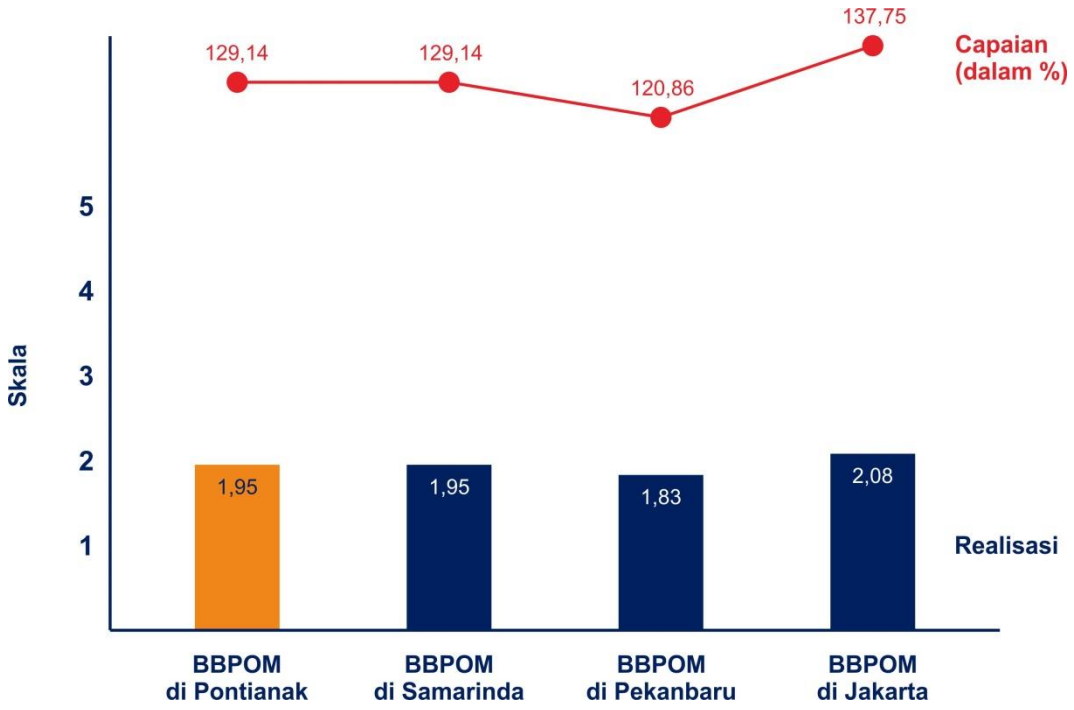
Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2020 sebesar 1,95, melampaui target 1,5. Capaian tahun 2020 sebesar 130% dari target 3 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.96. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak	Realisasi	1,95	1,95	1,83	2,08
	Capaian	129,14	129,14	120,86	137,75

Berdasarkan tabel tersebut diketahui realisasi capaian indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, sama dengan ketiga Balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1.33. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Pontianak melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut didukung oleh:

a. Terpenuhinya alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
b. *Bandwidth* jaringan internet dan daya listrik yang memadai.
c. Tim IT yang kompeten.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pontianak dilakukan oleh tim TI sebanyak 11 orang. Jumlah SDM ini telah sesuai dengan kebutuhannya sehingga target kinerja untuk indikator ini dapat tercapai dengan baik. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal sebesar 1,38 kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

a. Pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
b. Penambahan *bandwidth* jaringan internet dan daya listrik yang memadai.
c. Peningkatan kompetensi tim IT.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi triwulan antara lain: secara konsisten mengentry data SIPT, aktif menggunakan *sharing folder*, pemanfaatan *cloud*, dan menyebarkan informasi kegiatan melalui *subsite* pontianak.pom.go.id.

Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel

SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

a. Revisi DIPA

b. Deviasi Halaman III DIPA
c. Pengelolaan UP
d. Rekon LPJ Bendahara
e. Data Kontrak
f. Penyelesaian Tagihan
g. Penyerapan Anggaran
h. Retur SP2D
i. Perencanaan Kas (Renkas)
j. Pengembalian/Kesalahan SPM
k. Dispensasi Penyampaian SPM
l. Pagu Minus
m. Konfirmasi Capaian *Output*

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.97. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak	93	88,1	94,73%	Baik

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020, sebesar 87,41% dari target 93%, dengan capaian sebesar 93,99%. Nilai capaian Indikator Kinerja ini termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Nilai Kinerja Anggaran merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2020 pada Renstra 2020-2024, sehingga tidak ada Indikator Kinerja di tahun 2019 yang relevan dibandingkan dengan Indikator Kinerja ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.98. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak	93	88,1	97

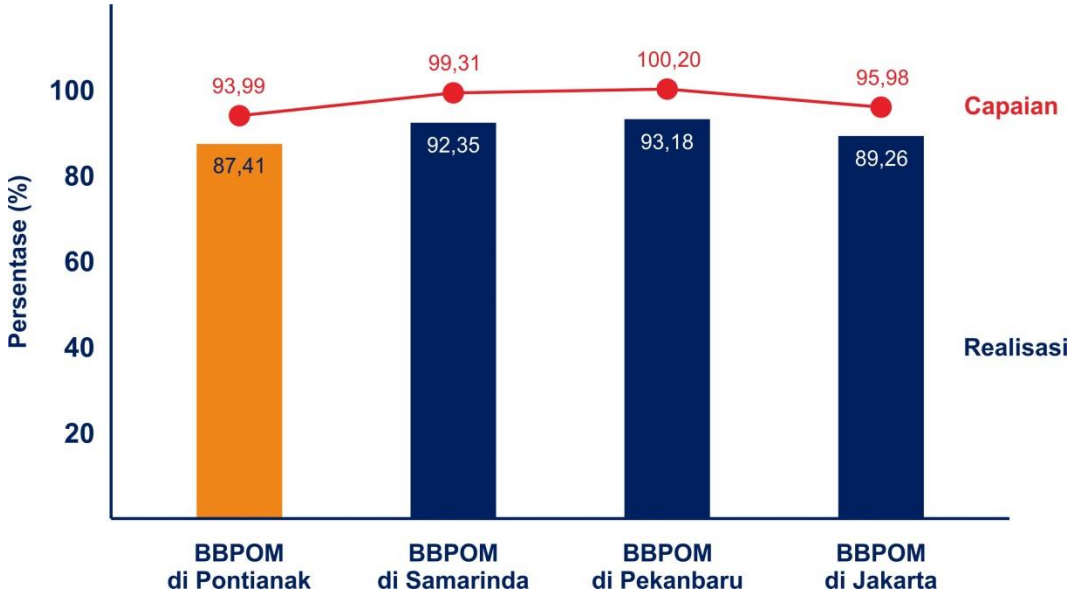
Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 mencapai 88,1% dari target 93%. Realisasi Indikator ini Tahun 2020 mencapai sebesar 94,73% dari target 97% pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.99. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak	Realisasi	88,1	92,35	93,18	89,26
	Capaian	94,73	99,31	100,20	95,98

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran di BBPOM di Pontianak, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Samarinda belum mencapai target sedangkan BBPOM di Pekanbaru telah mencapai target. Capaian BBPOM di Pontianak sebesar 94,73% dengan kriteria **Baik** sebagaimana diraih oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Pekanbaru.



Grafik 3.1.34. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pontianak yang belum mencapai target disebabkan oleh:

a. Nilai parameter efisiensi yang masih rendah,
b. Nilai data kontrak dan nilai parameter kesalahan SPM,
c. Revisi anggaran belum diikuti dengan revisi RPD sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah seluruh pemegang program dan pengelola keuangan. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 0,95 yang termasuk kriteria **Kurang Efisien** (Tabel 3.2.2), hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya *input* data di aplikasi SMARTDJA, keterlambatan pendaftaran kontrak kepada KPPN dan beberapa kesalahan SPM.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran antara lain:

a. Revisi anggaran sesuai jadwal
b. Penyusunan POA dan monitoring realisasi secara bekala
c. Pelaksaanan kegiatan sesuai dengan RPD
d. Pendaftaran kontrak ke KPPN sesuai waktu
e. Pengolalaan UP yang maksimal
f. Monitoring dan evaluasi *output* kinerja
g. Penyusunan Laporan Kinerja *interim* per triwulan
h. Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang selalu tepat waktu
i. Pengelola keuangan dan pemegang program yang kompeten

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator baru untuk Renstra tahun ini sehingga tidak terdapat rekomendasi perbaikan kinerja tahun 2019. Namun telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja *Interim* triwulan, antara lain percepatan pengadaan barang dan jasa, percepatan pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi anggaran secara rutin, serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penanggung jawab program.

SK.11.IKSK.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Beberapa istilah terkait penghitungan nilai indeks efisiensi adalah sebagai beikut:

a. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*: IE = (% capaian *output*) / (% capaian *input*)
b. Standar efisiensi (SE) adalah 1

c. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). TE = (IE - SE) / SE
d. Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.
e. Kriteria:
   - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
   - Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1.100.Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	80	95,52	108,33	Sangat Baik

Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 ***sudah mencapai target*** dengan capaian 108,33% dengan kategori "**Sangat Baik**".

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Sebelumnya

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran merupakan Indikator Kinerja baru di tahun 2020 sesuai Renstra 2020-2024, sehingga tidak ada indikator di tahun 2019 yang dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja ini.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1.101. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2020 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)	Target Tahun 2024 (%)
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	80	95	95

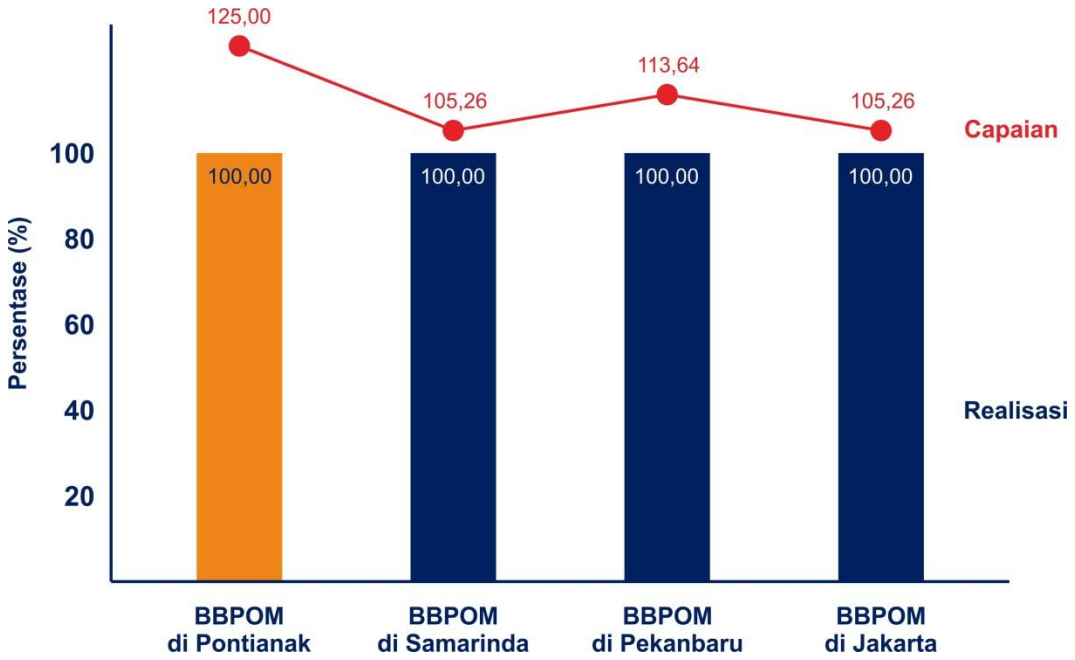
Realisasi Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran tahun 2020 mencapai 100% dari target 80%. Realisasi Indikator ini tahun 2020 mencapai sebesar 105,26% dari target 95% pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain Sebagai Pembanding

Tabel 3.1.102. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Samarinda	BBPOM di Pekanbaru	BBPOM di Jakarta
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Realisasi	108,33	105,26	113,64	105,26
	Capaian	95,52	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di BBPOM di Pontianak, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Jakarta telah mencapai target. Pada BBPOM di Pontianak mempunyai capaian 108,33% dengan kategori Sangat Baik. sebagaimana diraih oleh BBPOM di Jakarta, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Pekanbaru.



Grafik 3.1.35. Perbandingan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian realisasi anggaran dengan capaian keluaran *output* sudah efisien, hal ini dikarenakan capaian keluaran *output* dan anggaran sudah selaras dan sudah mencapai target.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak yang memenuhi ketentuan berada di Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi. Seluruh sumber daya baik anggaran maupun pegawai telah diperdayakan dengan efisien sehingga anggaran yang telah diserahkan kepada Balai Besar POM di Pontianak dapat direalisasikan maksimal dan dipertanggungjawabkan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran sebesar 1,05 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2).

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari perhitungan didapatkan nilai indeks efisiensi BBPOM di Pontianak sebesar 1,14 dan tingkat efisiensi sebesar 0,14 yang bermakna BBPOM di Pontianak mampu menggunakan *input* anggaran untuk mencapai *output* kinerja dengan efisien. Hal ini perlu dipertahankan untuk pengelolaan anggaran periode selanjutnya dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran merupakan indikator baru untuk Rencana Strategis tahun ini sehingga tidak terdapat rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya. Secara garis besar untuk mempertahankan Indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pontianak bisa dilakukan dengan memperhatikan aspek perencanaan anggaran dan kegiatan serta monitoring kinerja per triwulan dengan konsisten.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Rp 122,366,250	Rp 120,400,500	98.39%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Rp 191,706,250	Rp 185,560,200	96.79%
		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Rp 130,386,250	Rp 128,370,550	98.45%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Rp 183,138,750	Rp 180,135,700	98.36%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	Rp 173,692,000	Rp 172,550,000	99.34%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 156,138,000	Rp 154,100,000	98.69%
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 82,400,000	Rp 81,200,000	98.54%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp 52,540,000	Rp 51,400,000	97.83%

4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	Rp 375,306,000	Rp 373,200,000	99.44%
		Persentase Keputusan /Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	Rp 220,352,500	Rp 215,570,000	97.83%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	Rp 222,912,000	Rp 218,584,000	98,06%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rp 175,306,000	Rp 174,300,000	99.43%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rp 125,584,000	Rp 123,560,000	98.39%
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp 524,120,000	Rp 523,100,000	99.81%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 1,453,084,000	Rp 1,441,000,000	99.17%
		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp 421,953,000	Rp 420,780,000	99.72%
		Jumlah Desa Pangan Aman	Rp 700,370,000	Rp 698,870,000	99.79%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Rp 150,000,000	Rp 145,470,000	96.98%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Rp 550,000,000	Rp 548,645,000	99.75%

	dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	Rp 550,000,000	Rp 547,900,000	99.62%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rp 819,108,000	Rp 818,100,000	99.88%
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp 296,189,000	Rp 294,500,000	99.43%
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp 138,584,000	Rp 136,550,000	98.53%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM Di Pontianak yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp 8,850,610,000	Rp 8,393,603,002	94.84%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	Rp 3,297,738,000	Rp 3,189,440,000	96.72%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal	Rp 4,624,620,000	Rp 4,324,500,000	93.51%
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp 90,331,000	Rp 89,348,000	98.91%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp 25,032,475,000	Rp 23,911,496,952	95.52%

Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh anggaran sebesar ***Rp 25.032.475.000,- (Dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),*** dan berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 23.911.496.952 atau sebesar 95,52% dan pencapaian kinerja anggaran tahun 2020 sebesar 81,01% berdasarkan *Smart* DJA.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM sejak awal tahun anggaran, supaya kegiatan yang bersumber dari dana RM segara dapat dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan karena kegiatan dengan anggaran bersumber dari PNBP biasanya baru dapat direalisasikan sekitar bulan April.
2. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
3. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intensif.

3.3. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\%\ \text{Capaian}\ Output}{\%\ \text{Capaian}\ Input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian}\ Output}{\%\ \text{Rencana Capaian}\ Input}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengam membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika berikut:

Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2020, sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian *output* kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2. Indeks dan Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (*Input*)			*Output*			IE=CO/CI	TE=(IE-1)/1	IE Sasaran Kegiatan	TE Sasaran Kegiatan	Status
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 122.366.250	Rp 120.400.500	98,39%	80,80%	88,17%	109,12%	1,11	0,11	0,99	-0,01	**Kurang efisien**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp 191.706.250	Rp 185.560.200	96,79%	78,00%	78,02%	100,03%	1,03	0,03			
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 130.386.250	Rp 128.370.550	98,45%	94,00%	82,81%	88,10%	0,89	-0,11			
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 183.138.750	Rp 180.135.700	98,36%	71,00%	63,18%	88,99%	0,90	-0,10			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Rp 173.692.000	Rp 172.550.000	99,34%	70	80,54	115,06%	1,16	0,16	1,16	0,16	**Efisien**
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian	Rp 156.138.000	Rp 154.100.000	98,69%	86	92,19	107,20%	1,09	0,09	1,02	0,02	**Efisien**

	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp 82.400.000	Rp 81.200.000	98,54%	69	65,76	95,30%	0,97	-0,03			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp 52.540.000	Rp 51.400.000	97,83%	89,5	89,32	99,80%	1,02	0,02			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp 375.306.000	Rp 360.200.000	95,98%	46,00%	87,67%	190,59%	1,99	0,99	1,36	0,36	**Efisien**
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 220.352.500	Rp 215.570.000	97,83%	28,70%	31,70%	110,45%	1,13	0,13			
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 222.912.000	Rp 218.584.000	98%	85,00%	99,38%	116,92%	1,19	0,19			
		Persentase	Rp 175.306.000	Rp 174.300.000	99,43%	20,00%	26,56%	132,80%	1,34	0,34			

		sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan											
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 125.584.000	Rp 123.560.000	98,39%	55,00%	78,01%	141,84%	1,44	0,44			
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp 524.120.000	Rp 523.100.000	99,81%	3,51	3,83	109,12%	1,09	0,09			
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 1.453.084.000	Rp 1.341.000.000	92,29%	86,66	88,85	102,53%	1,11	0,11	1,06	0,06	**Efisien**
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp 421.953.000	Rp 390.780.000	92,61%	16	16	100,00%	1,08	0,08			
		Jumlah desa pangan aman	Rp 700.370.000	Rp 698.870.000	99,79%	4	4	100,00%	1,00	0,00			
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp 150.000.000	Rp 145.470.000	96,98%	2	2	100,00%	1,03	0,03			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 550.000.000	Rp 548.645.000	99,75%	90,00%	93,55%	103,94%	1,04	0,04	1,00	0,00	**Efisien**
		Persentase sampel makanan	Rp 550.000.000	Rp 547.900.000	99,62%	90,00%	86,35%	95,94%	0,96	-0,04			

	POM di Pontianak	yang diperiksa dan diuji sesuai standar											
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 819.108.000	Rp 818.100.000	99,88%	88,00%	90,50%	102,84%	1,03	0,03	1,03	0,03	**Efisien**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp 296.189.000	Rp 294.500.000	99,43%	90	76,74	85,27%	0,86	-0,14	0,92	-0,08	**Kurang efisien**
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp 138.584.000	Rp 136.550.000	98,53%	80	77,57	96,96%	0,98	-0,02			
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp 8.850.610.000	Rp 8.393.603.002	94,84%	75	82,96	110,61%	1,17	0,17	1,17	0,17	**Efisien**
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp 3.297.738.000	Rp 3.139.440.000	95,20%	84	72,8	86,67%	0,91	-0,09	1,15	0,15	**Efisien**
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp 4.624.620.000	Rp 4.324.500.000	93,51%	1,51	1,95	129,14%	1,38	0,38			

11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp 90.331.000	Rp 89.348.000	98,91%	93	87,41	93,99%	0,95	-0,05	1,10	0,10	**Efisien**
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp 25.032.475.000	Rp 23.911.496.952	99,95%	80,00%	95,52%	119,40%	1,05	0,05			
			Rp 25.032.475.000	**Rp 23.911.496.952**	**95,52%**			**108,33%**	**1,13**	**0,13**			**Efisien**

Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa 11 sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan IE antara 0,92 s.d. 1,36 sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,08 s.d. 0,36. Dengan rata-rata IE 1,14 maka penggunaan anggaran BBPOM di Pontianak termasuk dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi tertinggi 0,36 dicapai pada pelaksanaan sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak. Sebaliknya tingkat efisiensi terendah -0,08 pada pelaksanaan sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh BBPOM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJM 2020-2024 yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis 2020-2024 Balai Besar POM di Pontianak. Terdapat perbedaan sasaran kegiatan dengan Renstra 2015-2019, sehingga beberapa capaian sasaran kegiatan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019. Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 secara keseluruhan memperoleh kriteria **Baik** dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 103,99%.

Berdasarkan 11 Sasaran Kegiatan tersebut, Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 96,56% (Baik).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 115,06% (Sangat Baik).
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,77% (Baik).
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 133,62% (Tidak dapat disimpulkan).
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 100,63% (Baik).
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 99,94% (Baik).
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 102,84% (Baik).
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian kinerja sebesar 91,11% (Baik).
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian kinerja sebesar 110,61% (Sangat Baik).
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, dengan capaian kinerja sebesar 107,90% (Baik).
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel, dengan capaian kinerja sebesar 107,7% (Baik).

Jika dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, maka terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, 4 (empat) indikator kinerja dengan kriteria Sangat Baik, 15 (lima belas) indikator kinerja dengan kriteria Baik, dan 4 indikator kinerja dengan kriteria Cukup.

Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dijumpai. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kriteria cukup, hal ini terjadi pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yang kurang efisien. Namun secara keseluruhan penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp23.911.496.952,- (95,52%) terhadap capaian output sebesar 108,51%, sehingga disimpulkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah **Efisien**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*.
2. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium.
3. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan solusi apabila terdapat kendala.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
6. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dalam penerapan reformasi birokrasi di BBPOM di Pontianak.
7. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan BBPOM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
8. Pengembangan aplikasi untuk mempermudah dan mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
9. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.

----------oOo----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124

Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Mei 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	70
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	89,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	46

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	3,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,66
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
Jl. Dr. Soedarso Pontianak Kalbar 78124
Telp. (0561) 737720 Fax. (0561) 572417 - E-mail : bpom_pontianak@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	90
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	1,51
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (80%)

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran
Rp 25.032.475.000

Jakarta, 22 Mei 2020

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Plt. Kepala BBPOM di Pontianak

Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt

LAMPIRAN 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	80,80%	80,80%	80,80%	Rp122.366.250
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,00%	78,00%	78,00%	Rp191.706.250
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	Rp130.386.250
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	71,00%	71,00%	71,00%	Rp183.138.750
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	70	Rp173.692.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	86	Rp156.138.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	69	Rp82.400.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	-	-	-	89,5	Rp52.540.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak					
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	Rp375.306.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,70%	28,70%	28,70%	26,70%	Rp220.352.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	Rp222.912.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	Rp175.306.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	Rp125.584.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	3,51	Rp524.120.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	86,6	86,6	86,6	Rp1.453.084.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	12	16	Rp421.953.000
		Jumlah desa pangan aman	1	2	3	4	Rp700.370.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0,5	1	1,5	2	Rp150.000.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,50%	45,00%	67,50%	90,00%	Rp550.000.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,50%	45,00%	67,50%	90,00%	Rp550.000.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,00%	44,00%	66,00%	88,00%	Rp819.108.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	90	Rp296.189.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	80	Rp138.584.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	-	-	-	75	Rp8.850.610.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	84,00%	Rp3.297.738.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	-	1,51	1,51	1,51	Rp4.624.620.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	23,25	46,50	69,75	93	Rp90.331.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Efisien (80%)	Rp353.940.000

PONTIANAK, 22 MEI 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt

LAMPIRAN 3. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Output			Capaian Penyesuaian	NPS	NPS Perspektif
			Target	Realisasi	Capaian			
Stakeholder Perspective								**104,13%**
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	**80,80%**	**88,17%**	**109,12%**	**109,12%**	**96,56%**	
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	**78,00%**	**78,02%**	**100,03%**	**100,03%**		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	**94,00%**	**82,81%**	**88,10%**	**88,10%**		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	**71,00%**	**63,18%**	**88,99%**	**88,99%**		

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	**70**	**80,54**	**115,06%**	**115,06%**	**115,06%**	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	**86**	**92,19**	**107,20%**	**107,20%**	**100,77%**	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	**69**	**65,76**	**95,30%**	**95,30%**		

		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	**89,5**	**89,32**	**99,80%**	**99,80%**		
Internal Process Perspective								**104,90%**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	**46,00%**	**87,67%**	**190,59%**	**120,00%**	**116,08%**	

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	**28,70%**	**31,70%**	**110,45%**	**110,45%**		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	**85,00%**	**99,38%**	**116,92%**	**116,92%**		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	**20,00%**	**26,56%**	**132,80%**	**120,00%**		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	**55,00%**	**78,01%**	**141,84%**	**120,00%**		

		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	**3,51**	**3,83**	**109,12%**	**109,12%**		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	**86,66**	**88,85**	**102,53%**	**102,53%**	**100,63%**	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	**16**	**16**	**100,00%**	**100,00%**		
		Jumlah desa pangan aman	**4**	**4**	**100,00%**	**100,00%**		
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	**2**	**2**	**100,00%**	**100,00%**		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	**90,00%**	**93,66%**	**104,07%**	**104,07%**	**100,06%**	
		Persentase sampel makanan yang	**90,00%**	**86,44%**	**96,04%**	**96,04%**		

		diperiksa dan diuji sesuai standar						
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	**88,00%**	**90,50%**	**102,84%**	**102,84%**	**102,84%**	
Learning and Growth Perspective								**103,01%**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	**90**	**76,74**	**85,27%**	**85,27%**	**91,11%**	
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	**80**	**77,57**	**96,96%**	**96,96%**		
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	**75**	**82,96**	**110,61%**	**110,61%**	**110,61%**	
10	Menguatnya laboratorium,	Persentase pemenuhan	**84**	**72,8**	**86,67%**	**86,67%**	**103,33%**	

	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	**1,51**	**1,95**	**129,14%**	**120,00%**		
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	**93**	**87,41**	**93,99%**	**93,99%**	**107,07%**	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	**80,00%**	**99,52%**	**119,40%**	**119,40%**		
			TOTAL				**104,01%**	

LAMPIRAN 3. Rekap Capaian Nilai-nilai Indeks Tahun 2020

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

No.	Balai Besar/ Balai POM	Standar Ruang Lingkup	Peralatan	Kompetensi	TOTAL PER BALAI
		Rata-Rata	Rata-Rata	Rata-Rata	
1	Mataram	72.1	75.6	85.4	77.7
2	Serang	72.5	71.3	85.3	76.3
3	Surabaya	69.2	77.4	81.8	76.1
4	Semarang	70.3	71.2	84.2	75.2
5	Medan	72.5	67.9	84.0	74.8
6	DKI Jakarta	70.5	66.7	87.1	74.7
7	Yogyakarta	67.5	70.7	85.8	74.7
8	Padang	68.2	66.9	86.7	73.9
9	Aceh	67.1	73.3	80.0	73.5
10	Denpasar	69.0	60.3	90.8	73.3
11	Pangkalpinang	70.0	69.3	80.5	73.3
12	Palu	71.1	66.1	82.4	73.2
13	Pekanbaru	64.9	72.0	80.4	72.4
14	Manado	63.1	74.2	78.3	71.8
15	Bandung	66.6	66.4	81.5	71.5
16	Gorontalo	66.5	64.9	83.2	71.5
17	Pontianak	67.7	57.2	89.7	71.5
18	Palangkaraya	59.7	63.9	88.8	70.8
19	Makassar	67.2	66.2	78.3	70.6
20	Batam	64.0	60.9	87.0	70.6
21	Palembang	66.1	59.2	86.2	70.5
22	Kupang	65.6	56.3	89.1	70.3
23	Bengkulu	58.3	61.9	86.2	68.8
24	Kendari	62.8	63.5	79.4	68.6
25	Ambon	67.8	52.3	83.5	67.9
26	Bandar Lampung	64.1	56.2	82.6	67.7
27	Jambi	67.0	55.7	79.2	67.3
28	Banjarmasin	65.2	57.1	79.4	67.2
29	Jayapura	66.2	62.8	71.4	66.8
30	Manokwari	55.6	53.8	81.4	63.6
31	Samarinda	65.8	49.7	74.6	63.1

2. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pontianak

Rekapitulasi IP Balai Besar/Balai POM

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		IP	Jumlah	Total IP	IP	Jumlah	Total IP
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	71,77	74	5310,98	80,94	69	5585
2	Balai Besar POM di Medan	70,29	104	7310,16	83,08	110	9139
3	Balai Besar POM di Padang	69,26	98	6787,48	83,60	109	9103,5
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	73,38	85	6237,3	77,78	93	7234
5	Balai POM di Jambi	69,25	70	4847,5	85,16	67	5706
6	Balai Besar POM di Palembang	62,13	81	5032,53	84,15	78	6563,5
7	Balai POM di Bengkulu	61,53	70	4307,1	83,30	69	5748
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	78,83	82	6464,06	76,21	87	6630
9	Balai POM di Batam	70,81	43	3044,83	85,10	48	4085
10	Balai POM di Pangkalpinang	82,65	49	4049,85	84,15	47	3955
11	Balai Besar POM di Jakarta	79,44	111	8817,84	83,94	115	9653
12	Balai Besar POM di Bandung	84,21	141	11873,6	78,25	138	10799
13	Balai Besar POM di Semarang	77,92	145	11298,4	85,57	152	13007
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	73,84	108	7974,72	85,61	105	8989
15	Balai Besar POM di Surabaya	72,62	142	10312	84,79	139	11786
16	Balai Besar POM di Serang	76,15	81	6168,15	82,99	83	6888
17	Balai Besar POM di Denpasar	68,57	96	6582,72	85,10	101	8595
18	Balai Besar POM di Mataram	80,03	74	5922,22	83,33	72	6000
19	Balai POM di Kupang	80,12	63	5047,56	85,32	63	5375
20	Balai Besar POM di Pontianak	77,59	71	5506,89	82,72	67	5542
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	72,63	57	4139,91	81,39	54	4395
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	75,38	74	5578,12	80,16	64	5130,5

Rekapitulasi IP Loka POM

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2019			Tahun 2020		
		IP	Jumlah	Total IP	IP	Jumlah	Total IP
1	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	61,41	16	982,56	78,93	14	1105
2	Loka POM di Kab. Aceh Tengah	64,53	16	1032,48	86,67	15	1300
3	Loka POM di Kota Tanjung Balai	58,05	19	1102,95	82,69	13	1075
4	Loka POM di Kab. Toba Samosir	54,87	19	1042,53	83,28	16	1332,5
5	Loka POM di Kota Lubuklinggau	54,12	17	920,04	86,43	14	1210
6	Loka POM di Kab. Bogor	61,47	17	1044,99	85,00	14	1190
7	Loka POM di Kota Tasikmalaya	59,76	17	1015,92	75,94	17	1291
8	Loka POM di Kota Surakarta	66,66	24	1599,84	85,31	24	2047,5
9	Loka POM di Kab. Banyumas	64,44	18	1159,92	86,56	16	1385
10	Loka POM di Kab. Jember	83,75	16	1340	86,67	15	1300
11	Loka POM di Kab. Kediri	69,26	17	1177,42	86,18	17	1465
12	Loka POM di Kab. Buleleng	84	20	1680	77,79	17	1322,5
13	Loka POM di Kota Palopo	70,16	16	1122,56	86,88	16	1390
14	Loka POM di Kab. Mimika	60,59	16	969,44	80,19	16	1283
15	Loka POM di Kab. Merauke	51,17	15	767,55	85,33	15	1280
16	Loka POM di Kab. Dharmasraya	67,5	20	1350	80,38	13	1045
17	Loka POM di Kota Payakumbuh	62,35	17	1059,95	86,43	14	1210
18	Loka POM di Kota Dumai	75,39	19	1432,41	86,33	15	1295
19	Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	70,13	19	1332,47	84,67	15	1270
20	Loka POM di Kab. Tulangbawang	69,01	19	1311,19	86,15	13	1120
21	Loka POM di Kab. Bima	67,77	16	1084,32	85,00	14	1190
2	Loka POM di Kab. Sanggau	6,6	19	1265,4	84,07	15	1261

Untuk Nilai Indeks Profesionalitas tahun 2020 merupakan gabungan dari capaian Balai dan Loka, dengan menggunakan rumus (total IP balai + total IP loka) / (jumlah balai + jumlah loka).

(5542 + 1261) / (67 + 15) = 6803 / 82 = **82,96**

3. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pontianak

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Pelayanan Publik	*Baseline*	Target	IPP	Keterangan
		2019	2020	2020	
1	Balai Besar POM di Denpasar	3,59	3,91	4,52	Pelayanan Prima
2	Balai POM di Manokwari	2,80	3,11	4,38	Sangat Baik
3	Balai Besar POM di Mataram	3,48	3,51	4,31	Sangat Baik
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	3,98	4,31	4,29	Sangat Baik
5	Balai POM di Bengkulu	3,54	3,91	4,29	Sangat Baik
6	Balai Besar POM di Serang	3,41	3,51	4,25	Sangat Baik
7	Balai POM di Ambon	3,35	3,51	4,22	Sangat Baik
8	Balai Besar POM di Padang	3,36	3,51	4,21	Sangat Baik
9	Balai Besar POM di Samarinda	3,38	3,51	4,21	Sangat Baik
10	Balai Besar POM di Bandung	2,85	3,11	4,20	Sangat Baik
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3,27	3,51	4,17	Sangat Baik
12	Balai Besar POM di Semarang	3,05	3,51	4,14	Sangat Baik
13	Balai Besar POM di Surabaya	4,14	4,31	4,11	Sangat Baik
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	3,50	3,51	4,10	Sangat Baik
15	Balai Besar POM di Jayapura	3,34	3,51	4,08	Sangat Baik
16	Balai POM di Palu	2,94	3,11	4,02	Sangat Baik
17	Balai Besar POM di Jakarta	3,13	3,51	4,00	Baik
18	Balai POM di Gorontalo	3,46	3,51	3,96	Baik
19	Balai Besar POM di Makassar	3,33	3,51	3,95	Baik
20	Balai POM di Kupang	3,36	3,51	3,95	Baik
21	Balai POM di Pangkal Pinang	3,48	3,51	3,95	Baik
22	Balai Besar POM di Manado	3,36	3,51	3,91	Baik
23	Balai POM di Batam	3,59	3,91	3,91	Baik
24	Balai POM di Sofifi	2,96	3,11	3,86	Baik
25	Balai Besar POM di Medan	3,35	3,51	3,84	Baik
26	Balai Besar POM di Pontianak	3,42	3,51	3,83	Baik
27	Balai Besar POM di Palembang	3,36	3,51	3,80	Baik
28	Balai POM di Kendari	3,23	3,51	3,79	Baik
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,82	3,11	3,69	Baik
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,35	3,51	3,54	Baik
31	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,46	3,51	3,52	Baik
32	Balai POM di Jambi	3,42	3,51	3,51	Baik
33	Balai POM di Mamuju	2,82	3,11	3,49	Baik dg Catatan

4. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pontianak yang optimal

Perhitungan Indeks UPT

Periode : Triwulan IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah	Total Nilai i i
		SIPT (a)	SPIMKer (b)	c = a + b	Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BCC (f)	Berita Aktual (g)	h = d+e+f+g/4	= c + h / 2
		80%	20%							
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	2,4	0	2,4	0	2	0	2	1	1,7
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2,4	0	2,4	0	1	0	2	0,75	1,58
3	Balai Besar POM di Bandung	2,4	0,6	3	1	1	0	2	1	2
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,4	0	2,4	0	3	0	2	1,25	1,82
5	Balai Besar POM di Denpasar	2,4	0,4	2,8	0	3	0	1	1	1,9
6	Balai Besar POM di Jakarta	2,4	0	2,4	2	3	0	2	1,75	2,08
7	Balai Besar POM di Jayapura	2,4	0	2,4	1	1	0	1	0,75	1,58
8	Balai Besar POM di Makassar	2,4	0	2,4	0	0	0	1	0,25	1,32
9	Balai Besar POM di Manado	2,4	0	2,4	1	3	0	2	1,5	1,95
10	Balai Besar POM di Mataram	2,4	0	2,4	2	1	0	2	1,25	1,82
11	Balai Besar POM di Medan	2,4	0	2,4	1	1	0	3	1,25	1,82
12	Balai Besar POM di Padang	2,4	0,4	2,8	2	3	1	3	2,25	2,52
13	Balai Besar POM di Palembang	2,4	0,6	3	3	3	0	2	2	2,5
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	2,4	0	2,4	0	2	0	3	1,25	1,82
15	Balai Besar POM di Pontianak	2,4	0	2,4	0	3	0	3	1,5	1,95
16	Balai Besar POM di Samarinda	2,4	0	2,4	1	3	0	2	1,5	1,95
17	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0	2,4	0	3	0	2	1,25	1,82
18	Balai Besar POM di Serang	2,4	0,4	2,8	1	3	0	2	1,5	2,15
19	Balai Besar POM di Surabaya	2,4	0,4	2,8	2	3	2	2	2,25	2,52
20	Balai Besar POM di Yogyakarta	2,4	0	2,4	0	3	0	3	1,5	1,95
21	Balai POM di Ambon	2,4	0	2,4	0	0	0	3	0,75	1,58
22	Balai POM di Batam	1,6	0	1,6	0	3	0	1	1	1,3
23	Balai POM di Bengkulu	2,4	0,6	3	0	2	0	2	1	2
24	Balai POM di Gorontalo	2,4	0	2,4	0	2	0	2	1	1,7
25	Balai POM di Jambi	2,4	0	2,4	0	1	0	1	0,5	1,45
26	Balai POM di Kendari	2,4	0	2,4	0	1	0	1	0,5	1,45

5. Nilai AKIP BBPOM di Pontianak

NILAI SAKIP BB/BPOM TAHUN 2020

BADAN POM

No	Nama Balai	Nilai Final Evaluasi 2020
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	81.13
2	Balai Besar POM di Surabaya	81.11
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	81.02
4	Balai Besar POM di Bandung	80.54
5	Balai Besar POM di Samarinda	80.10
6	Balai Besar POM di Serang	79.62
7	Balai Besar POM di Palembang	78.87
8	Balai Besar POM di Padang	78.32
9	Balai Besar POM di Mataram	78.17
10	Balai Besar POM di Jakarta	78.08
11	Balai POM di Palu	78.05
12	Balai POM di Gorontalo	77.80
13	Balai Besar POM di Manado	77.73
14	Balai POM di Jambi	77.65
15	Balai Besar POM di Pontianak	77.57
16	Balai Besar POM di Semarang	77.49

No	Nama Balai	Nilai Final Evaluasi 2020
17	Balai Besar POM di Medan	77.24
18	Balai Besar POM di Jayapura	77.22
19	Balai Besar POM di Makassar	77.27
20	Balai Besar POM di Palangkaraya	77.05
21	Balai Besar POM di Kupang	77.00
22	Balai POM di Kendari	76.23
23	Balai POM di Pangkalpinang	76.15
24	Balai Besar POM di Banjarmasin	76.14
25	Balai POM di Batam	76.06
26	Balai Besar POM di Banda Aceh	75.91
27	Balai Besar POM di Denpasar	75.89
28	Balai POM di Ambon	75.44
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	74.74
30	Balai POM di Manokwari	74.68
31	Balai POM di Mamuju	73.37
32	Balai POM di Bengkulu	73.30
33	Balai POM di Sofifi	71.99

6. Indeks RB BBPOM di Pontianak

INDEKS RB UNIT KERJA
Nilai Konversi
Semua Unit Kerja Tahun 2020

UNIT KERJA YANG DIAJUKAN WBBM TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	89,73
2	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif	88,77

UNIT KERJA YANG DIAJUKAN WBK TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	BBPOM di Mataram	86,10
2	Dit Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang	85,75
3	BBPOM di Gorontalo	85,62
4	BBPOM di Semarang	84,76
5	Direktorat Standar Pangan Olahan	84,69
6	Dit Pengawasan OTSK	83,83
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	83,06
8	Dit Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	82,83
9	BPOM di Batam	82,02
10	BBPOM di Manado	81,85
11	BBPOM di Palembang	81,72
12	BPOM di Bengkulu	81,33
13	Direktorat Registrasi Obat	80,85
14	BPOM di Manokwari	80,54
15	BBPOM di Jakarta	80,17
16	BBPOM di Bandung	80,15
17	BPOM di Pangkal pinang	80,05
18	BBPOM di Bandar Lampung	79,8
19	Direktorat Pengawasan Kosmetik	78,66

UNIT KERJA YANG TIDAK DIAJUKAN TAHUN 2020

No	Unit Kerja	Nilai Konversi
1	Inspektorat II	86,16
2	BBPOM di Padang	83,59
3	BBPOM di Serang	82,71
4	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,42
5	BBPOM di Surabaya	81,06
6	Inspektorat I	80,97
7	BBPOM di Yogyakarta	80,36
8	BBPOM di Pekanbaru	80,15
9	Direktorat Intelijen	79,73
10	Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	78,42
11	Direktorat Pengawasan Produksi Obat Narkotika Prekursor dan Psikotropika	78,38
12	BPOM di Palu	78,3
13	BBPOM di Samarinda	77,63
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	77,09
15	BBPOM di Banda Aceh	76,92
16	BBPOM di Pontianak	76,74
17	Pusat Pengembangan SDM	76,57
18	Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Perkusor	76,37
19	BBPOM di Palangkaraya	76,19
20	Biro Perencanaan dan Keuangan	75,93
21	BBPOM di Denpasar	75,41
22	Direktorat Pengamanan	74,77
23	BPOM di Ambon	74,47
24	BBPOM di Banjarmasin	74,08
25	Biro Hukum dan Organisasi	74,04
26	BPOM di Kendari	73,47
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	73,46
28	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	73,11
29	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekusor, dan Zat Adiktif	72,63
30	BPOM di Jambi	71,51
31	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan	70,21
32	Biro Umum dan SDM	69,03
33	BBPOM di Jayapura	68,65
34	Biro Kerja Sama	68,57
35	BBPOM di Medan	66,34
36	BPOM di Sofifi	61,91
37	BPOM di Kupang	61,75
38	BPOM di Mamuju	61,05
39	Direktorat Penyidikan	58,99
40	BBPOM di Makassar	50,45

7. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Pontianak

Triwulan II

No	Unit Pelaksana KIE	Hasil nilai indeks rata-rata														Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks 2020	Baseline 2019	Target 2020	Keterangan
		Televisi	Radio	Brosur, majalah, koran	Videotron / Billboard	Ttansportasi Umum	Bioskop	Media Online	Talkshow Televisi	Talkshow Radio	CFD	Pameran	Penyuluhan	Medsos	Virtual								
UNIT PELAKSANA TEKNIS		**86.28**	**85.89**	**86.94**	**86.71**	**83.41**	**82.40**	**87.01**	**86.77**	**88.47**	**87.66**	**89.72**	**89.29**	**87.65**	**88.64**	**88.59**	**93.08**	**92.20**	**86.55**	**91.12**			
A	**REGIONAL SUMATERA**																				**69,30**		
1	BBPOM Banda Aceh	91.30	95.83	91.20	90.00			87.50	83.33	85.42	89.17	87.50	87.57	86.25	90.49	86.69	90.99	89.36	80.99	88.12		70.00	
2	Balai Besar POM di Medan	88.97	92.01	90.05	88.29	83.33	87.50	92.30	85.70	93.06	95.75	94.58	93.28	90.22	87.98	91.58	95.04	94.18	91.29	93.67		70.00	
3	Balai Besar POM di Padang	88.95	89.44	88.03	85.39	87.50	83.33	85.02	88.94	87.50	88.39	93.89	92.45	88.98	93.33	92.21	95.02	93.97	89.42	93.31		70.00	
4	BBPOM di Pekanbaru	89.58	92.13	92.88	93.33	89.17	75.00	92.36	90.00	95.00	93.98	93.75	94.50	90.18	86.74	88.28	93.01	91.90	88.00	91.19		70.00	
5	BPOM di Jambi	90.63	83.33	80.00	80.00	87.50	100.00	82.14	80.00			92.86	91.73	85.83	79.41	86.38	95.28	89.58	87.50	90.51		70.00	
6	BBPOM Palembang	92.71	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.18	94.17	92.57	97.92	95.10	92.60	95.22		70.00	
7	Balai POM di Bengkulu	84.72	86.76	85.25	84.68	86.90	87.50	85.53	86.67	81.25	88.19	87.21	84.88	86.77	85.79	84.37	90.99	88.48	85.30	88.23		70.00	
8	BBPOM di Bandar Lampung	85.42	81.67	83.07	80.00			83.43	65.63	83.33	75.00	84.82	88.39	85.12	83.85	84.84	93.15	93.65	83.77	90.95		70.00	
9	Balai POM di Pangkalpinang	88.75	86.90	95.19	97.50	93.75	91.67	86.90	85.00	91.67	97.50	90.00	83.82	91.47	93.59	93.77	96.26	94.85	90.39	94.38		70.00	
10	Balai POM di Batam	82.71	85.42	87.12	86.25		100.00	84.38	93.75	81.25	91.07	93.75	81.38	85.29	82.74	83.00	94.54	88.19	79.93	88.05		70.00	
B	**REGIONAL JAWA**																				**68,51**		
11	BBPOM Jakarta	86.67	87.50	87.50	75.00	100.00	75.00	87.50	87.50		87.50	95.00	94.35	81.82	87.50	92.06	94.66	96.43	85.71	93.67		70.00	
12	BBPOM Bandung	79.09	62.50	82.64	78.33	79.17	75.00	82.09	75.93	79.17	82.92	90.08	87.50	83.79	85.71	87.06	91.45	94.43	88.21	91.80		70.00	
13	Balai Besar POM di Semarang	81.45	78.97	83.46	86.81	77.78		82.31	86.46	85.42	83.52	82.22	83.42	83.81	82.48	84.08	90.94	89.52	84.57	88.53		70.00	
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	85.53	81.25	81.67	91.67	79.17		83.33	83.33	100.00	83.33	75.00	90.22	80.56	83.33	87.69	91.25	95.00	83.13	91.19		70.00	
15	Balai Besar POM di Surabaya	86.22	90.11	87.96	86.58	85.88	84.52	87.70	94.17	84.38	85.69	90.56	91.15	88.90	90.83	90.59	96.49	94.03	90.50	93.78		70.00	
16	Balai Besar POM di Serang	82.44	93.75	83.85	78.13	75.00	75.00	86.15	93.75	93.75	81.25	84.52	88.19	88.23	84.68	86.29	92.26	91.04	86.50	90.14		70.00	
C	**REGIONAL BALI NUSRA**																				**72,21**		
17	Balai Besar POM di Denpasar	92.91	89.84	89.56	97.73	85.00	100.00	91.02	96.67	91.88	88.19	92.12	92.19	89.34	89.52	90.94	97.55	94.15	87.31	93.62		72.00	
18	BBPOM Mataram	100.00	75.00	95.00	75.00			85.00			90.00	90.63	88.00	95.00	87.50	88.19	97.44	91.65	87.11	92.16		72.00	
19	BPOM Kupang	82.81	89.20	84.03	80.43	77.50	83.33	88.08	84.69	90.56	87.50	84.58	83.60	85.51	85.74	85.86	93.39	91.05	84.22	90.03		72.00	
D	**REGIONAL KALIMANTAN**																				**71,79**		
20	Balai Besar POM di Pontianak	86.25	75.00	80.36	96.88	75.00		91.25	83.33		75.00	90.00	78.59	86.48	91.96	88.13	95.11	90.66	86.79	90.99		72.00	
21	BPOM Palangkaraya	91.75	90.95	89.45	90.67	100.00	93.75	91.68	92.41	92.64	89.99	92.22	94.38	91.47	91.33	89.16	95.02	90.63	86.12	90.95		72.00	
22	BBPOM Banjarmasin	83.82	85.86	83.96	83.61	79.17	81.25	81.70	80.36	88.62	86.24	86.87	94.52	84.71	82.29	85.54	88.32	89.38	84.82	87.92		72.00	
23	BBPOM Samarinda	80.62	87.50	91.67	78.33	75.00	50.00	88.91	79.17	81.25	93.75	95.95	92.63	90.22	88.58	90.39	95.42	94.73	89.58	93.61		72.00	
E	**REGIONAL SULAM PAPUA**																				**75,66**		
24	Balai Besar POM di Manado	87.50	87.50	81.67	85.71			85.83	87.50	82.14	81.94	87.34	85.98	86.25	80.63	86.14	93.62	88.70	86.61	89.47		72.00	
25	BPOM Palu	84.85	93.75	86.61	100.00	87.50		89.97	93.75	87.50	91.67	81.67	87.50	88.25	87.80	88.67	93.42	92.12	87.42	91.34		72.00	

Triwulan III

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM PERIODE TRIWULAN 3 TAHUN 2020

No.	Unit Pelaksana Teknis	Hasil Nilai Indeks Rata-Rata														Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks TW3 2020	Baseline 2020 (TW2)	Target	Keterangan
		Televisi	Radio	Brosur, majalah, koran	Videotron /Billboard	Transportasi Umum	Bioskop	Media Online	Talkshow Televisi	Talkshow Radio	CFD	Pameran	Penyuluhan	Media sosial	Virtual								
UNIT PELAKSANA TEKNIS		**87.42**	**85.48**	**90.65**	**90.41**	**89.17**	**80.21**	**89.24**	**88.41**	**89.00**	**87.67**	**87.98**	**93.22**	**89.23**	**89.66**	**90.82**	**93.89**	**93.69**	**88.18**	**92.77**	**91.12**	**86.78**	
A. REGIONAL SUMATERA		88.43	88.56	90.59	87.50	85.42	90.63	87.50	87.25	91.67	92.15	88.33	94.01	87.40	90.70	91.19	94.36	92.95	89.89	**93.55**	**91.36**	**87.01**	
1	BBPOM di Banda Aceh	91.67	93.75	85.71	83.33			87.50	87.50	83.33	85.71	85.00	94.12	89.29	90.00	89.46	90.12	94.35	88.79	**91.72**	**88.12**	**83.92**	
2	BBPOM di Medan	88.89	87.50	90.00	87.50			95.83	86.36	75.00	90.00	87.50	91.67	90.00	90.63	92.36	94.58	92.99	92.15	**93.23**	**93.67**	**89.21**	
3	BBPOM di Padang	87.50	75.00	87.50	75.00			80.00	75.00		91.67	75.00	89.71	75.00	87.50	87.62	95.50	92.67	87.33	**92.05**	**93.31**	**88.87**	
4	BBPOM di Pekanbaru	93.75	93.75	90.00	91.67	91.67	100.00	91.67	87.50	100.00	93.75	96.88	92.86	89.58	92.86	94.00	95.97	97.92	91.25	**95.85**	**91.19**	**86.85**	
5	BPOM di Jambi												100.00			93.92	95.22	97.22	92.46	**95.52**	**90.51**	**86.20**	
6	BBPOM di Palembang	90.38	92.86	90.38	100.00	91.67	87.50	90.00	95.00	100.00	100.00	96.88	95.00	93.06	96.88	91.89	92.63	94.68	88.56	**92.78**	**95.22**	**90.69**	
7	BPOM di Bengkulu	87.50	100.00	100.00	100.00			91.67	87.50				100.00	91.07	88.46	89.40	94.30	94.44	88.89	**92.95**	**88.23**	**84.03**	
8	BBPOM di Bandar Lampung	90.00	91.67	90.00	75.00	75.00	100.00	85.00	87.50		87.50	93.75	90.91	92.65	89.29	90.58	96.70	95.00	92.14	**94.55**	**90.95**	**86.62**	
9	BPOM di Pangkal Pinang	91.18	87.50	91.13	87.50	83.33	75.00	90.79	91.67	100.00	96.43	83.33	94.15	90.91	90.00	91.92	95.75	95.50	90.00	**94.28**	**94.38**	**89.89**	
10	BPOM di Batam	75.00	75.00					75.00					91.67	75.00		90.77	92.83	74.71	87.35	**92.53**	**88.05**	**83.86**	
B. REGIONAL JAWA		86.21	81.67	86.88	90.56	92.50	87.50	88.43	89.03	87.50	90.50	81.92	91.56	90.39	89.13	90.68	93.70	95.38	87.89	**93.16**	**91.52**	**87.16**	
11	BBPOM di Jakarta	87.75	75.00	87.50	87.50			91.67	75.00		75.00	75.00	88.10	83.33	95.00	89.80	93.96	94.87	84.62	**92.36**	**93.67**	**89.21**	
12	BBPOM di Bandung	86.11	75.00	87.50	90.00	100.00	75.00	86.54	91.67		100.00	75.00	89.29	90.00	85.00	89.20	91.71	94.41	87.06	**91.88**	**91.80**	**87.43**	
13	BBPOM di Semarang	84.62	75.00	88.89	93.75	100.00	100.00	90.63	85.00			75.00	92.00	87.50	91.67	91.30	92.58	96.71	86.84	**93.33**	**88.53**	**84.31**	
14	BBPOM di Yogyakarta	93.75	87.50	90.00	93.75	83.33		89.29	95.00	87.50	87.50	83.33	93.18	91.67	92.39	91.28	94.44	96.64	89.38	**94.25**	**91.19**	**86.85**	
15	BBPOM di Surabaya	90.00	90.00	86.11	95.00	91.67	100.00	86.11	100.00		100.00	97.50	97.92	94.57	90.38	94.49	96.48	97.00	92.50	**95.84**	**93.78**	**89.31**	
16	BBPOM di Serang	75.00	87.50	81.25	83.33	87.50	75.00	86.36	87.50	87.50	90.00	85.71	88.89	95.24	80.36	87.98	93.02	92.66	86.93	**91.32**	**90.14**	**85.85**	
C. REGIONAL BALI NUSRA		88.33	80.00	88.20	88.75	91.67	100.00	91.90	87.50	79.17	83.34	91.67	92.76	89.58	91.54	91.04	96.88	94.12	89.58	**93.81**	**91.94**	**87.56**	
17	BBPOM di Denpasar	90.00	85.00	88.89	90.00	75.00		94.44	87.50	83.33	91.67	87.50	92.65	87.50	90.00	90.80	96.80	95.50	88.50	**94.20**	**93.62**	**89.16**	
18	BBPOM di Mataram	75.00	75.00	87.50	87.50	100.00	100.00	81.25	75.00	75.00	75.00	87.50	92.86	81.25	84.62	93.41	96.51	95.19	91.35	**94.73**	**92.16**	**87.77**	
19	BPOM di Kupang	100.00				100.00		100.00	100.00			100.00		100.00	100.00	88.92	97.33	91.67	88.89	**92.51**	**90.03**	**85.74**	
D. REGIONAL KALIMANTAN		84.38	83.33	91.46	90.00	79.17	50.00	85.42	83.33	87.50	81.25	85.84	89.58	86.31	84.95	87.38	90.53	91.22	83.55	**89.33**	**90.87**	**86.54**	
20	BBPOM di Pontianak	84.38	75.00	84.38	80.00	83.33	50.00	70.83	75.00	87.50	75.00	80.00	83.33	87.50	85.42	84.65	78.67	86.24	80.06	**82.90**	**90.99**	**86.66**	
21	BBPOM di Palangkaraya	87.50	100.00	100.00	100.00			91.67	87.50				100.00	91.07	88.46	89.94	96.78	94.18	87.67	**93.38**	**90.95**	**86.62**	
22	BBPOM di Banjarmasin												87.50	75.00	75.00	85.48	92.90	90.85	81.34	**89.26**	**87.92**	**83.73**	
23	BBPOM di Samarinda	81.25	75.00	90.00		75.00		93.75	87.50		87.50	91.67	87.50	91.67	90.91	89.45	93.75	93.62	85.11	**91.79**	**93.61**	**89.15**	
E. REGIONAL SULAM PAPUA		88.22	88.48	93.76	93.58	92.19	68.75	91.85	92.00	96.88	85.37	92.50	95.56	91.40	90.91	92.19	94.04	94.31	88.44	**93.02**	**90.50**	**86.19**	
24	BBPOM di Manado	87.50	100.00	100.00	100.00			91.67	81.50				100.00	91.07	88.46	90.05	95.14	93.75	86.81	**92.59**	**89.47**	**85.21**	
25	BPOM di Palu	87.50	75.00	82.69	87.50	100.00	100.00	87.50	100.00		75.00	100.00	95.00	90.38	87.50	92.39	95.26	90.70	92.44	**92.45**	**91.34**	**86.99**	
26	BBPOM di Makassar	87.50	100.00	100.00	100.00			91.67	87.50				100.00	91.07	88.46	88.00	89.60	88.64	83.33	**87.94**	**89.42**	**85.16**	
27	BPOM di Kendari	87.50		100.00	100.00			83.33			75.00	100.00	92.50	90.28	94.23	93.07	96.41	95.41	89.29	**94.41**	**93.96**	**89.49**	

Triwulan IV

INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM PERIODE TRIWULAN 4 TAHUN 2020

No.	Unit Pelaksana Teknis	Hasil Nilai Indeks Rata-Rata													Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks TW 4 - 2020	Keterangan
		Televisi	Radio	Brosur, majalah, koran	Videotron/ Billboard	Transportasi Umum	Bioskop	Media Online	Talkshow Televisi	Talkshow Radio	CFD	Pameran	Penyuluhan	Media sosial	Virtual						
UNIT PELAKSANA TEKNIS		**89.02**	**82.23**	**90.68**	**85.17**	**82.65**	**66.93**	**90.79**	**88.06**	**83.40**	**92.00**	**90.55**	**91.13**	**90.81**	**88.49**	**91.51**	**94.92**	**94.72**	**88.40**	**93.38**	
A. REGIONAL SUMATERA		**90.68**	**82.13**	**91.96**	**84.46**	**80.67**	**55.95**	**91.90**	**85.33**	**84.03**	**91.65**	**90.62**	**90.53**	**89.53**	**87.94**	**91.55**	**94.87**	**95.47**	**90.32**	**94.02**	
1	BBPOM di Banda Aceh	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	86.22	91.76	90.75	83.66	**89.37**	
2	BBPOM di Medan	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	97.21	98.24	96.39	95.39	**96.82**	
3	BBPOM di Padang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	92.65	97.05	96.77	93.95	**95.96**	
4	BBPOM di Pekanbaru							100.00								91.35	94.33	93.31	86.62	**92.26**	
5	BPOM di Jambi	89.47	85.00	90.91	83.33	87.50		83.33	87.50	100.00	83.33	85.00	93.97	85.00	87.50	91.83	94.02	98.30	92.61	**95.38**	
6	BBPOM di Palembang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	89.53	96.14	93.38	90.44	**93.27**	
7	BPOM di Bengkulu	100.00	100.00	97.92		100.00		100.00	100.00	100.00	97.73	95.00	90.15	94.64	97.22	90.72	97.06	96.02	94.89	**95.60**	
8	BBPOM di Bandar Lampung	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	95.28	96.06	100.00	96.00	**97.74**	
9	BPOM di Pangkal Pinang	91.67	93.75	88.64	85.00	85.00		86.76	85.71	100.00	87.50	90.00	90.00	89.81	90.00	91.61	94.21	97.28	84.24	**93.63**	
10	BPOM di Batam	87.07	85.42	85.90	82.35	78.57	85.71	85.63	78.13	81.25	87.50	81.25	88.79	86.36	88.19	89.05	89.79	92.50	85.38	**90.18**	
B. REGIONAL JAWA		**89.58**	**75.00**	**92.86**	**85.00**	**75.00**	**50.00**	**92.65**	**83.33**	**75.00**	**93.75**	**92.86**	**90.38**	**90.00**	**85.71**	**89.87**	**91.80**	**94.51**	**86.16**	**91.86**	
11	BBPOM di Jakarta	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	90.69	91.99	96.88	85.94	**93.02**	
12	BBPOM di Bandung	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	88.34	92.74	94.96	82.66	**91.58**	
13	BBPOM di Semarang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	91.30	92.91	95.21	84.57	**92.36**	
14	BBPOM di Yogyakarta	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	90.29	92.90	92.81	85.31	**91.31**	
15	BBPOM di Surabaya	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	88.78	93.94	93.03	90.16	**92.38**	
16	BBPOM di Serang	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	89.79	86.31	94.17	88.33	**90.53**	
C. REGIONAL BALI NUSRA		**95.43**	**84.38**	**92.18**	**88.60**	**82.69**	**70.00**	**95.01**	**89.88**	**82.50**	**95.00**	**93.75**	**91.26**	**94.20**	**93.22**	**94.33**	**98.08**	**95.52**	**91.03**	**95.35**	
17	BBPOM di Denpasar	89.58	75.00	92.86	85.00	75.00	50.00	92.65	83.33	75.00	93.75	92.86	90.38	90.00	85.71	97.66	98.91	97.54	89.34	**96.53**	
18	BBPOM di Mataram	100.00						100.00					90.28	100.00	100.00	90.20	97.97	92.57	90.54	**93.51**	
19	BPOM di Kupang	96.71	93.75	91.49	92.19	90.38	90.00	92.39	96.43	90.00	96.25	94.64	93.13	92.59	93.94	95.14	97.36	96.45	93.21	**96.02**	
D. REGIONAL KALIMANTAN		**86.03**	**89.58**	**87.11**	**87.39**	**87.50**	**87.50**	**89.29**	**96.43**	**87.50**	**91.07**	**88.75**	**90.38**	**88.23**	**88.68**	**89.44**	**93.77**	**93.81**	**86.00**	**92.03**	
20	BBPOM di Pontianak	83.93	100.00	90.63	100.00	100.00	75.00	92.86	100.00	100.00	100.00	85.00	91.25	87.50	88.46	91.63	94.76	92.19	91.15	**92.68**	
21	BBPOM di Palangkaraya	88.46	87.50	85.00	84.38	87.50	100.00	90.63	89.29	75.00	85.71	87.50	90.00	90.97	87.93	89.18	93.16	94.34	82.55	**91.48**	
22	BBPOM di Banjarmasin												88.07	87.22		88.06	96.67	96.11	82.78	**93.19**	
23	BBPOM di Samarinda	85.71	81.25	85.71	77.78	75.00	87.50	84.38	100.00		87.50	93.75	92.21	87.24	89.66	88.90	90.49	92.61	87.50	**90.78**	
E. REGIONAL SULAM PAPUA		**86.07**	**83.80**	**88.99**	**83.79**	**89.14**	**90.15**	**87.60**	**90.14**	**89.63**	**90.56**	**88.43**	**92.39**	**92.32**	**88.95**	**92.45**	**96.32**	**94.29**	**88.22**	**93.64**	
24	BBPOM di Manado	89.53	85.71	88.19	89.10	86.46	95.45	89.10	89.84	89.58	90.91	89.84	92.14	89.75	91.85	90.95	95.00	94.10	89.91	**93.32**	
25	BPOM di Palu	79.17	91.67	85.71	75.00			85.71	87.50	87.50	83.33	83.33	91.67	85.71	81.25	91.14	98.49	94.58	83.33	**93.42**	
26	BBPOM di Makassar	87.50	75.00	87.50	50.00	100.00		85.71	100.00		100.00	75.00	97.00	90.63	90.00	93.90	92.45	94.53	85.94	**92.41**	
27	BPOM di Kendari	95.00	100.00	85.71	100.00	100.00		87.50	87.50		87.50	91.67	85.71	96.43	92.86	90.40	97.29	91.67	87.50	**92.41**	
28	BPOM di Gorontalo	83.33	75.00					88.89	87.50	85.71	75.00	90.63	93.27	98.28	91.38	94.93	97.69	97.62	97.02	**97.27**	
29	BPOM di Mamuju	95.00	75.00	95.00	100.00	75.00		93.75			95.83		95.54	91.67	87.50	94.81	97.23	97.78	90.56	**96.10**	
30	BPOM di Ambon	88.89	75.00	92.86	87.50	87.50	75.00	90.38	93.75	87.50	93.75	95.00	89.29	92.11	91.67	89.80	97.45	94.29	86.43	**93.39**	
31	BPOM di Sofifi	75.00		85.00				75.00					96.62	93.75		94.64	97.66	96.35	87.50	**95.04**	
32	BBPOM di Jayapura	83.93	89.29	92.50	81.25	75.00		89.06	83.33	100.00	93.75	87.50	88.89	92.31	82.35	87.35	90.12	92.22	83.33	**89.63**	
33	BPOM di Manokwari	83.33	87.50	88.46	87.50	100.00	100.00	90.91	91.67	87.50	95.00	94.44	93.75	92.59	91.67	96.60	99.85	89.76	90.66	**93.43**	

Untuk Nilai Indeks Efektivitas KIE tahun 2020 merupakan rata-rata nilai indeks dari triwulan II sampai triwulan IV, dengan menggunakan rumus (nilai tw II + nilai tw III + nilai tw IV) / 3.

(90,99 + 82,9 + 92,68) / 3 = 266,57 / 3 = **88,85**

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Unit Pelayanan	2019	2020	Naik/Turun
Balai Besar POM Di Pekanbaru	90,24	92,00	1,76
Balai Besar POM Di Palembang	94,39	91,74	-2,65
Balai Besar POM Di Bandar Lampung	85,16	92,08	6,92
Balai Besar POM Di Jakarta	86,17	88,19	2,02
Balai Besar POM Di Bandung	87,28	85,91	-1,37
Balai Besar POM Di Semarang	86,51	88,11	1,60
Balai Besar POM Di Yogyakarta	87,91	89,10	1,19
Balai Besar POM Di Surabaya	94,20	91,50	-2,70
Balai Besar POM Di Serang	85,82	85,51	-0,31
Balai Besar POM Di Denpasar	91,32	89,28	-2,04
Balai Besar POM Di Mataram	86,90	90,51	3,61
Balai Besar POM Di Pontianak	89,40	89,32	-0,08
Balai Besar POM Di Palangka Raya	86,96	89,40	2,44
Balai Besar POM Di Banjarmasin	87,90	89,18	1,28
Balai Besar POM Di Samarinda	86,03	85,16	-0,87
Balai Besar POM Di Manado	81,15	88,12	6,97
Balai Besar POM Di Makassar	88,77	93,31	4,54
Balai Besar POM Di Jayapura	86,52	88,20	1,68
Balai POM Di Jambi	79,42	86,02	6,60
Balai POM Di Bengkulu	90,32	92,14	1,82
Balai POM Di Batam	87,44	86,69	-0,75
Balai POM Di Kupang	83,21	87,02	3,81
Balai POM Di Palu	86,02	89,08	3,06
Balai POM Di Kendari	87,58	88,54	0,96
Balai POM Di Ambon	84,76	94,99	10,23
Balai POM Di Pangkalpinang	80,28	90,83	10,55
Balai POM Di Gorontalo	88,06	91,47	3,41
Balai POM Di Manokwari	94,44	99,09	4,65
Balai POM Di Mamuju	82,64	82,92	0,28
Balai POM Di Sofifi	79,56	90,43	10,87
Nilai SKM Badan POM	**84,47**	**87,00**	**2,53**

Keterangan:

- : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)
- : Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)
- : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)
- : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

9. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

NO	PROVINSI	INDEKS KEPUASAN
1	ACEH	69.45
2	SUMATERA UTARA	70.90
3	SUMATERA BARAT	71.83
4	RIAU	62.37
5	JAMBI	68.83
6	SUMATERA SELATAN	74.24
7	BENGKULU	76.17
8	LAMPUNG	77.72
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	69.70
10	KEPULAUAN RIAU	68.68
11	DKI JAKARTA	73.30
12	JAWA BARAT	75.43
13	JAWA TENGAH	69.30
14	DI YOGYAKARTA	75.89
15	JAWA TIMUR	74.18
16	BANTEN	79.76
17	BALI	69.08
18	NUSA TENGGARA BARAT	74.98
19	NUSA TENGGARA TIMUR	65.82
20	KALIMANTAN BARAT	65.76
21	KALIMANTAN TENGAH	61.00
22	KALIMANTAN SELATAN	76.11
23	KALIMANTAN TIMUR	70.20
24	KALIMANTAN UTARA	76.26
25	SULAWESI UTARA	81.16

10. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Unit Penyelenggara	KBP	Responden	Target	Capaian
1	Balai Besar POM di Jakarta	17	535	82,00	85,53
2	Balai Besar POM di Semarang	15	468	82,00	86,03
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	11	142	86,00	87,1
4	Balai Besar POM di Palembang	11	132	86,00	87,67
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	9	292	82,00	85,51
6	Balai Besar POM di Denpasar	9	129	83,00	89,57
7	Balai Besar POM di Surabaya	8	122	82,00	82,60
8	Balai POM di Kupang	7	62	83,00	89,07
9	Balai POM di Batam	7	58	86,00	86,88
10	Balai Besar POM di Bandung	6	161	82,00	90,82
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	6	85	86,00	94,30
12	Balai Besar POM di Medan	6	58	86,00	93,04
13	Balai POM di Mamuju	6	23	83,00	95,08
14	Balai POM di Ambon	6	37	65,40	87,38
15	Balai Besar POM di Samarinda	6	182	86,00	83,58
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	5	75	86,00	91,32
17	Balai Besar POM di Serang	4	103	82,00	83,69
18	Balai Besar POM di Mataram	4	63	83,00	86,48
19	Balai POM di Bengkulu	4	44	86,00	93,16
20	Balai Besar POM di Banjarmasin	4	34	86,00	96,35
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	4	19	86,00	87,60
22	Balai Besar POM di Padang	5	85	86,00	81,72
23	Balai Besar POM di Makassar	4	96	83,00	82,50
24	Balai POM di Manokwari	3	49	83,50	86,12
25	Balai POM di Kendari	3	43	83,00	79,35
26	Balai Besar POM di Manado	3	24	83,00	88,79
27	Balai POM di Gorontalo	3	22	83,00	84,53
28	Balai POM di Sofifi	3	20	65,00	90,18
29	Balai Besar POM di Jayapura	3	15	83,50	90,59
30	Balai POM di Palu	3	12	83,00	88,89
31	Balai POM di Jambi	3	10	86,00	86,70
32	Balai POM di Pangkalpinang	2	36	86,00	92,21
33	Balai Besar POM di Pontianak	2	16	86,00	92,19

11. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Pontianak

NO	PROVINSI	INDEKS KESADARAN
1	ACEH	71.75
2	SUMATERA UTARA	81.43
3	SUMATERA BARAT	81.14
4	RIAU	75.78
5	JAMBI	72.25
6	SUMATERA SELATAN	78.14
7	BENGKULU	83.80
8	LAMPUNG	82.75
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	76.73
10	KEPULAUAN RIAU	80.65
11	DKI JAKARTA	82.53
12	JAWA BARAT	67.35
13	JAWA TENGAH	71.91
14	DI YOGYAKARTA	76.68
15	JAWA TIMUR	73.23
16	BANTEN	87.33
17	BALI	69.54
18	NUSA TENGGARA BARAT	73.91
19	NUSA TENGGARA TIMUR	68.41
20	KALIMANTAN BARAT	80.54
21	KALIMANTAN TENGAH	68.09
22	KALIMANTAN SELATAN	78.36
23	KALIMANTAN TIMUR	82.98
24	KALIMANTAN UTARA	79.14
25	SULAWESI UTARA	78.22
26	SULAWESI TENGAH	75.78
27	SULAWESI SELATAN	76.36
28	SULAWESI TENGGARA	72.60
29	GORONTALO	79.70
30	SULAWESI BARAT	64.86
31	MALUKU	74.80
32	MALUKU UTARA	71.18



Copyright © 2020 by
BBPOM di Pontianak

1500533
HALOBPOM

pontianak.pom.go.id
@BPOMPontianak
Bbpom Pontianak
@bbpom.ponti
082255470600